

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025



BUPATI PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang

- : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2025 dalam perkembangannya tidak sesuai dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat yang berfokus pada penekanan efisiensi belanja tidak penting dan seremonial serta tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan pembangunan daerah yang didasari atas kemampuan keuangan daerah sehingga untuk memberikan pedoman penyusunan dokumen penganggaran pembangunan daerah meliputi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025, Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 serta rencana kerja perangkat daerah, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perubahan Rencana Daerah. serta Tata Cara Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanya dalam tahun berjalan menunjukakan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

- 8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

- 10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB II PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan lanjutan dari RKPD Tahun 2025 akibat terjadinya perubahan asumsi dari RKPD Tahun 2025, meliputi:

a. langkah-langkah efisiensi dan rasionalisasi belanja daerah dalam rangka penyehatan fiskal Daerah

Tahun Anggaran 2025;

 b. adanya penyesuaian visi, misi, sasaran, arah kebijakan dan indikator kinerja seiring dengan Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029;

c. adanya perbaikan rincian dana alokasi khusus, rincian belanja kegiatan yang didanai bantuan keuangan khusus provinsi jawa barat, dan rincian belanja yang bersumber dari dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya;

d. terdapat target kinerja daerah maupun perangkat daerah yang capaiannya masih rendah sehingga perlu dilakukan penyesuaian baik anggaran maupun

target kinerja;

e. perubahan target kinerja program kegiatan sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini serta kemampuan keuangan daerah; dan

f. realokasi anggaran program kegiatan untuk mendukung kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional, provinsi, maupun daerah.

- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dengan memuat rincian sebagai berikut:
 - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;

b. prioritas pembangunan Daerah; dan

c. rencana kerja dan pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(3) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam:

a. penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 dan PPAS Perubahan Tahun 2025;

- b. penyusunan rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; dan
- c. penyusunan bagi Perangkat Daerah dalam penyesuaian perubahan Renja-PD Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. evaluasi hasil triwulan I (satu) tahun 2025;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunann Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - g. penutup.
- (2) Ketentuan mengenai Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI PANGANDARAN,

CITRA PITRIYAMI

Diundangkan di Parigi pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025 NOMOR 23

DAFTAR ISI

PERAT	URAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG
PERUB	AHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PANGA	NDARAN TAHUN 2025
DAFTA	R ISIi
DAFTA	R TABELiii
DAFTA	R GAMBARvi
BAB I	PENDAHULUAN I-1
1.1	Latar BelakangI-1
1.2	Dasar Hukum PenyusunanI-4
1.3	Hubungan Antar DokumenI-10
1.4	Maksud dan TujuanI-12
1.4.1	MaksudI-12
1.4.2	TujuanI-12
1.5	Sistematika Penyusunan RKPDI-13
BAB II	EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025 II-1
2.1	Evaluasi Capaian Target Pendapatan dan Serapan Anggaran
	BelanjaII-1
2.2	Evaluasi Target Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan
	DaerahII-49
2.3	Ringkasan Hasil EvaluasiII-53
2.3.1	Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Standar
	Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan
	Berkelanjutan (SDGs)II-55
2.4	Permasalahan Pembangunan DaerahII-72
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi DaerahIII-2
3.1.1	Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangandaran
	Tahun 2025III-2
3.1.2	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah III-8
3.1.3	Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi III-15
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-20
3.2.1	Kondisi, Proyeksi Keuangan daerah dan Kerangka Pendanaan III-22
3.2.2	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-28
3.2.3	Arah Kebijakan Belanja Daerah III-34

3.2.4	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-40
3.3	Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah	III-43
3.3.1	. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	III-44
3.3.2	. APBD Provinsi Jawa Barat	III-45
3.3.3	.Alternatif Pembiayaan Lainnya	III-45
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-2
4.1.1	Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional	
	Tahun 2025	IV-3
4.1.2	. Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi	
	Jawa Barat Tahun 2025	IV-4
4.1.3	Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten	
	Pangandaran Tahun 2025	IV-11
4.2	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025	IV-41
4.2.1	Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	IV-41
4.2.2	. Telaah Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	
	Tahun 2025	IV-45
4.2.3	. Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran	IV-46
4.2.4	. Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Kabupaten	
	Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2025	IV-77
4.3	Inovasi Daerah	IV-102
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V -1
BAB VI	PENUTUP	VI-1
LAMPIE	RAN	

DAFTAR TABEL

	Halamar
Tabel 2.1	Realisasi Pendapatan Kabupaten Pangandaran
	Sampai Triwulan I Tahun 2025II-1
Tabel 2.2	Evaluasi Hasil Terhadap RKPD Kabupaten
	Pangandaran Triwulan I Tahun 2025II-5
Tabel 2.3	Evaluasi Target Kinerja Indikator Tujuan
	Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran
	Tahun 2024II-49
Tabel 2.4	Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
	Anggaran Program RKPD Triwulan I Kabupaten
	Pangandaran Tahun 2025II-53
Tabel 2.5	Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian SPM
	dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGDs)
	Tahun 2024II-56
Tabel 2.6	Pemetaan Permasalahan Pembangunan DaerahII-73
Tabel 3.1	PDRB ADHB Lapangan Usaha Kabupaten
	Pangandaran Tahun 2020-2024III-5
Tabel 3.2	PDRB ADHK Lapangan Usaha Kabupaten
	Pangandaran Tahun 2020-2024III-6
Tabel 3.3	Perkembangan PDRB Kabupaten Pangandaran Tahun
	2020-2024III-8
Tabel 3.4	Target dan Capaian Indikator Makro daerah
	Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2026III-12
Tabel 3.5	Target Indikator Makro, Nasional, Provinsi, Pangandaran
	Tahun 2025III-14
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah
	Kabupaten PangandaranIII-30
Tabel 3.7	Perbandingan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten
	Pangandaran Tahun 2025III-31
Tabel 3.8	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten
	Pangandaran III-36
Tabel 3.9	Perbandingan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten
	Pangandaran Tahun 2025III-37
Tabel 3.10	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
	Kabupaten PangandaranIII-41

Tabel 3.11	Perbandingan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah	
	Kabupaten Pangandaran Tahun 2025	III-42
Tabel 3.12	Alokasi APBN untuk Kabupaten Pangandaran Tahun	
	2023-2025	III-45
Tabel 3.13	Alokasi APBD Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten	
	Pangandaran Tahun 2023-2025	III-45
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa	
	Barat Tahun 2025	IV-7
Tabel 4.2	Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-	
	2029	IV-11
Tabel 4.3	Keselarasan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan	
	Pembangunan	IV-12
Tabel 4.4	Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Capaian Indikator	
	RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029	IV-23
Tabel 4.5	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap	
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan	
	Pemerintahan Kabupaten Pangandaran	IV-30
Tabel 4.6	Arah Kebijakan RKP 2025, Isu Strategis RPJMD,	
	Permasalahan Pembangunan, Arah Kebijakan RPJMD	
	2025-2029, dan Isu Strategis RKPD 2025	IV-49
Tabel 4.7	Prioritas Pembangunan 2025 dan Isu Strategis	IV-53
Tabel 4.8	Keterkaitan Program Pembangunan Daerah RKPD	
	Tahun 2025 dengan Arah Kebijakan Tujuan	
	Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable	
	Development Goals (SDG's)	IV-55
Tabel 4.9	Program Pendukung Strategi Penghapusan	
	Kemiskinan Ekstrem dan Perangkat Daerah	
	Penanggungjawab	IV-64
Tabel 4.10	Program Pendukung Percepatan Penurunan Stunting	
	dan Perangkat Daerah Penanggungjawab	IV-70
Tabel 4.11	Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten	
	Pangandaran	IV-76
Tabel 4.12	Unsur Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten	
	Pangandaran	IV-76
Tabel 4.13	Dukungan Kegiatan dalam Upaya Penurunan Emisi	
	Gas Rumah Kaca di Kabupaten Pangandaran	IV-77

Tabel 4.14	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional-Provinsi	
	Jawa Barat dan Kabupaten PangandaranIV-77	
Tabel 4.15	Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	
	Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 dengan	
	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	
	Tahun 2025 dan Indikator Sasaran Prioritas Nasional	
	pada RKP Tahun 2025IV-80	
Tabel 4.16	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dan	
	Program Prioritas Daerah Tahun 2025 terhadap	
	Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas	
	Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun	
	2025IV-94	
Tabel 4.17	Rekapitulasi Inovasi Perangkat DaerahIV-10	2
Tabel 5.1	Rincian Perubahan Anggaran Tahun 2025 Perangkat	
	DaerahV-1	
Tabel 5.2	Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pada Perubahan	
	RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025Lamp	irar
Tabel 5.3	Sinkronisasi Program Pembangunan Kabupaten	
	Pangandaran Terhadap Prioritas Pembangunan	
	Provinsi Jawa BaratV-4	
Tabel 5.4	Program Dan Kegiatan Prioritas Stunting, Penanganan	
	Kemiskinan, Pengendalian Inflasi, Ketahanan Pangan	
	dan Tingkat Pengangguran Terbuka Pada	
	Tahun 2025V-12	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan I-13
Gambar 3.1	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional,
	Jawa Barat dan Pangandaran Tahun 2020-2024 III-4
Gambar 3.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangandaran (%)
	2019-2023 III-5
Gambar 3.3	Arah Kebijakan Ekonomi 2025 Pangandaran III-19
Gambar 4.1	Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas
	Pembangunan DaerahIV-2

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk antisipasi adanya resesi global bagi ekonomi di daerah, pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

- 1. Substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja. pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab;
- 2. Normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD);
- 3. Operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintah dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya dalam Renja Perangkat Daerah;
- 4. Faktual, menjadi tolak ukur evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 merupakan proses penting yang dilaksanakan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025–2029, dokumen perencanaan jangka menengah pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada Tahun 2024. Visi pembangunan daerah yang menjadi landasan utama dalam penyusunan RKPD ini adalah:

"Pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan wisata Pangandaran mendunia dengan menitikberatkan pada pendidikan agama dan karakter."

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, telah ditetapkan delapan daerah, yaitu: 1) Mempermudah pembangunan akses meningkatkan kualitas layanan kesehatan; 2) Meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan; 3) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan; 4) Mewujudkan penataan pariwisata yang nyaman, dan berkesinambungan; 5) Meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, dan nasionalisme melalui penguatan pendidikan agama dan wawasan kebangsaan; 6) Mewujudkan kemandirian ketahanan pangan; 7) Meningkatkan birokrasi yang bersih dan melayani; 8) Meningkatkan kesejahteraan sosial dan perekonomian, serta penguatan dan pemberdayaan desa.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 juga digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPASP), serta sebagai bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain:

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;

- b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c) Penambahan/pengurangan sub kegiatan;
- d) Perubahan pagu anggaran program/kegiatan/sub kegiatan;
- e) Perubahan target kinerja;
- f) Perubahan struktur anggaran daerah;
- g) Penyesuaian kebijakan sesuai dengan regulasi terbaru; serta
- h) Dukungan terhadap sasaran pembangunan nasional dan provinsi Tahun 2025.

Kebutuhan Perubahan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 juga muncul dari berbagai dinamika aktual, antara lain yaitu;

- a. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 900.1/Kpts.154-Huk/2025 Tentang Penetapan Dokumen Detail Rencana Aksi Roadmap Penyehatan Fiskal Kabupaten Pangandaran;
- d. Adanya perubahan regulasi yang menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan tahun 2025;
- e. Langkah-Langkah Efisiensi Dan Rasionalisasi Belanja Daerah Dalam Rangka Penyehatan Fiskal Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025;
- f. Adanya Kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang belum dibayarkan sesuai dengan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 900.1.4.12/Kpts. 42-Huk/2025 tentang Penetapan Utang Belanja Atas Kegiatan yang Belum Dibayar Oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sehingga perlu dianggarkan Kembali pada dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2025;
- g. Adanya perbaikan rincian Dana Alokasi Khusus (DAK), rincian belanja kegiatan yang didanai Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Barat, dan rincian belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaanya.

- h. Terdapat target kinerja daerah maupun perangkat daerah yang capaiannya masih rendah sehingga perlu dilakukan penyesuaian baik anggaran maupun target kinerja.
- Perubahan target kinerja program kegiatan sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini serta kemampuan daerah menyesuaikan dengan RPJMD tahun 2025-2029.
- j. Realokasi anggaran program kegiatan untuk mendukung kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah.

Kondisi fiskal daerah yang masih tertekan akibat permasalahan akumulatif sejak 2019, termasuk peningkatan utang dan defisit anggaran, mendorong perlunya strategi penyehatan keuangan melalui optimalisasi PAD, efisiensi belanja, serta perluasan sumber pembiayaan non-APBD. Kebijakan belanja diarahkan pada mandatory spending, belanja wajib, dan prioritas lintas pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, Perubahan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 menjadi instrumen penting untuk menjaga konsistensi, efisiensi, dan efektivitas perencanaan dan penganggaran daerah, sekaligus menjadi pedoman utama dalam penyusunan dokumen KUPA, PPASP, dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi

- Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
- 20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- 24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
- 25. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
 Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 2029
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 27. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
- 28. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 29. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 36. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
- 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
- 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
- 39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

- dan Keuangan Daerah;
- 40. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- 41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
- 42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
- 43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
- 44. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
- 45. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
- 46. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
- 47. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-

- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 9);
- 48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
- 49. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
- 50. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
- 51. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 40);
- 52. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu daerah, tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD telah disepakati digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. Dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja SKPD.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pangandaran tahun 2025 ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan, disamping sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian indikator keberhasilan pembangunan daerah sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029.

Perubahan RKPD tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP).

Pedoman Dipedomani **RENSTRA KL RENJA KL PEMERINTAH** Dipedomani **PUSAT** Diacu Dijabarkan Dipedomani **RPJP NAS RPJM NAS RKP** Diserasikan melalui Diperhatikan Musrenbang Dipedomani Diiabarkan **RPJPD RPJMD RKPD PEMERINTAH** Dipedomani Diacu DAERAH Dipedomani **RENSTRA RENJA SKPD SKPD**

Gambar 1.1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan

Secara substansi, RKPD Kabupaten Pangandaran tahun 2025 disusun dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2038, RTRW Provinsi Jawa Barat dan RTRW Nasional, RPJMD Kabupaten Pangandaran, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional, serta dokumen-dokumen perencanaan lainnya di tingkat pusat, provinsi maupun daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pangandaran tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1.4.1. Maksud

Perubahan RKPD Kabupaten Pangandaran tahun 2025 dimaksudkan adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2025, yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025, sebagai pedoman penyusunan KUPA – PPASP Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 untuk menyusun perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4.2. Tujuan

Perubahan RKPD Kabupaten Pangandaran tahun 2025 ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD tahun 2025. Penyusunan ini juga bertujuan untuk merangsang partisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi proses pembangunan. Secara sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pangandaran tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Kabupaten Pangandaran tahun 2025 yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan tahun 2025;
- 2) Mewujudkan konsistensi antara perencanaan strategis jangka menengah daerah dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan daerah;
- 3) Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- 4) Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan;
- 5) Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.5 Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen Perubahan RKPD serta maksud dan tujuan.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini menguraikan tentang pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan I, serta capaian kinerja pemerintahan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang perkiraan kondisi ekonomi tahun 2025, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan Nasional, rancangan ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, serta usulan SKPD.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD), dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD, sebagai bagian penegasan pemerintah daerah kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, dilakukan untuk mengukur capaian tiap program, kegiatan dan sub kegiatan, dengan melihat tingkat kemajuan (progress) pencapaian target kinerja maupun anggaran sampai dengan bulan Maret 2025.

2.1 Evaluasi Capaian Target Pendapatan dan Serapan Anggaran Belanja

Tingkat capaian target pendapatan daerah dan serapan anggaran program, kegiatan, dan sub-kegiatan memiliki dampak langsung ataupun tidak langsung terhadap pencapaian kinerja sasaran. Hasil evaluasi terhadap capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi salah satu dasar penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025. Perubahan RKPD juga diselaraskan dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan khususnya terkait dengan capaian indikator kinerja daerah dan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, pagu indikatif program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025 dapat bertambah/berkurang sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini adalah tabel pencapaian target pendapatan daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025.

Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan Kabupaten Pangandaran Sampai Triwulan I Tahun 2025

NO	URAIAN	TARGET RKPD 2025	TARGET APBD 2025	REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2025
4	PENDAPATAN DAERAH	2.148.682.052.901,00	1.268.065.899.325,00	161.073.225.759,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	304.658.250.000,00	276.241.947.419,00	25.638.159.813,00
4.1.01	Pajak Daerah	109.331.250.000,00	110.349.557.960,00	16.330.206.513,00
4.1.02	Retribusi Daerah	42.407.000.000,00	162.982.520.710,00	6.412.261.564,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	700.000.000,00	820.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	152.220.000.000,00	2.089.868.749,00	2.895.691.736,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.844.023.802.901,00	991.823.951.906,00	135.435.065.946,00
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.023.942.885.918,00	933.080.252.000,00	134.153.097.200,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	862.834.839.074,05	834.249.376.000,00	134.153.097.200,00

NO URAIAN		TARGET RKPD 2025	TARGET APBD 2025	REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2025
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	110.128.734.074,00	60.937.516.000,00	8.033.124.200,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	554.021.397.000,00	574.627.152.000,00	123.745.554.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	198.684.708.000,00	198.684.708.000,00	2.374.419.000,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	52.401.098.146,01	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	108.706.948.697,94	98.830.876.000,00	0,00
4.2.02	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-
4.2.02.01	Dana Penyesuaian	-	-	-
4.2.03	Transfer Antar Daerah	820.080.916.983,00	58.743.699.906,00	1.281.968.746,00
4.2.03.01	Pendapatan bagi hasil	57.464.310.548,00	43.579.020.210,00	1.281.968.746,00
4.2.03.02	Bantuan Keuangan Lain-lain	762.616.606.435,00	15.164.679.696,00	0,00
4.3	pendapatan daerah yang sah	-	-	-
4.3.01	Hibah	-	-	-
4.3.02	Dana darurat Lain-lain	-	-	-
4.3.03	pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan BELANJA	-	-	-
5	DAERAH	2.126.465.652.901,00	1.542.715.899.325,00	261.661.149.449,00
5.1	Belanja Operasi	1.329.977.992.522,00	1.136.901.891.592,00	175.349.565.403,00
	g p	1.0131311133110114,00	1.100.501.051.052,00	173.349.303.403,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	552.966.092.953,00	574.978.331.068,20	103.448.147.344,00
5.1.01. 5.1.02.				
	Belanja Pegawai Belanja Barang	552.966.092.953,00	574.978.331.068,20	103.448.147.344,00
5.1.02.	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Hibah	552.966.092.953,00 665.374.742.769,00	574.978.331.068,20 509.483.153.723,80	103.448.147.344,00 68.095.306.948,00
5.1.02. 5.1.03.	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga	552.966.092.953,00 665.374.742.769,00 37.000.000.000,00	574.978.331.068,20 509.483.153.723,80 27.000.000.000,00	103.448.147.344,00 68.095.306.948,00 1.606.111.111,00
5.1.02. 5.1.03. 5.1.05.	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan	552.966.092.953,00 665.374.742.769,00 37.000.000.000,00 73.437.156.800,00	574.978.331.068,20 509.483.153.723,80 27.000.000.000,00 23.089.656.800,00	103.448.147.344,00 68.095.306.948,00 1.606.111.111,00 2.200.000.000,00
5.1.02. 5.1.03. 5.1.05. 5.1.06.	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Modal Tanah	552.966.092.953,00 665.374.742.769,00 37.000.000.000,00 73.437.156.800,00 1.200.000.000,00	574.978.331.068,20 509.483.153.723,80 27.000.000.000,00 23.089.656.800,00 2.350.750.000,00	103.448.147.344,00 68.095.306.948,00 1.606.111.111,00 2.200.000.000,00
5.1.02. 5.1.03. 5.1.05. 5.1.06.	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Modal	552.966.092.953,00 665.374.742.769,00 37.000.000.000,00 73.437.156.800,00 1.200.000.000,00 705.148.832.379,00	574.978.331.068,20 509.483.153.723,80 27.000.000.000,00 23.089.656.800,00 2.350.750.000,00 202.452.293.837,00	103.448.147.344,00 68.095.306.948,00 1.606.111.111,00 2.200.000.000,00 0,00 78.390.926.100,00
5.1.02. 5.1.03. 5.1.05. 5.1.06. 5.2. 5.2.01.	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan	552.966.092.953,00 665.374.742.769,00 37.000.000.000,00 73.437.156.800,00 1.200.000.000,00 705.148.832.379,00 0,00	574.978.331.068,20 509.483.153.723,80 27.000.000.000,00 23.089.656.800,00 2.350.750.000,00 202.452.293.837,00 1.108.315.000,00	103.448.147.344,00 68.095.306.948,00 1.606.111.111,00 2.200.000.000,00 0,00 78.390.926.100,00
5.1.02. 5.1.03. 5.1.05. 5.1.06. 5.2. 5.2.01.	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan	552.966.092.953,00 665.374.742.769,00 37.000.000.000,00 73.437.156.800,00 1.200.000.000,00 705.148.832.379,00 0,00 290.643.352.758	574.978.331.068,20 509.483.153.723,80 27.000.000.000,00 23.089.656.800,00 2.350.750.000,00 202.452.293.837,00 1.108.315.000,00 100.113.385.996,00	103.448.147.344,00 68.095.306.948,00 1.606.111.111,00 2.200.000.000,00 0,00 78.390.926.100,00 0,00 26.209.940.749,00
5.1.02. 5.1.03. 5.1.05. 5.1.06. 5.2. 5.2.01. 5.2.02.	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Jaringan,	552.966.092.953,00 665.374.742.769,00 37.000.000.000,00 73.437.156.800,00 1.200.000.000,00 705.148.832.379,00 0,00 290.643.352.758 193.154.155.648,00	574.978.331.068,20 509.483.153.723,80 27.000.000.000,00 23.089.656.800,00 2.350.750.000,00 202.452.293.837,00 1.108.315.000,00 100.113.385.996,00 74.963.575.687,00	103.448.147.344,00 68.095.306.948,00 1.606.111.111,00 2.200.000.000,00 0,00 78.390.926.100,00 0,00 26.209.940.749,00 37.094.540.297,00
5.1.02. 5.1.03. 5.1.05. 5.1.06. 5.2. 5.2.01. 5.2.02. 5.2.03.	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Belanja Modal Aset Tetap	552.966.092.953,00 665.374.742.769,00 37.000.000.000,00 73.437.156.800,00 1.200.000.000,00 705.148.832.379,00 0,00 290.643.352.758 193.154.155.648,00 221.351.323.973,00	574.978.331.068,20 509.483.153.723,80 27.000.000.000,00 23.089.656.800,00 2.350.750.000,00 202.452.293.837,00 1.108.315.000,00 100.113.385.996,00 74.963.575.687,00 21.070.788.354,00	103.448.147.344,00 68.095.306.948,00 1.606.111.111,00 2.200.000.000,00 0,00 78.390.926.100,00 0,00 26.209.940.749,00 37.094.540.297,00 15.086.445.054,00

NO	URAIAN	TARGET RKPD 2025	TARGET APBD 2025	REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2025
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	16.523.829.000,00	79.752.077,00
5.4.	Belanja Transfer	86.338.828.000,00	186.837.884.896,00	7.840.905.869,00
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	29.303.164.500,00	15.275.655.796,00	2.615.045.284,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	57.035.663.500,00	171.562.229.100,00	5.225.860.585,00
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	-22.216.400.000,00	274.650.000.000,00	105.000.000.000,00
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	30.783.600.000,00	454.650.000.000,00	140.000.000.000,00
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.783.600.000,00	14.650.000.000,00	0,00
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	440.000.000.000,00	140.000.000.000,00
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	53.000.000.000,00	180.000.000.000,00	35.000.000.000,00
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	53.000.000.000,00	142.500.000.000,00	0,00
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	-	37.500.000.000,00	35.000.000.000,00

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, 2025

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif RKPD Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025 terhadap realisasi APBD TA. 2025. Untuk Pendapatan Daerah dari total pagu indikatif APBD TA. 2025 sebesar Rp. 1.268.065.899.325,00 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat direalisasikan sebesar Rp. 161.073.225.759,00 atau sebesar 12,70%. Capaian tersebut menandakan masih belum optimalnya pemanfaatan potensi keuangan daerah. Pendapatan daerah khususnya pajak sebagai instrument penting pembangunan, semakin tinggi dan semakin besar penerimaan pajak maka pembangunan akan lebih cepat. Rendahnya capaian pendapatan daerah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Belum belum optimalnya pengelolaan dan peningkatan pendapatan asli daerah;

- 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah belum optimal;
- 3. Beberapa sumber pajak dan retribusi belum memiliki perda;
- 4. Komposisi PDRB untuk sektor penyedia akomodasi dan makan minum belum menyumbang kontribusi tinggi terhadap PAD padahal sektor ini yang didalamnya ada kegiatan pariwisata yang merupakan sektor unggulan Kabupaten Pangandaran;
- 5. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah;
- 6. Lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah;
- 7. Belum optimalnya interventarisasi sumber PAD.

Selain pendapatan daerah yang belum optimal, belanja daerah tahun 2025 juga mengalami hal yang sama, dari total pagu indikatif APBD TA. 2025 sebesar Rp. 1.542.715.899.325,00 baru terealisasi sebesar Rp. 261.661.149.449,00 atau sebesar 16,96%. Kurang optimalnya realisasi belanja daerah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- 1. Mayoritas kegiatan pelaksanaannya di semester 2;
- Adanya efisiensi anggaran program/kegiatan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Untuk pembiayaan daerah juga realisasinya masih belum optimal, dari total pagu indikatif APBD TA. 2025 sebesar Rp. 274.650.000.000,00 baru terealisasi sebesar Rp. 105.000.000.000,00 atau sebesar 38,23%.

Untuk sektor belanja daerah didasarkan pada rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program yang ada pada perangkat daerah. Hasil evaluasi itu dijabarkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Form E-60. Gambaran hasil evaluasinya dijabarkan pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Evaluasi Hasil Terhadap RKPD Kabupaten Pangandaran Triwulan I Tahun 2025

SKPD/PROGRAM				TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		CAPAIAN AN ANGGARAN TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persen	94 94 84 95	343.957.962.378,00	23 23 23 23 23	73.266.564.204,00	27,38	21,30	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Persentase Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Pada Masa Dan Pasca Pandemi Persentase Layanan Pendidikan Non Formal Dan Informal Persentase Tingkat Budi Pekerti Peserta Didik	Persen	100 96 86 93	256.223.758.844,00	23 22 21 25	47.228.870.148,00	24,42	18,43	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan Untuk Standar Isi	Persen	56,00	2.017.999.698,00		-	-	-	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025		ASI KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	KINERJA DA	CAPAIAN N ANGGARAN FAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan Untuk Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persen	58,00	1.600.000.000,00	14,00	558.000.000,00	24,14	34,88	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	persentase Layanan Literasi Siswa	Persen	64,00	520.000.000,00		-	-	-	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase pembinaan wirausaha muda dan Persentase pemuda yang aktif dalam pembangunan Cakupan pembinaan wirausaha muda dan Persentase pemuda yang aktif dalam pembangunan	Persen	80 80	15.888.100.000,00			-	-	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Prestasi Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	Persen	80,00	62.167.100.000,00	20,00	199.975.000,00	25,00	0,32	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	persentase Pemuda Yang aktif dalam Kepramukaan	Persen	80,00	130.000.000,00		-	-	-	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		RATA	A-RATA CAPAL	AN KINERJA DAN ANGC	GARAN DARI SE	ELURUH PROGRAM (%)	12,62	9,37	
				PREDIKAT	KINERJA DAR	I SELURUH PROGRAM	(SR)	(SR)	
DINAS KESEHATAN									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persen	90 90 90 90	90.504.772.330,00	10 10 10 10	24.035.310.275,00	11,11	26,56	DINAS KESEHATAN

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025		ASI KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	KINERJA DA	CAPAIAN AN ANGGARAN TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase sistem informasi yang terkelola Persentase sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang terpenuhi dan layak fungsi	Persen	90 90 90	110.892.991.670,00	20 20 20 20	31.412.677.267,00	22,22	28,33	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	Persen	90,00	300.000.000,00		-	-	-	DINAS KESEHATAN
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase farmasi, alat kesehatan yang terpenuhi	Persen	90,00	200.000.000,00		-	-	-	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PADAHERANG									DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persen	90 90 90 90	5.000.000.000,00		-	-	-	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SINDANGWANGI									DINAS KESEHATAN

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Persen	90 90 90 90	2.200.000.000,00		-	-	-	DINAS KESEHATAN	
PUSKESMAS MANGUNJAYA									DINAS KESEHATAN	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persen	90 90 90 90	3.750.000.000,00		-	-	-	DINAS KESEHATAN	
PUSKESMAS KALIPUCANG									DINAS KESEHATAN	

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Persen	90 90 90 90	4.500.000.000,00		-	-	-	DINAS KESEHATAN	
PUSKESMAS PANGANDARAN									DINAS KESEHATAN	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baikPersentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitasPersentase peningkatan kompetensi aparaturPersentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persen	90909090	7.400.000.000,00		-	-	-	DINAS KESEHATAN	
PUSKESMAS SIDAMULIH									DINAS KESEHATAN	

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persen	90 90 90 90	1.233.600.000,00		-	-	-	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CIKEMBULAN									DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persen	90 90 90 90	2.721.800.000,00		-	-	-	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PARIGI									DINAS KESEHATAN

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persen	90 90 90 90	4.800.000.000,00		-	-	-	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SELASARI									DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persen	90 90 90 90	1.165.200.000,00		-	-	-	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CIJULANG									DINAS KESEHATAN

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		KINERJA DA	CAPAIAN AN ANGGARAN TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persen	90 90 90 90	4.500.000.000,00			-	-	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CIMERAK									DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persen	90 90 90 90	2.448.000.000,00		-	-	-	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LEGOKJAWA									DINAS KESEHATAN

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		KINERJA DA	CAPAIAN AN ANGGARAN TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persen	90 90 90 90	2.400.000.000,00		_	-	-	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CIGUGUR									DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Persen	90 90 90 90	2.650.000.000,00		-	-	-	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LANGKAPLANCAR									DINAS KESEHATAN

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		KINERJA DA	CAPAIAN AN ANGGARAN TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Persen	90 90 90 90	3.250.000.000,00		-	-	-	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS JADIKARYA									DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Persen	90 90 90 90	2.150.000.000,00		-	-	-	DINAS KESEHATAN
RSUD PANDEGA									DINAS KESEHATAN

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		KINERJA DA	CAPAIAN IN ANGGARAN TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparaturPersentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitasPersentase laporan keuangan dengan kualitas baikPersentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persen	90909090	115.000.000.000,00		-	-	-	DINAS KESEHATAN	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang terpenuhi dan layak fungsi Persentase sistem informasi yang terkelola	Persen	90 90 90	5.000.000.000,00		-	-	-	DINAS KESEHATAN	
		RATA	A-RATA CAPAI	AN KINERJA DAN ANGC	GARAN DARI SE	ELURUH PROGRAM (%)	1,59	2,61		
				PREDIKAT	`KINERJA DAR	I SELURUH PROGRAM	(SR)	(SR)		
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025		ASI KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persen	94 94 94 94	9.876.212.481,00	17,62 17,62 17,62 17,62	1.719.513.394,00	18,74	17,41	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Persen	72,57	14.795.500.000,00	-	4.377.673.580,00	-	29,59	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Layanan Teknis Air Minum Dan Air Bersih	Persen	75,00	256.900.000,00	-	1.825.169.050,00	-	710,46	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Persampahan	Persen	100,00	4.800.000,00		-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan ketersediaan layanan air limbah	Persen	61,00	254.980.000,00	-	1.174.108.900,00	-	460,47	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025		ASI KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	KINERJA DA	r Capaian An Anggaran Tahun 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dan Gorong - Gorong Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	62,00	14.700.000,00		-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Infrastruktur Kawasan Permukiman Dalam Kondisi Baik	Persen	65,00	69.950.979.000,00		-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Sarana Pemerintahan Yang Terbangun	Persen	79,40	29.333.241.000,00	-	2.438.659.500,00	-	8,31	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase Jalan Dalam Kondisi Mantap Persentase Jalan Baru Yang Terbangun	Persen	89,50 91,58	257.721.979.492,00	-	9.197.755.724,00	-	3,57	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	Persen	47,54	58.000.000,00	-	32.460.000,00	-	55,97	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Rumah Korban Bencana yang ditangani	Rumah	50 Rumah	530.000.000,00	-	336.006.990,00	-	63,40	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

II-17

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persen	25,64	2.000.000.000,00		-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	persentase PSU yang ditingkatkan	Persen	15,00	28.000.000,00		-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		RATA	A-RATA CAPAL	CLURUH PROGRAM (%)	1,44	103,78				
				PREDIKAT	`KINERJA DAR	I SELURUH PROGRAM	(SR)	(ST)		
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persen	100 100 100 100	9.628.116.710,00	25 25 25 25 25	1.411.217.989,00	25,00	14,66	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian SPM trantibum Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	61 100	7.713.923.440,00	61 25	2.050.805.000,00	40,98	26,59	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	-	ASI KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	KINERJA DA	CAPAIAN N ANGGARAN TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran	Persen	100,00	655.867.150,00	25,00	107.800.000,00	25,00	16,44	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		RATA	A-RATA CAPAL	AN KINERJA DAN ANGO	GARAN DARI SE	CLURUH PROGRAM (%)	30,33	19,23	
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						(SR)	(SR)	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang TerpenuhiPresentase Peningkatan Kompetensi AparaturPresentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang BerkualitasPresentase Laporan Keuangan dengan kualitas baik	Persen	10010010 0100	3.359.520.006,00	20202020	604.295.269,00	20,00	17,99	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana	Persen	100,00	1.904.004.994,00	25,00	86.743.119,00	25,00	4,56	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		RATA	A-RATA CAPAL	AN KINERJA DAN ANGO	GARAN DARI SE	CLURUH PROGRAM (%)	22,50	11,27	
				PREDIKAT	`KINERJA DAR	I SELURUH PROGRAM	(SR)	(SR)	
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Persen	94 100 100 94	3.692.462.085,00	23 25 25 23	952.156.774,00	24,47	25,79	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025		ASI KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	95 75	66.000.000,00	22,50 17,50	16.500.000,00	23,33	25,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persen	8,00	4.370.000.000,00	2,00	23.291.500,00	25,00	0,53	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Keluarga Miskin yang Meningkat Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	Persen	10,00	648.000.000,00	2,50	144.400.000,00	25,00	22,28	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup	Persen	100,00	566.000.000,00	25,00	108.400.000,00	25,00	19,15	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di Kelola	Persen	100,00	40.000.000,00	25,00	3.037.500,00	25,00	7,59	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	-	T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	Persen	65,00	500.000.000,00	15,00	34.468.000,00	23,08	6,89	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Lembaga Kemasyarakat Desa yang aktif	Persen	100,00	3.191.000.000,00	25,00	111.050.000,00	25,00	3,48	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		RATA	A-RATA CAPAI	AN KINERJA DAN ANGC	GARAN DARI SE	CLURUH PROGRAM (%)	24,48	13,84	
				PREDIKAT	`KINERJA DAR	I SELURUH PROGRAM	(SR)	(SR)	
DINAS KETENAGAKERJAAN									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Persen	80 90 90 80	2.267.261.000,00	20 22,50 22,50 20	508.608.281,00	25,00	22,43	DINAS KETENAGAKERJAAN
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen RTK yang Diselesaikan	Persen	90,00	70.000.000,00	10,00	11.400.000,00	11,11	16,29	DINAS KETENAGAKERJAAN
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Kualitas dan Produktifitas Tenaga kerja Meningkat	Persen	80,00	421.379.500,00		-	-	-	DINAS KETENAGAKERJAAN

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	-	ASI KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	KINERJA DA	CAPAIAN N ANGGARAN TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang diserap	Persen	75,00	80.000.000,00	20,00	12.991.480,00	26,67	16,24	DINAS KETENAGAKERJAAN
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus Ketenagakerjaan pada Perusahaan Menurun	Persen	90,00	256.000.000,00	20,00	26.100.000,00	22,22	10,20	DINAS KETENAGAKERJAAN
		RATA	A-RATA CAPAI	AN KINERJA DAN ANGC	GARAN DARI SE	ELURUH PROGRAM (%)	17,00	13,03	
				PREDIKAT	`KINERJA DAR	I SELURUH PROGRAM	(SR)	(SR)	
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Persen	100 95 95 100	3.635.020.584,00	25 23,75 23,75 25	741.646.355,00	25,00	20,40	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kelembagaan PUG aktif Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	95,38 16,79	178.848.784,00	23,66 3,75	27.765.000,00	22,33	15,52	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025		ASI KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	Persen	88,00	26.516.984,00		-	-	-	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kemandirian PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)	Persen	80,00	204.000.000,00		45.000.000,00	-	22,06	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Kabupaten/Kota Layak AnakPersentase pemenuhan kelompok hak anak	NilaiPersen	Nindya (700-800) Nilai100	56.350.944,00		4.200.000,00	-	7,45	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	Persen	12,00	66.943.826,00		-	-	-	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase laporan pengendalian lapangan tingkat kecamatan sistem informasi kependudukan dan keluarga (SIGA) Validitas data keluarga beresiko stunting	Persen	100 100	313.735.878,00		14.579.510,00	-	4,65	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	-	ASI KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	KINERJA DA	CAPAIAN N ANGGARAN TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi peserta KB aktif Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting	Persen	75,79 75	3.007.541.000,00		484.571.000,00	-	16,11	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting bagi calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil dan Ibu pasca persalinan Persentase peningkatan pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Persen	75 79,02	2.445.189.000,00		4.800.000,00	-	0,20	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		RATA	A-RATA CAPAL	AN KINERJA DAN ANGC	GARAN DARI SE	CLURUH PROGRAM (%)	5,26	9,60	
				PREDIKAT	`KINERJA DAR	I SELURUH PROGRAM	(SR)	(SR)	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Persen	100 100 100 100	4.726.709.451,00	25 25 25 25 25	930.056.124,00	25,00	19,68	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Ketaatan Terhadap Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	25,00	15.000.000,00		-	-	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025		ASI KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kualitas Air dan Udara yang memenuhi Baku Mutu	Persen	30,50	45.000.000,00		-	-	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Tutupan Lahan yang dikelola	Persen	0,90	11.182.098.382,00	0,30	120.684.222,00	33,33	1,08	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Dibina	Persen	49,00	14.999.200,00		-	-	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan PPLH PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemda	Persen	71,00	14.999.300,00		-	-	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Yang Ditangani Pemda	Persen	73,33	14.991.950,00		-	-	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan layanan persampahan	Persen	29,50	35.095.284.717,00	6,50	613.875.080,00	22,03	1,75	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
		RATA	A-RATA CAPAL	AN KINERJA DAN ANGC	GARAN DARI SE	ELURUH PROGRAM (%)	10,05	2,81		
				PREDIKAT	`KINERJA DAR	I SELURUH PROGRAM	(SR)	(SR)		
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persen	100 100 100 100	4.372.932.682,00		463.382.627,00	-	10,60	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan	Persen	100,00	196.375.550,00	25,00	64.400.000,00	25,00	32,79	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	100,00	159.843.400,00	25,00	25.200.000,00	25,00	15,77	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang dikelola secara elektronik	Persen	100,00	85.241.000,00		9.300.000,00	-	10,91	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		RATA	A-RATA CAPAI	AN KINERJA DAN ANGO	GARAN DARI SE	CLURUH PROGRAM (%)	12,50	17,52	
		I SELURUH PROGRAM	(SR)	(SR)					
DINAS PERHUBUNGAN									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Persen	95 100 100 95	13.554.920.040,00	23,75 25 25 25 23,75	2.900.749.025,00	25,00	21,40	DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pelayanan Angkutan Darat Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Persentase Pelayanan Izin Trayek Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	25 70 15 15	121.917.957.450,00	6,25 17,50 3,75 3,75	174.390.800,00	25,00	0,14	DINAS PERHUBUNGAN
		RATA	A-RATA CAPAI	AN KINERJA DAN ANGO	GARAN DARI SE	CLURUH PROGRAM (%)	25,00	10,77	
				PREDIKAT	`KINERJA DAR	I SELURUH PROGRAM	(SR)	(SR)	
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN									

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	_	T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	-	ASI KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persen	94 94 94 94	3.666.685.000,00	23,50 23,50 23,50 23,50 23,50	860.910.066,00	25,00	23,48	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tata kelola komunikasi publik Persentase tata kelola layanan informasi publik	Persen	70 70	308.498.000,00	25 25	39.439.000,00	35,71	12,78	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat kematangan tata kelola SPBE	Indeks	3.4	262.240.000,00	3,55	42.509.500,00	104,41	16,21	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase publikasi data statistik sektoral	Persen	70,00	18.152.000,00	44,82	6.642.500,00	64,03	36,59	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman	Persen	35,00	11.110.000,00	10,00	5.877.000,00	28,57	52,90	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
		RATA	A-RATA CAPAL	AN KINERJA DAN ANGO	GARAN DARI SE	ELURUH PROGRAM (%)	51,55	28,39		
				PREDIKAT	`KINERJA DAR	I SELURUH PROGRAM	(R)	(SR)		
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Persen	100 100 100 100	3.770.982.000,00	100 100 100 100	840.887.228,00	100,00	22,30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025		SI KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang patuh	Persen	52,00	21.807.750,00	6,59	8.467.200,00	12,67	38,83	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan SDM Pengelola Koperasi bersertifikat	Persen	45,00	554.511.000,00		-	-	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	Persen	0,10	53.192.250,00		-	-	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	Persen	34,62	50.000.000,00	19,23	8.467.200,00	55,55	16,93	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	Persen	77,80	60.000.000,00	66,67	25.916.600,00	85,69	43,19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang tertib ukur	Persen	55,12	15.000.000,00		-	-	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025		ASI KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk lokal yang meningkat omsetnya	Persen	2,50	25.000.000,00		-	-	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pengembangan Industri yang Ditangani	Persen	85,00	1.565.000.000,00	4,26	127.808.100,00	5,01	8,17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Industri Kecil dan menengah yang berizin	Persen	100,00	10.000.000,00		-	-	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
		RATA	A-RATA CAPAL	AN KINERJA DAN ANGC	GARAN DARI SE	CLURUH PROGRAM (%)	25,89	12,94		
				PREDIKAT	`KINERJA DAR	I SELURUH PROGRAM	(SR)	(SR)		
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	sayan									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persen	86 86 86 86	4.303.071.524,00	15,75 15,75 15,75 15,75	494.426.683,00	18,31	11,49	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tingkat Pertumbuhan Jumlah Investor	Investor	221,00	221.526.000,00		-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan Peningkatan Peluang Investasi Yang Terpublikasi	Persen	10,00	193.287.820,00		-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Persen	90,00	10.121.831.447,00	25,00	51.270.000,00	27,78	0,51	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Kepatuhan Pendataan Nilai Investasi PMDN & PMATerhadap Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	Milyar Rupiah	471,58	647.851.800,00		5.600.000,00	-	0,86	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persen	10,00	59.031.409,00		-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		RATA	A-RATA CAPAI	AN KINERJA DAN ANGO	GARAN DARI SE	ELURUH PROGRAM (%)	7,68	2,14		
				PREDIKAT	`KINERJA DAR	I SELURUH PROGRAM	(SR)	(SR)		
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baikPersentase peningkatan kompetensi aparaturPersentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitasPersentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persen	90959093	3.246.053.967,00	19,3019,30 19,3019,30	546.534.705,00	21,44	16,84	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	19,95	1.023.261.919,00	2,93	68.468.000,00	14,69	6,69	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	_	ASI KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	KINERJA DA	CAPAIAN N ANGGARAN FAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang dilestarikan	Persen	10,00	37.935.167,00	2,63	4.233.000,00	26,30	11,16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai LAKE Kabupaten/Kota	Nilai	(A) 3732	10.050.614.955,00	257,00	42.366.422,00	6,89	0,42	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase LAKE Kabupaten/Kota	Persen	89,29	38.187.959,00		-	-	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		RATA	A-RATA CAPAI	AN KINERJA DAN ANGC	GARAN DARI SE	CLURUH PROGRAM (%)	13,86	7,02	
				PREDIKAT	`KINERJA DAR	I SELURUH PROGRAM	(SR)	(SR)	
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN									
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Protein Angka Kecukupan Energi	Angka	57 2100	575.000.000,00		170.099.000,00	-	29,58	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rentan rawan pangan (jumlah)	Persen	2,00	50.000.000,00		4.271.000,00	-	8,54	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar aman	Persen	70,00	18.000.000,00		1.832.800,00	-	10,18	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025		ASI KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	KINERJA DA	CAPAIAN IN ANGGARAN TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persen	90 90 90 90	4.792.437.183,00	25 25 25 25 25	1.046.808.479,00	25,00	21,84	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	0,30	3.461.483.500,00		443.678.863,00	-	12,82	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	0,20	7.771.277.000,00		2.750.302.311,00	-	35,39	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Usaha Perikanan Darat yang Memenuhi Ketentuan	Persen	5,00	35.166.500,00		-	-	-	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase penyediaan pasar terhadap produksi hasil perikanan	Persen	90,00	680.000.000,00		2.105.000,00	-	0,31	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		RATA	A-RATA CAPAL	AN KINERJA DAN ANGC	GARAN DARI SE	ELURUH PROGRAM (%)	3,13	14,83	
				PREDIKAT	`KINERJA DAR	I SELURUH PROGRAM	(SR)	(SR)	
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN									
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	Persen	18,00	230.000.000,00		199.000.000,00	-	86,52	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025		ASI KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	Persen	11,00	80.000.000,00		10.000.000,00	-	12,50	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persen	90 90 90 90	11.923.870.407,00	12 12 12 12	1.398.917.235,00	13,33	11,73	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	Persen	16,00	58.233.198.970,00		18.195.861.060,00	-	31,25	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dipasarkan	Persen	40,00	416.999.793,00	21,00	25.331.000,00	52,50	6,07	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dan dilindungi	Persen	16,00	3.199.950,00		4.200.000,00	-	131,25	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi keratif yang berdaya saing	Persen	30,00	297.161.880,00		-	-	-	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		RATA	A-RATA CAPAL	AN KINERJA DAN ANGC	GARAN DARI SE	ELURUH PROGRAM (%)	9,40	39,90	
				PREDIKAT	`KINERJA DAR	I SELURUH PROGRAM	(SR)	(SR)	
DINAS PERTANIAN									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Persen	20 90 90 90	7.473.889.000,00	5 23 23 23	1.822.230.289,00	25,56	24,38	DINAS PERTANIAN

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	_	ASI KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Indeks Pertanaman Persentase Peningkatan Produksi Peternakan Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan & Hortikultura	Indeks Persen	200 2,0 3 2,0	650.000.000,00		1.120.375.000,00	-	172,37	DINAS PERTANIAN	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian	Persen	2,00	2.327.700.400,00		2.064.419.466,00	-	88,69	DINAS PERTANIAN	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan Yang ASUH & Peningkatan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Persen	10,00	50.000.000,00		15.683.000,00	-	31,37	DINAS PERTANIAN	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	72,00	100.000.000,00		3.474.000,00	-	3,47	DINAS PERTANIAN	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani	Persen	10,00	50.000.000,00		75.653.000,00	-	151,31	DINAS PERTANIAN	
		RATA	A-RATA CAPAL	AN KINERJA DAN ANGC	GARAN DARI SI	ELURUH PROGRAM (%)	4,26	78,60		
				PREDIKAT	`KINERJA DAR	I SELURUH PROGRAM	(SR)	(T)		
SEKRETARIAT DAERAH										
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Sengketa Tanah Garapan Yang Diselesaikan	Persen	100,00	30.000.000,00		-	-	-	SEKRETARIAT DAERAH	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Cakupan Penggunaan Tanah Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	30.000.000,00		-	-	-	SEKRETARIAT DAERAH	

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025		ASI KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Dokumentasi Kegiatan KDH / WKDH yang dilaksanakan Persentase Penataan Kelembagaan Organisasi, Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik Tatalaksanaan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Daerah	Persen	100 100 100 100 100 90	35.635.422.000,00	21 21 21 21 21 21	6.286.271.275,00	23,33	17,64	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan Kerjasama yang dirumuskan Persentase Produk Hukum Daerah yang Diharmonisasi Persentase Pelayanan Administrasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persen	95 95 90	9.240.000.000,00	4,53 4,53 4,53	5.106.351.700,00	4,77	55,26	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Penyusunan Program,Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Pengendalian Pembangunan Fisik dan Keuangan Sesuai Target Persentase Pelaksanaan	Persen	90 95 100	1.200.000.000,00	30,45 8,96 11,51	254.197.983,00	9,96	21,18	SEKRETARIAT DAERAH

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025		SI KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Monitoring Kebijakan Pengendalian Perekonomian dan Sumber Daya Alam								
		RATA	A-RATA CAPAI	AN KINERJA DAN ANGO	GARAN DARI SE	CLURUH PROGRAM (%)	7,61	18,82	
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						(SR)	(SR)	
SEKRETARIAT DPRD									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi, 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik, 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur, 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persen	95,00	29.984.234.168,00	58,10	7.962.795.485,00	61,16	26,56	SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang telaksana dengan baik	Persen	70,00	14.191.446.832,00	5,25	1.188.676.184,00	7,50	8,38	SEKRETARIAT DPRD
		RATA	A-RATA CAPAL	AN KINERJA DAN ANGO	GARAN DARI SE	CLURUH PROGRAM (%)	34,33	17.47	
				PREDIKAT	`KINERJA DAR	I SELURUH PROGRAM	(SR)	(SR)	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana pasarana kantor yang terpenuhi Persentase Laporan keuangan Bappeda dengan kualitas yang baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Persen	97 94 97 97	6.333.443.407,00	23 29 42 0	1.354.965.004,00	24,47	21,39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025		ASI KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase realisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persen	61 100	3.817.255.145,00		184.753.206,00	-	4,84	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perangkat daerah yang memiliki konsistensi perencanaan dan penganggaran Persentase perangkat daerah yang memiliki keselarasan program RPJMD dan RKPD	Persen	100 97	3.899.992.012,00		584.097.750,00	-	14,98	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	Persen	55,00	519.999.888,00	27,50	113.919.375,00	50,00	21,91	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		RAT	A-RATA CAPAL	AN KINERJA DAN ANGC	GARAN DARI SI	ELURUH PROGRAM (%)	18,62	15,78	
				PREDIKAT	`KINERJA DAR	I SELURUH PROGRAM	(SR)	(SR)	
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baikPersentase peningkatan kompetensi aparaturPersentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitasPersentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persen	10096979 4	10.226.077.000,00	25242524	2.408.054.520,00	25,53	23,55	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025		ASI KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	KINERJA DA	CAPAIAN N ANGGARAN TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen penganggaran sesuai waktu dan ketentuan Persentase OPD yang menyampaikan dokumen keuangan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Persen	100 100	137.484.103.126,00	25 25	23.123.347.262,00	25,00	16,82	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan BMD yang tertib dan akuntabel oleh Perangkat Daerah	Persen	100,00	2.509.953.250,00	25,00	1.879.979.814,00	25,00	74,90	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		RATA	A-RATA CAPAI	AN KINERJA DAN ANGO	GARAN DARI SE	ELURUH PROGRAM (%)	25,18	38,42	
				PREDIKAT	`KINERJA DAR	I SELURUH PROGRAM	(SR)	(SR)	
BADAN PENDAPATAN DAERAH									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persen	100 97 96 94	9.773.573.556,00	21 21 21 21	2.019.080.161,00	22,34	20,66	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainya Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	Persen	100 100 100	4.200.589.444,00	18 18 18	39.407.375,00	18,00	0,94	BADAN PENDAPATAN DAERAH

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RATA	A-RATA CAPAL	AN KINERJA DAN ANGO	GARAN DARI SI	ELURUH PROGRAM (%)	20,17	10,80	
				PREDIKAT	KINERJA DAR	RI SELURUH PROGRAM	(SR)	(SR)	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur	Persen	95,00	5.481.883.000,00		888.470.920,00	-	16,21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Cakupan Layanan Kepegawaian Daerah	Persen	100,00	1.314.783.000,00		139.383.400,00	-	10,60	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mendapatkan sertifikat dalam pengembangan kompetensi jabatan fungsional, kepemimpinan, manajerial dan prajabatan	Persen	100,00	218.996.000,00		8.869.600,00	-	4,05	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
		RATA	A-RATA CAPAI	AN KINERJA DAN ANGO	GARAN DARI SI	ELURUH PROGRAM (%)	_	10,29	
				PREDIKAT	KINERJA DAR	RI SELURUH PROGRAM	(SR)	(SR)	
INSPEKTORAT									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik	Persen	93 93 93 93	6.527.961.000,00	25,93 52,94 0 37,50	1.407.243.278,00	27,88	21,56	INSPEKTORAT

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025		SI KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai rata-rata maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) OPD Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD	Nilai	3,25 76,25	1.583.000.000,00		148.557.500,00	-	9,38	INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Usulan Unit Kerja Zona Integritas Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Unit Kerja Nilai	4 75	1.529.039.000,00		535.552.500,00	-	35,03	INSPEKTORAT
		RATA	-RATA CAPAL	AN KINERJA DAN ANGO	ARAN DARI SE	CLURUH PROGRAM (%)	9,29	21,99	
				PREDIKAT	KINERJA DAR	I SELURUH PROGRAM	(SR)	(SR)	
KECAMATAN PARIGI									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persen	100 100 100 100	1.386.042.149,00	16 16 16 16	221.711.780,00	16,00	16,00	KECAMATAN PARIGI
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100,00	29.961.851,00	16,00	4.780.000,00	16,00	15,95	KECAMATAN PARIGI
		RATA	-RATA CAPAL	AN KINERJA DAN ANGC	ARAN DARI SE	LURUH PROGRAM (%)	16,00	15,97	
		I SELURUH PROGRAM	(SR)	(SR)					

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
KECAMATAN CIJULANG										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persen	100 100 100 100	1.428.987.700,00	25 25 25 25 25	316.273.348,00	25,00	22,13	KECAMATAN CIJULANG	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100,00	350.000,00		-	-	-	KECAMATAN CIJULANG	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100,00	24.515.300,00		-	-	-	KECAMATAN CIJULANG	
		RATA	A-RATA CAPAL	AN KINERJA DAN ANGC	GARAN DARI SE	CLURUH PROGRAM (%)	8,33	7,38		
				PREDIKAT	KINERJA DAR	I SELURUH PROGRAM	(SR)	(SR)		
KECAMATAN PANGANDARAN										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Persen	100 100 100 100	1.230.246.000,00	25 25 25 25 25	253.335.597,00	25,00	20,59	KECAMATAN PANGANDARAN	

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	_	ASI KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100,00	350.000,00		-	-	-	KECAMATAN PANGANDARAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100,00	29.525.000,00	14,23	4.200.000,00	14,23	14,23	KECAMATAN PANGANDARAN
		RATA	A-RATA CAPAL	AN KINERJA DAN ANGC	GARAN DARI SE	ELURUH PROGRAM (%)	13,08	11,61	
				PREDIKAT	`KINERJA DAR	I SELURUH PROGRAM	(SR)	(SR)	
KECAMATAN MANGUNJAYA									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi, 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik, 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur, 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persen	100,00	1.490.628.892,00	19,76	294.590.842,00	19,76	19,76	KECAMATAN MANGUNJAYA
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	-	-		3.000.000,00	-	-	KECAMATAN MANGUNJAYA
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100,00	45.819.108,00	41,01	18.790.000,00	41,01	41,01	KECAMATAN MANGUNJAYA
		RATA	A-RATA CAPAL	AN KINERJA DAN ANGC	GARAN DARI SE	ELURUH PROGRAM (%)	20,26	20,26	
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRA							(SR)	

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	_	SI KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
KECAMATAN PADAHERANG										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Persentase Sarana Prasarana Kantor yang Terpenuhi, 2.Persentase Dokumen Penganggaran Kinerja yang disusun Tepat Waktu, 3.Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja yang disusun Tepat Waktu, 4.Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Persen	100 100	1.611.780.725,00	14,00	412.595.984,00	14,00	25,60	KECAMATAN PADAHERANG	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100,00	25.139.275,00		-	-	-	KECAMATAN PADAHERANG	
		RATA	A-RATA CAPAL	AN KINERJA DAN ANGC	GARAN DARI SE	CLURUH PROGRAM (%)	7,00	12,80		
				PREDIKAT	`KINERJA DAR	I SELURUH PROGRAM	(SR)	(SR)		
KECAMATAN CIGUGUR										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Persen	100 100 100 100	1.403.898.600,00	25 25 25 25 25	223.743.168,00	25,00	15,94	KECAMATAN CIGUGUR	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100,00	23.683.400,00	50,00	23.683.400,00	50,00	100,00	KECAMATAN CIGUGUR	

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025		ASI KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	KINERJA DA	' CAPAIAN N ANGGARAN FAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RATA	A-RATA CAPAL	AN KINERJA DAN ANGC	GARAN DARI SE	CLURUH PROGRAM (%)	37,50	57.97	
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRA				I SELURUH PROGRAM	(SR)	(R)	
KECAMATAN SIDAMULIH									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi; 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik; 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur; 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persen	100,00	1.180.816.500,00	20,95	258.061.659,00	20,95	21,85	KECAMATAN SIDAMULIH
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100,00	24.143.500,00		-	-	-	KECAMATAN SIDAMULIH
		RATA	A-RATA CAPAL	AN KINERJA DAN ANGC	GARAN DARI SE	CLURUH PROGRAM (%)	10,48	10,93	
				PREDIKAT	`KINERJA DAR	I SELURUH PROGRAM	(SR)	(SR)	
KECAMATAN LANGKAPLANCAR									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persen	100 100 100 100	1.892.023.261,00	25 25 25 25 25	248.240.680,00	25,00	13,12	KECAMATAN LANGKAPLANCAR

II-44

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025		ASI KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	KINERJA DA	CAPAIAN N ANGGARAN TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100,00	26.357.362,00	20,00	23.081.362,00	20,00	87,57	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
		RAT	A-RATA CAPAI	AN KINERJA DAN ANGO	GARAN DARI SI	ELURUH PROGRAM (%)	22,50	50,35	
				PREDIKAT	KINERJA DAR	I SELURUH PROGRAM	(SR)	(R)	
KECAMATAN KALIPUCANG									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persen	10010010 0100	1.608.833.000,00	21212121	331.098.819,00	21,00	20,58	KECAMATAN KALIPUCANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100,00	5.822.000,00		-	-	-	KECAMATAN KALIPUCANG
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100,00	8.400.000,00		-	-	-	KECAMATAN KALIPUCANG
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	Persen	100,00	3.000.000,00		-	-	-	KECAMATAN KALIPUCANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100,00	380.000,00		-	-	-	KECAMATAN KALIPUCANG

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025		ASI KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	KINERJA DA	CAPAIAN N ANGGARAN TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100,00	33.607.000,00	67,00	22.647.000,00	67,00	67,39	KECAMATAN KALIPUCANG
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)		14,67	14,66					
				PREDIKAT	`KINERJA DAR	I SELURUH PROGRAM	(SR)	(SR)	
KECAMATAN CIMERAK									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persen	100 100 100 100	994.556.700,00	27 27 27 27 27	246.050.770,00	27,00	24,74	KECAMATAN CIMERAK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100,00	23.724.300,00	-	27.224.300,00	-	114,75	KECAMATAN CIMERAK
		RATA	A-RATA CAPAL	AN KINERJA DAN ANGC	GARAN DARI SE	CLURUH PROGRAM (%)	13,50	69,75	
				PREDIKAT	`KINERJA DAR	I SELURUH PROGRAM	(SR)	(S)	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persen	100,00	2.992.535.515,00	40,00	809.649.828,00	40,00	27,06	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		T KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025		ASI KINERJA DAN N RENJA PD TAHUN 2025	KINERJA DA	T CAPAIAN AN ANGGARAN TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan	Persen	75,00	751.269.785,00	3,00	17.350.000,00	4,00	2,31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat yang memahami Politik Dalam Negeri	Persen	68,00	1.120.696.800,00		1.073.256.800,00	-	95,77	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Masyarakat yang memahami tentang pemberdayaan dan pengawasan ormas	Persen	68,00	2.500.000,00		-	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang memahami tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	84,00	151.140.000,00	21,70	5.100.000,00	25,83	3,37	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pelaksanaan koordinasi kewaspadaan daerah	Persen	85,00	1.472.338.900,00	25,00	328.453.000,00	29,41	22,31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SKPD/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	_	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025 REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025 2025		TINGKAT KINERJA DAI RENJA PD T		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RATA	A-RATA CAPAI	AN KINERJA DAN ANGO	GARAN DARI SE	16,54	25,14		
				PREDIKAT	KINERJA DAR	I SELURUH PROGRAM	(SR)	(SR)	

Sumber: Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah TW I Tahun 2025

Dilihat pada tabel diatas sampai dengan triwulan 1 tahun 2025, tingkat capaian kinerja fisik memiliki capaian yang masih rendah. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar kegiatan baru dilaksanakan pada semester 2. Sedangkan untuk penyerapan anggaran beberapa kegiatan memiliki capaian yang sangat tinggi seperi yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Hal tersebut dikarenakan pembayaran hutang kegiatan tahun 2024, dan hutang tersebut tidak dianggarkan pada Renja Perangkat Daerah tahun 2025.

Faktor pendorong pencapaian kinerja diantaranya sebagai berikut:

- 1. Adanya komitmen yang tinggi dari aparatur pelaksana kegiatan dan pemahaman terhadap tugas dan fungsinya, sehingga dapat melaksanakan kegiatan sesuai target kinerja;
- 2. Adanya perencanaan yang tepat;
- 3. Adanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur pelaksana kegiatan;
- 4. Adanya kerja sama yang baik antar stakeholder;
- 5. Ketersediaan dana tepat waktu;
- 6. Adanya sumber pendanaan lain diluar APBD

Faktor penghambat pencapaian kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Kegiatan monitoring pengendalian dan evaluasi secara internal di tiap SKPD belum terlaksana secara optimal, sehingga kualitas

- perencanaan tiap SKPD masih tergolong rendah dengan capaian kinerja 62,48 % pada tahun 2024;
- 2. Kurangnya kuantitas SDM di beberapa Perangkat Daerah. Sampai saat ini jumlah pegawai di Kabupaten Pangandaran tercatat 4.408 orang ASN dan 3.569 orang Non ASN, sedangkan kebutuhan pegawai sesuai Anjab dan ABK sebanyak 14.308 orang;
- 3. Efisiensi anggaran dan penyehatan fiskal daerah sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Dari pagu anggaran RKPD 2025 sebesar Rp. 2.126.465.652.901,00 telah dilakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran sampai dengan perubahan penjabaran 5 pada APBD menjadi Rp. 1.534.100.054.325,00.

2.2 Evaluasi Target Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Daerah

Indikator kinerja tujuan merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembangunan. Tabel berikut ini menyajikan realisasi pencapaian kinerja indikator tujuan tahun 2024.

Tabel 2.3 Evaluasi Target Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

					2024			
Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian	
Tujuan 1.1	Menguatkan Nilai-Nilai Karakter Bangsa Berbasis Nilai Luhur dan Budaya Lokal.	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	N/A	62,00	81,94	132,16 %	
Sasaran 1.1.1	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan	Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	Angka	N/A	0,2579	0,4024	156 %	
1.1.1	masyarakat secara menyeluruh	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	Persentase	N/A	85,00	90,60	106,59 %	
Sasaran 1.1.2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7374	0,7693	0,8493	110,40 %	

						2024	
	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian
Tujuan 2.1	Terwujudnya Pengelolaan Pariwisata yang Efektif dan Efisien yang Menjunjung Nilai- Nilai Kearifan Lokal	Persentase pemenuhan indikator GSTC di destinasi pariwisata	Persentase	N/A	40,00	62,00	155,00 %
Sasaran 2.1.1	Peningkatan Akses Dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	Rupiah	N/A	690.000	2.006.906	290,86 %
Tujuan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter dan	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,06	69,59- 70,06	71,03	102,07 %
3.1	Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89,78	90,06- 90,09	90,83	100,85 %
		Indeks Kesehatan	Indeks	79,08	80,51- 81,00	84,78	105,30 %
Sasaran 3.1.1	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kependidikan dan Kesehatan Secara	Indeks Pendidikan	Indeks	59,33	60,21- 60,50	61,19	101,63 %
3.1.1	Komprehensif	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	16,37	19,61	77,16	393 %
Sasaran 3.1.2	Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi	Jumlah Pemuda Berprestasi yang mendapatkan penghargaan	Jumlah	N/A	110	47	42,73 %
Sasaran 3.1.3	Melambatnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase	0,55	0,60-0,57	0,61	101,67
Sasaran 3.1.4	Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	74,57	74,59	76,53	102,60 %
		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	-0,05	5,51-5,90	5,03	91,29 %

						2024	
	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian
Tujuan 4.1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat.	Persentase Penduduk Miskin	Persentase	8,99	5,90-6,40	8,75	67,43 %
		PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)	Rupiah	4,597	5,109	4.713,9	92,27 %
Sasaran 4.1.1	Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Persentase Realisasi Nilai Investasi	Persentase	6,57	7,60	-0,17	-2,24 %
7,1,1	Ekonomi Sektor Onggulan	Rasio Kewirausahaan	Rasio	2,54	4,15	9,14	220,24 %
		Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	81,99	83,50	83,86	100,43 %
Sasaran 4.1.2	Meningkatnya Permukiman Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	Persentase	73	74	88,28	119 %
Sasaran 4.1.3	Meningkatnya Kualitas Dan Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	5,08	4,80-4,00	1,58	303,80 %
Sasaran 4.1.4	Meningkatnya Cakupan Penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	Persentase	27	57	110,38	193,65 %
Tujuan 5.1	Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah yang Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Prima.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	В	BB (69-73)	BB (73,72)	106,84 %
0	Meningkatkan Kualitas Dan	Nilai SAKIP	Nilai	В	BB (72,25- 76,00)	(B) 67,98	94,09 %
Sasaran Kapasitas Tata Kelola 5.1.1 Pemerintahan Yang Baik (Good	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	3	100,00 %	
	Governance)	Indeks SPBE	Indeks	3,02	3,10	3,56	114,84 %

						2024	
	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	81,51	73	57,66	78,99 %
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	38,92	49,42	79,65	161,17 %
Sasaran 5.1.2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Cepat Dan Responsif	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	N/A	2,86-2,95	4,44	150,51 %
Tujuan 6.1	Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang tangguh bencana	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	77,16	79,05	85,70	108 %
Sasaran	Meningkatnya kualitas	Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks	1,635	1,808	1,731	95,74 %
6.1.1	infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	Persentase cakupan layanan infrastruktur	Persentase	37,64	48,28	71,27	148 %
Sasaran	Meningkatkan kemampuan	Indeks Risiko Bencana	Indeks	145	139	147,85	94,01 %
6.1.2	mitigasi bencana daerah	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	145,45	139,2	133,13	96 %
Sasaran 6.1.3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	65,22	65,98	58,99	89,41 %
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	77,79	79,50	93,18	117,21 %
		Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	51,67	51,85	34,00	65,57 %
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Poin	65,25	65,25	38,67	59,26 %

Sumber: Evaluasi RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

2.3 Ringkasan Hasil Evalusi

Melihat dari hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya pada lampiran, capaian kinerja seluruh urusan masih memiliki predikat rendah. Hal tersebut dikarenakan realokasi dan efisiensi anggaran program kegiatan yang difokuskan untuk mendukung penyehatan fiscal dan kondisi keuangan daerah Kabupaten Pangandaran. Rendahnya capaian kinerja RKPD juga berimplikasi terhadap kinerja RPJMD 2021-2026. Beberapa tujuan dan sasaran pembangunan daerah tidak dapat tercapai, tersaji pada table 2.3. Maka daripada itu untuk mendorong capaian RPJMD, perencanaan dan penganggaran tahun 2025 lebih difokuskan terhadap capaian visi, misi, sasaran permbangunan daerah sesuai dengan RPJMD terutama untuk yang masih jauh dari target tahun 2025 dan 2026.

Rata-rata capaian anggaran dari seluruh program merupakan ratarata realisasi anggaran seluruh program yang ada dalam RKPD. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran RKPD dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam RPJMD.

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program merupakan rata-rata kinerja seluruh program yang ada dalam RKPD. Berdasarkan data pada Tabel 2.2 Evaluasi Hasil Terhadap RKPD Kabupaten Pangandaran Triwulan I Tahun 2025, capaian rata-rata RKPD Kabupaten Pangandaran pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 15,10% untuk kinerja fisik dan 27,79% untuk keuangan. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RKPD dimaksud adalah:

Tabel 2.4 Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program RKPD Triwulan I Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

	Urusan Pemerintah Daerah dan	Tingkat Capaian RKPD TW I Tahun 2025							
No	SKPD	Kinerja Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan				
A	URUSAN WAJIB								
1	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	11,62	Sangat Rendah	33,20	Sangat Rendah				
1.01	Pendidikan	15,19	Sangat Rendah	14,92	Sangat Rendah				
1.02	Kesehatan	1,59	Sangat Rendah	2,61	Sangat Rendah				
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,87	Sangat Rendah	128,58	Sangat Tinggi				
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	Sangat Rendah	21,13	Sangat Rendah				
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	26,41	Sangat Rendah	15,25	Sangat Rendah				
1.06	Sosial	24,63	Sangat Rendah	16,72	Sangat Rendah				

	Urusan Pemerintah Daerah dan	Ti	ingkat Capaian RK	PD TW I Tah	un 2025
No	SKPD	Kinerja Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	18,38	Sangat Rendah	15,38	Sangat Rendah
2.07	Tenaga Kerja	17,00	Sangat Rendah	13,03	Sangat Rendah
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7,89	Sangat Rendah	10,91	Sangat Rendah
2.09	Pangan	6,25	Sangat Rendah	17,54	Sangat Rendah
2.10	Pertanahan	7,61	Sangat Rendah	18,82	Sangat Rendah
2.11	Lingkungan Hidup	10,05	Sangat Rendah	2,81	Sangat Rendah
2.12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	12,50	Sangat Rendah	17,52	Sangat Rendah
2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	24,04	Sangat Rendah	5,19	Sangat Rendah
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	Sangat Rendah	6,99	Sangat Rendah
2.15	Perhubungan	25,00	Sangat Rendah	10,77	Sangat Rendah
2.16	Komunikasi dan Informatika	55,04	Rendah	17,49	Sangat Rendah
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	28,17	Sangat Rendah	15,28	Sangat Rendah
2.18	Penanaman Modal	7,68	Sangat Rendah	2,14	Sangat Rendah
2.19	Kepemudaan dan Olahraga	8,33	Sangat Rendah	0,11	Sangat Rendah
2.20	Statistik	64,03	Rendah	36,59	Sangat Rendah
2.21	Persandian	28,57	Sangat Rendah	52,90	Rendah
2.22	Kebudayaan	4,44	Sangat Rendah	36,92	Sangat Rendah
2.23	Perpustakaan	20,81	Sangat Rendah	11,56	Sangat Rendah
2.24	Kearsipan	3,44	Sangat Rendah	0,21	Sangat Rendah
3	URUSAN PILIHAN	11,04	Sangat Rendah	30,40	Sangat Rendah
3.25	Kelautan dan Perikanan	-	Sangat Rendah	12,13	Sangat Rendah
3.26	Pariwisata	13,13	Sangat Rendah	42,14	Sangat Rendah
3.27	Pertanian	4,26	Sangat Rendah	78,60	Tinggi
3.28	Kehutanan				
3.29	Energi dan Sumberdaya Mineral				
3.30	Perdagangan	35,31	Sangat Rendah	15,03	Sangat Rendah
3.31	Perindustrian	2,51	Sangat Rendah	4,08	Sangat Rendah
3.32	Transmigrasi				
4	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	20,97	Sangat Rendah	18,14	Sangat Rendah
4.01	Sekretariat Daerah	7,61	Sangat Rendah	18,82	Sangat Rendah
4.02	Sekretariat DPRD	34,33	Sangat Rendah	17,47	Sangat Rendah
5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	16,67	Sangat Rendah	18,30	Sangat Rendah
5.01	Perencanaan	8,16	Sangat Rendah	13,74	Sangat Rendah
5.02	Keuangan	25,18	Sangat Rendah	38,42	Sangat Rendah
5.03	Kepegawaian	_	Sangat Rendah	13,40	Sangat Rendah
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	_	Sangat Rendah	4,05	Sangat Rendah
5.05	Penelitian dan Pengembangan	50,00	Sangat Rendah	21,91	Sangat Rendah
5.06	Penghubung				
5.07	Pengelolaan Perbatasan Daerah				
6	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	9,29	Sangat Rendah	21,99	Sangat Rendah
6.01	Inspektorat	9,29	Sangat Rendah	21,99	Sangat Rendah
7	PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN	16,33	Sangat Rendah	27,17	Rendah

	Urusan Pemerintah Daerah dan	ngkat Capaian RK	at Capaian RKPD TW I Tahun 2025			
No	SKPD	Kinerja Fisik (%)	Predikat Kisik		Predikat Keuangan	
7.01	Kecamatan	16,33	Sangat Rendah	27,17	Sangat Rendah	
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16,54	Sangat Rendah	25,14	Rendah	
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	16,54	Sangat Rendah	25,14	Sangat Rendah	
	TOTAL	15,10	Sangat Rendah	27,79	Sangat Rendah	

Sumber: Evaluasi RKPD TW I Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

Dilihat pada tabel diatas, rata-rata tingkat capaian kinerja dan keuangan seluruh urusan memiliki predikat sangat rendah.

Menindak lanjuti hasil evaluasi tersebut, maka perlu diambil beberapa kebijakan sebagai berikut:

- 1. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 disesuaikan dengan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029;
- Rasionalisasi target kinerja dan anggaran pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
- 3. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- 4. SKPD agar mengoptimalkan pemanfaatan output subkegiatan / kegiatan dan melakukan evaluasi dampak (outcome) dari kegiatan / subkegiatan yang telah dilaksanakan.

2.3.1 Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Adapun dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2024 beserta realisasi capaian SPM serta program yang mendukung pencapaian SPM disajikan pada tabel 2.5.

Tabel 2.5 Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian SPM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2024

	s	SPM		ТРВ		Capaian		
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target	Target Capaian SPM	SPM Tahun 2024	SKPD	Program
l. s i	PM PENDIDIKAN							
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak Perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, Pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar	100%	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi	4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar	4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak Perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan	100%	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan

	\$	SPM	ТРВ		Target	Capaian		
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target	Capaian SPM	SPM Tahun 2024	SKPD	Program
3.	Pendidikan Kesetaraan	dalam Pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan	Sepanjang Hayat untuk Semua 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak Perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang	100%	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan
		kesataraan		relevan dan efektif.				

	s	SPM		ТРВ	Target	Capaian		
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target	Capaian SPM	SPM Tahun 2024	SKPD	Program
2. SI	PM KESEHATAN							
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun	1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki- laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat,	100%	92,19%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	termasuk keuangan mikro 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	100%	96,13%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

	SPM		ТРВ		Target	Capaian		
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target	Capaian SPM	SPM Tahun 2024	SKPD	Program
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	100%	95,68%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	100%	85,95%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

	S	ВРМ		ТРВ	Target	Capaian		
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target	Capaian SPM	SPM Tahun 2024	SKPD	Program
5.	Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan	100%	92,83%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	terjangkau bagi semua orang. 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik,	100%	70,87%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

II-60

	s	РМ		ТРВ		Capaian		Program
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target	Capaian SPM	SPM Tahun 2024	SKPD	
				dan akses terhadap obat obatan dan vaksin dasar				
				yang				
				aman, efektif, berkualitas,				
				dan				
				terjangkau bagi semua orang.				
7.	Pelayanan	Jumlah warga	3. Menjamin	3.8. Mencapai cakupan	100%	100%	Dinas	Program
	kesehatan pada	negara usia	Kehidupan yang Sehat	kesehatan			Kesehatan	Pemenuhan
	usia lanjut	lanjut yang	dan Meningkatkan	universal, termasuk				Upaya Kesehatan
		mendapatkan	Kesejahteraan Seluruh	perlindungan risiko				Perorangan Dan
		layanan	Penduduk Semua Usia	keuangan, akses				Upaya Kesehatan
		kesehatan		terhadap pelayanan				Masyarakat
				kesehatan dasar yang baik,				
				dan akses terhadap				
				obat obatan dan vaksin dasar				
				yang				
				aman, efektif, berkualitas,				
				dan				
				terjangkau bagi semua orang.				

	s	РМ	ТРВ		Target	Capaian		
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target	Capaian SPM	SPM Tahun 2024	SKPD	Program
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	100%	96,97%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan	100%	97,40%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

	s	РМ	ТРВ		Target	Capaian		
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target	Capaian SPM	SPM Tahun 2024	SKPD	Program
				kesehatan mental dan kesejahteraan				
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	100%	93,81%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan	100%	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

	s	РМ		ТРВ	Target	Capaian		Program
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target	Capaian SPM	SPM Tahun 2024	SKPD	
				dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan				
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan,			Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	(human immunodeficien cy virus)	(Human Immunodeficienc y Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan		serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan				

	SPM		ТРВ		Target	Capaian					
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target	Capaian SPM	SPM Tahun 2024	SKPD	Program			
3. SI	SPM PEKERJAAN UMUM										
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua	6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua	6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah			

	S	РМ	ТРВ		Target	Capaian		
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target	Capaian SPM	SPM Tahun 2024	SKPD	Program
4. SI	PM PERUMAHAN F	RAKYAT						
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.5. Pada tahun 2030, membangun Ketahanan Masyarakat miskin dan mereka yang Berada dalam Kondisi rentan, dan Mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan
2.	Fasilitasi penyedian rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	100%	100%		

	s	РМ	ТРВ		Target	SPIM		
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target	Capaian SPM	Tahun 2024	SKPD	Program
5. SI	Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni						
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.3. Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2.	Pelayanan	Jumlah Warga	13. Mengambil	13.3. Meningkatkan	100%	100%	Badan	Program

	s	РМ		ТРВ	Target	Capaian	SKPD	
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target	Capaian SPM Tahun 2024	Tahun		Program
	informasi rawan bencana	Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan ikim.			Penanggulang an Bencana Daerah	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	100%	100%	Badan Penanggulang an Bencana Daerah	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	100%	100%	Badan Penanggulang an Bencana Daerah	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

	\$	SPM		ТРВ	Target Capaian SPM	Capaian		
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target		SPM Tahun 2024	SKPD Program	Program
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	korban bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan	13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	100%	38,24%	Badan Penanggulang an Bencana Daerah	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan
6. SI	PM SOSIAL	dan Evakuasi korban kebakaran						Penyelamatan Non Kebakaran
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	100%	100%	Dinas Sosial, Pemberdayan Masyarakat dan Desa	Program Rehabilitasi Sosial
2.	Rehabilitasi	Jumlah anak	1. Mengakhiri	1.3. Menerapkan secara	100%	100%	Dinas Sosial,	Program

	s	ВРМ		ТРВ	Target	Capaian	_	
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target	Capaian SPM	SPM Tahun 2024	SKPD	Program
	sosial dasar anak terlantar di luar panti	telantar yang memperoleh rehabilitasi	kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.			Pemberdayan Masyarakat dan Desa	Rehabilitasi Sosial
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	100%	100%	Dinas Sosial, Pemberdayan Masyarakat dan Desa	Program Rehabilitasi Sosial
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030	100%	100%	Dinas Sosial, Pemberdayan Masyarakat dan Desa	Program Rehabilitasi Sosial

	S	РМ		ТРВ	Target Capaian SPM Tahun 2024	Capaian	SKPD	Program
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target		Tahun		
	dan pengemis di luar panti	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti		mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.				
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	100%	100%	Dinas Sosial, Pemberdayan Masyarakat dan Desa	Program Penanganan Bencana

Sumber : Diolah Penyusun, 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar capain SPM telah mencapai target, namun masih terdapat beberapa jenis pelayanan yang capaiannya dibawah target, adapun capaian SPM yang masih dibawah target adalah pada jenis pelayanan bidang kesehatan dan bidang tantribumlinmas.

SPM bidang kesehatan pencapaian jenis pelayanan dasarnya masih banyak yang dibawah 100%, permasalahannya pemenuhan anggaran yang masih mengandalkan DAK Non Fisik. Dan Untuk beberapa indikator adanya kesulitan untuk mengerahkan pengumpulan sasaran, terbatasnya SDM untuk pemenuhan SPM khususnya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif.

Untuk SPM bidang tantribumlinmas jenis pelayanan dasar yang masih dibawah 100% adalah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Permasalahannya adalah keterbatasan anggaran daerah dan kurangnya fasilitas atau peralatan yang memadai.

Untuk tujuan dan target SDG's yang tidak terkait dengan area SPM tidak diuraikan lebih lanjut dalam dokumen ini, karena tidak ada perubahan target.

2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah

Penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan menjadi pemicu permasalahan pembangunan daerah. Selain itu kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat juga dapat berpengaruh pada munculnya pembangunan daerah. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory.

Kemudian, permasalahan tersebut dapat dipetakan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1.	Capaian IPM Kabupaten Pangandaran	1. Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten	1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas layanan
	masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa	Pangandaran masih pada lulusan SMP	pendidikan
	Barat dan Nasional	(Sekolah Menengah Pertama) khususnya	2. Tingginya angka kemiskinan
		masih di kelas 8	3. Minimnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan
			4. Belum optimalnya pendidikan kesetaraan
		2. Belum optimalnya kualitas dan	1. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan
		aksesibilitas pelayanan kesehatan	Teknologi Sistem Informasi Kesehatan
			2. Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan
			sarana dan prasarana kesehatan seperti Puskesmas,
			Puskesmas Pembantu dan Kendaraan Operasional
			3. Belum optimalnya pelayanan secara preventif dan
			promotive kepada masyarakat
			4. Kurangnya tenaga dokter untuk mengakomodasi, dimana
			rasio dokter Kab. Pangandaran 19 per 100.000 penduduk
			sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis
			adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per
			100.000 penduduk
		3. Rendahnya daya beli masyarakat	1. Masih tingginya angka kemiskinan
			2. Masih adanya balita yang bergizi buruk
			3. Pendapatan masyarakat yang tidak meningkat cukup baik
2.	Masih rendahnya pertumbuhan PDRB	Sepanjang tahun 2024, pertumbuhan	1. Masih rendahnya produktivitas pendapatan masyarakat
		ekonomi Pangandaran diperkirakan	2. Rendahnya Pendapatan masyarakat,
		mencapai 5,07 persen, yang tetap	menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, sehingga
		menunjukkan tren positif meskipun	keinginan untuk melakukan konsumsi menurun
		sedikit melambat dibandingkan	3. Rendahnya permintaan barang dan jasa dari kabupaten
		pertumbuhan tahun sebelumnya yang	Pangandaran
		mencapai 5,14 persen.	4. UMKM masih memiliki permasalahan pada permodalan dan
			pemasaran
			5. Kabupaten pangandaran belum memiliki rumah

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		Kontribusi sektor pertanian sebagai sektor yang menyumbang kontribusi tertinggi terhadap PDRB trend pertumbuhannya cenderung menurun yakni sebesar 26,73 pada tahun 2021 menjadi sebesar 25,60 pada tahun 2024	kemasan (sentra UMKM) 6. Penurunan produksi ikan tangkap disebabkan oleh terjadinya abrasi pantai 1. Belum optimalnya PDRB pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan 2. Belum optimalnya subsektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,13 persen pada tahun 2024, menurun 0,04 persen. 3. Sulitnya sektor pertanian akses kredit ke perbankan, juga akses ke pasar, dan beberapa masalah internal di sektor pertanian itu sendiri seperti rendahnya kualitas SDM dan teknologi 4. Kurangnya minat pemuda untuk menjadi petani sebagai profesi dan mata pencaharian sehari-hari 5.Berkurangnya lahan persawahan yang diakibatkan adanya pembangunan infrastruktur dan
3.	Belum optimalnya Pariwisata Kabupaten Pangandaran yang memberikan nilai tambah ekonomi masyarakat	Komposisi PDRB untuk sektor penyedia akomodasi dan makan minum belum menyumbang kontribusi tinggi padahal sektor ini yang di dalamnya ada kegiatan pariwisata merupakan sektor unggulan Kabupaten Pangandaran 1. Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata dan produk pariwisata	permukiman yang tidak terkendali 1. Belum optimalnya promosi sektor pendukung pariwisata 2. Belum optimalnya pengembangan potensi wisata 3. Belum optimalnya infrastruktur pendukung perekonomian seperti jalan usaha tani, dan infrastruktur menuju destinasi wisata 4. Belum optimalnya aksesibilitas menuju Pangandaran 1. Pengelolaan dan kualitas layanan pariwisata belum optimal 2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pariwisata 3. Kurangnya keterampilan dan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			4. Belum terpenuhinya indicator standar pengembangan
			pariwisata yang bekelanjutan
			5. Perubahan motivasi wisatawan terhadap pariwisata massal
			menjadi pariwisata Minat khusus (segmentasi destinasi wisata,
			desa wisata)
			6. Kemudahan akses menuju wisata yang belum terintegrasi
		2. Belum optimalnya promosi pariwisata	1. Belum masifnya promosi pariwisata melalui media di
			level nasional dan internasional
			2. Belum optimalnya kerjasama promosi pariwisata
		3. Belum optimalnya daya tarik wisata	1. Belum diterapkannya kebudayaan lokal sebagai
			identitas daerah untuk pemnfaatan pada sector Pariwisata
			2. Belum adanya Atraksi/event wisata yang menjadi ciri
			khas
			3. Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah
			kabupaten, desa, dan kelompok penggerak pariwisata
			dalam membangun daya tarik wisata
4.	Belum optimalnya ketahanan pangan	1. Terjadinya fluktuasi harga pangan	1. Stabilisasi dan Keterjangkauan Harga Pangan, sebagian
	daerah	utama pada tahun 2024 tercatat sebesar	komoditas sering mengalami fluktuasi harga
		5,93%, lebih tinggi dibandingkan inflasi	2. Masih Kurangnya Ketersediaan Pasokan Beras,
		tahun 2023 yang mencapai 1,81%.	sebagian kecil gabah masih dipasok dari luar
			Pangandaran
			3. Kurang optimalnya pengelolaan Pasar Rakyat oleh
			Pemda dikarenakan belum tercukupinya kapasitas dan
			kuantitas sumber daya manusia yang memadai
		2. Belum tercapainya ketahanan pangan	1. Masih rendahnya kualitas hasil pangan daerah
		dan gizi yang baik	2. Belum optimalnya diversifikasi olahan pangan local
			3. Masih rendahnya wawasan pelaku usaha pangan
			dalam menghasilkan produk B2SA

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
5.	Masih tingginya angka kemiskinan Kabupaten Pangandaran	Belum optimalnya infrastruktur pelayanan dasar	1. Terbatasnya pelayanan air baku Masyarakat 2. Masih rendahnya akses air minum Perpipaan (2023: Akses Air minum layak 86,47%; Akses Air minum perpipaan 13%; Akses Air minum aman 0%) 3. Belum meratanya pelayanan sanitasi (2023: Akses Sanitasi Layak 70.82%; Akses Sanitasi aman 0%; Belum memiliki IPAL) 4. Masih adanya rumah tidak layak huni
		Belum meratanya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Masih terdapat kawasan permukiman kumuh Cakupan dan Kualitas Layanan Pendidikan masih rendah
			2. Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas 3. Cakupan dan Kualitas Layanan Kesehatan masih rendah (Rumah sakit hanya tersedia 1; Rasio puskesmas persatuan penduduk 1: 29.480, Ideal 1: 16.000; Rasio dokter 19:100.000, ideal 96:100.000) 4. Masih adanya kasus stunting
		3. Belum optimalnya aktivitas perekonomian masyarakat	1. Belum optimalnya sub sektor unggulan masuarakat pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan 2. Belum optimalnya subsektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,13 persen pada tahun 2024, menurun 0,04 persen 3. Belum optimalnya daya saing produk, kelembagaan, dan pemberdayaan UMKM 4. Rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan 5. Belum optimalnya peningkatan penggunaan produk
		4. Belum optimalnya perlindungan sosial, akurasi bantuan sosial, jaminan sosial,	dalam negeri (P3DN) dan implementasi TKDN dalam pembangunan daerah 1. Data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang ada di

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		serta pemberdayaan masyarakat.	luar panti belum terdata secara maksimal, sehingga penentuan target capaian kurang akurat 2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi dan penanggulangan Bencana
6.	Belum optimalnya aksesibilitas wilayah	Masih kurangnya konektivitas transportasi dan logistik	1. Belum adanya integrasi antar moda (Terminal, Bandara, Pelabuhan, Kereta Api) 2. Kinerja system logistic masih belum optimal 3. Terdapat pusat kegiatan yang belum terhubung dengan pusat kegiatan lainnya 4. Belum optimalnya sarana prasarana transportasi 5. Jalur alternatif dari dan menuju Pangandaran belum memadai 6. Terbatasnya jaringan infrastruktur jalan menghambat akses menuju kawasan perkantoran dan menurunkan efisiensi pelayanan pemerintahan
7.	Tingkat pengangguran yang belum signifikan menurun	Masih minimnya produktivitas, kualitas dan penyerapan angkatan kerja	 Masih minimnya ketersediaan lapangan kerja Rendahnya kompetensi tenaga kerja Belum tersedianya data ketenagakerjaan yang valid
8.	Menurunnya realisasi investasi daerah		1. Tidak adanya regulasi Pemberian Fasilitas / Insentif yang dapat memberikan kemudahan dan menarik para investor untuk berinvestasi di daerah 2. Belum adanya peta potensi yang dapat membantu investor untuk menentukan lokasi dan sektor usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka 3. Kurangnya parsitipasi promosi di berbagai event daerah maupun nasional 4. Keterbatasan SDM yang memadai 5. Kurangnya sosialiasi dalam berbagai platform digital
9.	Kondisi fiskal daerah yang tidak sehat	1. Terdapat hutang daerah	Lemahnya sistem pengendalian intern Terdapat kegiatan yang bersumber dari APBD belum

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			dibayarkan sehingga menimbulkan hutang
		2. Pengelolaan keuangan daerah yang	1. Lemahnya sistem pengendalian intern
		belum optimal	2. Kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan
			pengungkapan
		3. Belum optimalnya pengelolaan potensi	1. Belum optimalnya kemampuan intensifikasi dan
		PAD	ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
			2. Beberapa jenis retribusi belum terbentuk perdanya,
			3. Belum adanya pelayanan pajak dan retribusi berbasis
			elektronik
			4. Belum optimalnya kemampuan aparatur pelayanan pajak
			dan retribusi daerah
			pelayanan pajak dan retribusi daerah
10.	Belum optimalnya lingkungan hidup	Capaian Indeks Kualitas air, udara, dan	1. Masih adanya perusakan kawasan lindung
	yang berkelanjutan	tutupan lahan yang belum baik	2. Belum optimalnya pengawasan dan penegakkan
			hukum lingkungan terhadap kegiatan/usaha
			3. Belum optimalnya pengelolaan sampah
			4. Masih terjadinya pencemaran air
11.	Belum optimalnya tata kelola	1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja	1. Masih rendahnya capaian pada komponen
	pemerintahan yang baik	pemerintah	pengukuran dan pelaporan kinerja
			2. Penggunaan ukuran kinerja/indikator kinerja belum
			sepenuhnya mencerminkan tujuan yang hendak
			dicapai
		2. Masih kurangnya pemahaman terkait	Kurangnya sosialisasi penerapan reformasi birokrasi
		reformasi birokrasi	2. Kurangnya komitmen seluruh perangkat daerah
		2. Implementasi penyelenggaraan	Sarana dan prasarana SPBE belum memadai
		pemerintahan berbasis digital (SPBE dan	2. Belum menjadi skala prioritas utama pemerintah
		SDI) belum optimal	daerah
			3. Kualitas dan Kuantitas SDM masih kurang
			4. Koordinasi dan kerjasama antar intansi yang masih

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			lemah dalam penerapan SPBE
			5. Kebijakan Standar aplikasi tidak seragam
		3. Belum terwujudnya ASN berbasis sistem	1. Belum optimalnya integrasi data kepegawaian dalam
		merit	mendukung sistem merit
			2. Belum optimalnya pemetaan kompetensi sebagai
			dasar talentpool
			3. Sistem informasi pendukung sistem merit belum
			optimal
			4. Belum optimalnya penggajian, pemberian
			penghargaan dan disiplin (reward & punishment)
			5. Masih rendahnya pelaksanaan peningkatan
			kompetensi melalui coaching dan mentoring
		4. Belum terintegrasinya sinergitas dan	1. Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antar
		konsistensi perencanaan, penganggaran,	pusat dan daerah
		akuntabilitas kinerja, pengendalian dan	2. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi intansi
		evaluasi	pelaksana atas perencanaan pembangunan
			3. Masih sering terjadi ego sektoral dalam proses
			perencanaan

Sumber: Olahan Penulis, 2025



BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 disusun sebagai respon terhadap dinamika pembangunan daerah serta merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap indikatorindikator makro maupun sektoral sebagai dasar dalam merumuskan kembali prioritas dan arah kebijakan pembangunan. Penyesuaian ini juga mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik pada tataran global, nasional, maupun regional.

Dalam rangka menjamin keberlanjutan fiskal dan efektivitas pembiayaan pembangunan, estimasi kapasitas keuangan daerah disusun dengan mengacu pada realisasi anggaran tahun sebelumnya serta perkembangan fiskal tahun berjalan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyeksi pendanaan pembangunan sesuai dengan kemampuan fiskal riil yang tersedia, sehingga perencanaan anggaran dapat disusun secara realistis dan akuntabel.

Kerangka ekonomi daerah dan proyeksi indikator ekonomi makro menjadi pijakan dalam penentuan arah kebijakan fiskal, yang mencakup strategi alokasi anggaran secara optimal, efektif, dan efisien. Bab ini memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah sebagai bagian integral dalam proses perencanaan. Arah kebijakan ekonomi daerah memuat analisis terhadap kondisi ekonomi makro daerah, identifikasi permasalahan dan tantangan pembangunan ekonomi, serta proyeksi dan prospek pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, arah kebijakan keuangan daerah meliputi strategi pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan pembangunan ekonomi daerah Tahun 2025 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing, dengan memperkuat sektor-sektor unggulan daerah, mengakselerasi pengembangan ekonomi lokal, serta mendorong transformasi struktur ekonomi. Optimalisasi potensi ekonomi wilayah pesisir, pertanian terpadu, pariwisata berkelanjutan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi fokus utama dalam kerangka pencapaian pertumbuhan ekonomi yang merata antarwilayah dan antarkelompok masyarakat.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran akan memperkuat iklim investasi dan dunia usaha melalui penyederhanaan regulasi, penyediaan infrastruktur pendukung, dan penguatan kapasitas pelaku usaha lokal. Di samping itu, sinergi kebijakan fiskal dan non-fiskal akan ditingkatkan guna menciptakan stabilitas ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi tekanan eksternal.

Seluruh strategi dan arah kebijakan ekonomi yang dirumuskan berbasis data dan analisis yang komprehensif, serta mendukung integrasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam rangka meningkatkan efektivitas intervensi pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian, diharapkan arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2025 mampu menjawab tantangan pembangunan aktual, mengantisipasi dinamika eksternal, dan mendorong pencapaian target pembangunan jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025–2029.

3.1.1 Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran selama periode 2019–2023 menunjukkan adanya tren pemulihan yang cukup signifikan pasca-pandemi, meskipun masih terdapat tantangan struktural yang perlu diatasi, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka. Untuk itu, kebijakan ekonomi daerah ke depan tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka pertumbuhan semata, tetapi

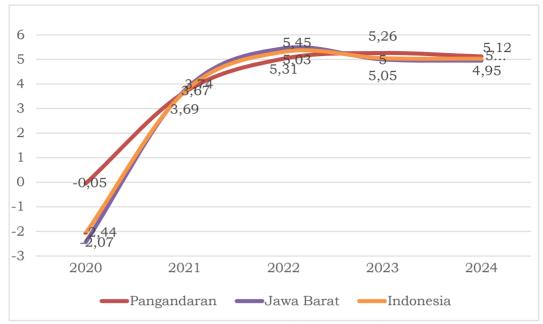
juga diarahkan pada peningkatan kualitas pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan, serta berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Memasuki Tahun 2025, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pangandaran perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih strategis dan integratif, yang mencakup diversifikasi basis ekonomi lokal, penguatan daya saing sektor-sektor unggulan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan ekonomi lokal juga menjadi fokus, khususnya dalam mendukung transformasi digital UMKM, penguatan sistem informasi pasar, dan peningkatan efisiensi rantai pasok daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi aktual dan proyeksi ekonomi ke depan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran akan terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, meningkatkan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat, serta menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta dan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif. berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal. Di samping itu, respons kebijakan terhadap isu-isu strategis seperti ketahanan pangan, perubahan iklim, serta fluktuasi harga komoditas utama, perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi jangka panjang serta memperkuat fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Pangandaran pada tahun 2024 tercatat mengalami perlambatan dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Penurunan laju pertumbuhan ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap aktivitas ekonomi daerah, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor eksternal maupun internal, seperti penyesuaian fiskal, fluktuasi harga komoditas, dinamika pasar tenaga kerja, maupun dampak lanjutan dari kondisi ekonomi global dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran 2020-2024 dapat dilihat dalam Grafik berikut:

Gambar 3. 1 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Barat dan Pangandaran Tahun 2020-2024 (%)

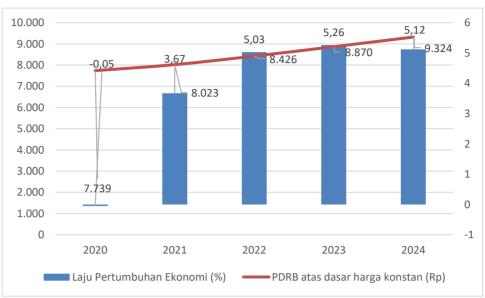


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024, Diolah

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa laiu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran pada periode 2020-2024 mengalami pemulihan yang cukup signifikan pasca pandemi dengan kinerja yang relatif lebih stabil. Setelah mengalami kontraksi sebesar -0,05% pada tahun 2020, pertumbuhan Pangandaran terus meningkat hingga mencapai puncaknya sebesar 5,45% pada tahun 2022. Meskipun mengalami sedikit perlambatan pada tahun 2023 dan 2024, yaitu masing-masing sebesar 5,26% dan 5,12%, capaian ini tetap mencerminkan resiliensi ekonomi daerah. Tren tersebut mengindikasikan bahwa strategi pembangunan ekonomi daerah yang diarahkan pada sektor-sektor unggulan memberikan dampak positif, meskipun diperlukan penguatan kebijakan untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan pada tahuntahun mendatang.

Meskipun LPE mengalami fluktuasi, PDRB menunjukkan tren meningkat secara konsisten setiap tahunnya dari Rp8.023 miliar menjadi Rp9.324 miliar Data ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat dinamika dalam laju pertumbuhan, struktur ekonomi Kabupaten Pangandaran tetap mengalami ekspansi, mengindikasikan ketahanan ekonomi daerah yang membaik dari waktu ke waktu.

Gambar 3. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangandaran (%) 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024, Diolah

Kontribusi berbagai sektor ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi yang tercipta dari nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor mencerminkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap kapasitas produksi di masing-masing sektor usaha.

Tabel 3. 1 PDRB ADHB Lapangan Usaha Kabupaten Pangandaran
Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.143,79	3.241,83	3.485,23	3.631,92	3.961,05
В	Pertambangan dan Penggalian	64,07	72,32	75,09	77,82	80,12
С	Industri Pengolahan	549,52	592,38	663,41	710,43	752,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,16	9,03	9,70	9,97	10,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,84	2,07	2,13	2,14	2,38
F	Konstruksi	928,67	1.023,09	1.019,50	1.101,06	1.197,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	2.243,97	2.368,36	2.605,46	2.792,70	2.998,39

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Mobil dan Sepeda Motor					
Н	Transportasi dan Pergudangan	1.330,79	1.403,19	1.574,37	1.934,53	2.149,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.091,41	1.162,85	1.325,48	1.449,88	1.568,18
J	Informasi dan Komunikasi	229,65	242,55	249,04	261,21	277,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	214,09	237,91	267,33	276,11	289,39
L	Real Estate	328,40	361,77	395,47	412,92	433,64
M,N	Jasa Perusahaan	112,47	122,79	137,30	143,86	154,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	318,26	312,33	311,59	320,93	348,69
P	Jasa Pendidikan	728,21	767,95	793,54	848,57	948,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	25,14	27,49	29,77	31,34	34,28
R,S,T,U	Jasa lainnya	179,78	181,78	219,30	251,03	268,21
	DOMESTIK AL BRUTO	11.498,23	12.129,69	13.163,70	14.256,42	15.474,58

Sumber: BPS, Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2024

Tabel 3. 2 PDRB ADHK Lapangan Usaha Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2023 (Miliar Rupiah)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.855,81	1.898,15	1.963,55	1.990,67	2.057,75
В	Pertambangan dan Penggalian	48,29	52,63	53,10	53,66	54,19
С	Industri Paengolahan	382,61	403,46	437,93	455,66	467,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,54	6,09	6,51	6,60	6,74
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,12	1,24	1,28	1,27	1,37
F	Konstruksi	688,58	729,18	712,27	754,86	815,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	1.698,73	1.759,30	1.861,28	1.944,78	2.013,47

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Mobil dan Sepeda Motor					
Н	Transportasi dan Pergudangan	843,37	871,80	938,53	1.091,57	1.203,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	689,69	711,21	785,69	834,47	882,28
J	Informasi dan Komunikasi	222,49	238,55	248,14	260,14	276,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	152,08	161,19	168,19	170,67	172,98
L	Real Estate	260,40	286,18	308,27	318,27	33,33
M,N	Jasa Perusahaan	71,70	77,82	85,14	86,84	89,40
О	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	231,60	224,90	224,97	229,31	244,77
P	Jasa Pendidikan	426,00	437,07	446,80	468,28	495,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18,52	19,86	21,14	22,06	23,50
R,S,T,U	Jasa lainnya	142,43	144,15	163,61	180,74	186,39
	DOMESTIK AL BRUTO	7.738,97	8.022,78	8.426,40	8.869,86	9.324,31

Sumber: BPS, Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,12%, hal ini ditopang oleh peningkatan aktivitas di sektor-sektor produktif, khususnya pariwisata yang menjadi sektor unggulan daerah. Dalam lima tahun terakhir (2020-2024), struktur perekonomian Pangandaran masih didominasi oleh lima sektor utama, yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Kendaraan Bermotor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta Konstruksi. Di antara sektor-sektor tersebut, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan dan pengembangan destinasi pariwisata. Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran terus mendorong pembangunan infrastruktur pariwisata dan mengakselerasi rencana pengembangan kawasan Pantai Pangandaran sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing ekonomi daerah di tingkat nasional maupun global.

Tabel 3. 3 Perkembangan PDRB Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,05	3,67	5,03	5,26	5,12
PDRB ADHB (miliar Rp.)	11.498,28	12.129,79	13.163,70	14.256,42	15.474,58
PDRB ADHK (miliar Rp.)	7.738,968	8.022,780	8.426,400	8.869,86	9.324,31
PDRB per Kapita ADHB (juta Rp.)	27,195	28,366	30,444	32,616	35,647
PDRB per Kapita ADHK (juta Rp.)	18,303	18,761	19,488	20,293	21,479

Sumber: BPS, Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2024

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama dalam mengukur kinerja ekonomi dan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pada tahun 2024, nilai PDRB Kabupaten Pangandaran atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 15.474,58 miliar rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai 9.324,31 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, terjadi peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 1,218 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 8,54 persen. Sementara itu, laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tercatat sebesar 5,12 persen, menandakan pertumbuhan ekonomi riil yang cukup stabil. Dari sisi kesejahteraan, PDRB per kapita Kabupaten Pangandaran mengalami peningkatan konsisten sejak tahun 2021, dan pada tahun 2024 telah mencapai angka 35,647 juta rupiah, mencerminkan perbaikan rata-rata pendapatan masyarakat dan kontribusi positif terhadap kesejahteraan ekonomi daerah.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

1. Tantangan dan Prospek Ekonomi Global

Pada tahun 2025, perekonomian global masih menghadapi sejumlah tantangan yang bersumber dari ketidakpastian geopolitik dan perubahan kebijakan ekonomi di negara-negara utama. Kenaikan suku bunga di negara maju, terutama Amerika Serikat, berpotensi memperketat kondisi likuiditas global dan meningkatkan risiko volatilitas pasar keuangan. Ketegangan geopolitik di beberapa wilayah,

termasuk Timur Tengah dan Eropa, turut mempengaruhi sentimen investor dan perdagangan internasional.

Namun, sejumlah faktor positif mulai muncul, seperti stabilisasi harga energi dan komoditas yang mendukung pengendalian inflasi di banyak negara. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan berada pada kisaran moderat sekitar 3,3 persen, didorong oleh pemulihan konsumsi domestik di negara maju serta peningkatan investasi di negara berkembang. Kerja sama ekonomi regional dan multilateral terus diperkuat melalui mekanisme seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), yang memperkuat integrasi rantai pasok dan meningkatkan daya saing kawasan Asia Pasifik.

Secara keseluruhan, meskipun risiko eksternal masih signifikan, perekonomian global tahun 2025 menunjukkan prospek pertumbuhan yang berkelanjutan dengan dukungan reformasi struktural dan kebijakan moneter yang adaptif.

2. Tantangan dan Prospek Ekonomi Nasional

Indonesia menghadapi dinamika ekonomi yang kompleks pada tahun 2025, dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik global dan tantangan domestik. Risiko inflasi, volatilitas pasar keuangan, serta ketahanan energi dan pangan menjadi perhatian utama. Secara internal, transformasi ekonomi diperlambat oleh produktivitas tenaga kerja yang rendah, keterbatasan inovasi, dan ketimpangan SDM.

Pemulihan sektor industri, pertanian, pariwisata, dan ekonomi kelautan membutuhkan penguatan kapasitas dan pemanfaatan potensi secara optimal. UMKM dan koperasi perlu diperkuat untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Peningkatan akses dan kualitas layanan sosial, termasuk pendidikan dan kesehatan, menjadi prasyarat bagi peningkatan kualitas SDM dan pengurangan kemiskinan.

Reformasi birokrasi dan percepatan digitalisasi pemerintahan krusial untuk efisiensi pelayanan publik dan dukungan kebijakan yang adaptif. Pemanfaatan bonus demografi serta investasi dalam ekonomi hijau dan biru akan menjadi motor penggerak pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Pengembangan infrastruktur fisik

dan digital difokuskan pada peningkatan konektivitas dan integrasi ekonomi antarwilayah, disertai strategi mitigasi perubahan iklim dan pengelolaan risiko bencana guna menjaga stabilitas sosial-ekonomi.

3. Tantangan dan Prospek Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Pada tahun 2025, perekonomian Jawa Barat diperkirakan akan tumbuh stabil seiring pemulihan ekonomi nasional dan meningkatnya aktivitas industri manufaktur, jasa, serta perdagangan. Namun demikian, berbagai tantangan struktural masih membayangi, terutama ketimpangan antarwilayah, infrastruktur yang belum merata, dan rendahnya konektivitas logistik yang menghambat efisiensi distribusi barang dan jasa, khususnya di wilayah selatan Jawa Barat.

Sektor koperasi dan UMKM, meskipun memiliki potensi besar, masih menghadapi hambatan dalam hal pembiayaan, digitalisasi, dan akses pasar. Tingkat pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk Unggulan Daerah (PUD) masih perlu ditingkatkan agar dapat berkontribusi optimal terhadap perekonomian daerah. Di sisi lain, sektor pariwisata dan perikanan belum tergarap maksimal akibat keterbatasan infrastruktur dan kesiapan destinasi.

Jawa Barat memiliki prospek positif dalam pengembangan ekonomi hijau dan biru, termasuk pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan penguatan ekonomi desa. Konsep ekonomi sirkular dan prinsip 3R mulai diterapkan untuk mengurangi limbah dan meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal. Selain itu, pembangunan infrastruktur digital dan fisik menjadi kunci dalam memperkuat transformasi ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.

Tantangan tahun 2025 juga mencakup peningkatan kompetensi tenaga kerja, pengurangan pengangguran terbuka, dan penyelarasan antara pendidikan dan kebutuhan industri. Jika tantangan-tantangan ini dapat direspons dengan kebijakan yang tepat, maka Jawa Barat berpotensi memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan merata di seluruh wilayah.

4. Tantangan dan Prospek Ekonomi Pangandaran

Pangandaran Tahun 2025, Kabupaten Pangandaran menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan ketenagakerjaan. Sektor pertanian belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam pemanfaatan lahan kering untuk produksi palawija, minimnya akses teknologi dan insentif pertanian, serta terbatasnya kapasitas petani menjadi kendala utama.

Sektor perikanan masih didominasi oleh nelayan tradisional yang kekurangan modal, teknologi, dan fasilitas pasca-panen, sementara pencemaran laut dan perubahan iklim menurunkan produktivitas tangkapan. Pariwisata pun belum optimal sepenuhnya, dengan pengelolaan destinasi, infrastruktur pendukung, dan promosi yang belum maksimal. Kondisi ini berdampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih fluktuatif.

UMKM dan koperasi di Pangandaran juga belum tumbuh secara signifikan akibat keterbatasan permodalan, data, dan digitalisasi usaha. Di sisi lain, peningkatan jumlah angkatan kerja tidak diimbangi dengan kesiapan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri, menyebabkan bertambahnya pengangguran terbuka. Masalah konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar juga masih menjadi hambatan.

Meski demikian, Pangandaran memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan. Pengembangan pertanian berbasis teknologi, penguatan agribisnis, serta dukungan regulasi dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Optimalisasi potensi perikanan tangkap dan budidaya dengan dukungan fasilitas pengolahan serta akses pasar akan meningkatkan daya saing sektor kelautan.

Pariwisata memiliki peluang besar tumbuh melalui pembangunan infrastruktur destinasi, promosi digital, pelibatan masyarakat lokal, dan pelestarian lingkungan. UMKM dan koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan dukungan pelatihan kewirausahaan, digitalisasi, dan akses pembiayaan. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi serta pengembangan sektor industri kreatif dan ekonomi hijau diharapkan membuka lapangan kerja baru yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, serta penguatan infrastruktur dan kebijakan fiskal daerah yang tepat, Pangandaran berpeluang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat bagian selatan.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2025 juga difokuskan untuk mendukung pencapaian kerangka ekonomi makro daerah tahun 2025 dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) terkait pelayanan dasar.

Tabel 3. 4 Capaian dan Target Indikator Makro daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2022-2026

No	Indikator	Capaian			Target		
МО	indikator	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	5,26	5,12	5,06-5,55	5,62	
2.	PDRB per Kapita (Rp. Juta/Kapita)	30,44	32,62	35,65	35,71-36,07	41,75	
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,56	1,52	1,58	1,3-1,41	1,47	
4.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	69,03	70,57	71,03	71,16	71,77	
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,32	8,98	8,75	7,43-8,2	7,78	
6.	Rasio Gini (Poin)	0,294	0,323	0,268	0,316 -0,323	0,285	
7.	Penurunan Intesitas Emisi GRK (Ton Co ₂ Eq/Milyar)				9,61	10,17	

Sumber: BPS, Target berdasarkan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan indikator ekonomi makro, perkembangan ekonomi Kabupaten Pangandaran menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang konsisten, memberikan optimisme bahwa pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tingkat pengangguran yang relatif rendah menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Pangandaran telah memperoleh pekerjaan. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2024 capaian IPM berhasil melampaui target yang direncanakan. Angka kemiskinan juga mengalami tren penurunan pada tahun 2024, meskipun masih

belum mencapai angka yang ditargetkan. Sementara itu, Indeks Gini yang mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2023.

Prospek ekonomi Kabupaten Pangandaran di tahun 2024 yang semakin membaik diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian tahun 2025 dan seterusnya. Indeks Pembangunan Manusia diperkirakan akan terus meningkat, kesenjangan sosial semakin berkurang, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka serta angka kemiskinan diproyeksikan mengalami penurunan. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor-sektor unggulan yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah, seperti pariwisata, pertanian, perdagangan, industri pengolahan, serta investasi.

Selain melihat capaian kinerja perekonomian tahun 2024, Kabupaten pangandaran juga telah melakukan evaluasi capaian pada semester I sebagai dasar gambaran tahun 2025 atau tahun berjalan. Kinerja lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap PDRB diperkirakan masih didominasi oleh 5 sektor unggulan diantaranya yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Kendaraan Bermotor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta Konstruksi.

Inflasi Kabupaten Pangandaran pada periode Januari-Juni 2025 dapat mengacu pada inflasi kumulatif Kota Tasikmalaya yang diperkirakan sebesar 1,20 persen. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata terjadi kenaikan harga barang dan jasa konsumsi sebesar 1,20 persen selama enam bulan pertama tahun 2025 dibandingkan dengan harga pada bulan Desember 2024. Meskipun relatif terkendali, inflasi tetap perlu diwaspadai terutama menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan libur panjang, yang berpotensi meningkatkan tekanan harga. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menargetkan pengendalian inflasi tetap berada dalam kisaran yang wajar dan mendukung daya beli masyarakat, antara lain melalui penguatan koordinasi TPID, stabilisasi pasokan dan distribusi pangan, serta penguatan sistem

informasi harga pangan di pasar-pasar daerah.

Realisasi investasi di Kabupaten Pangandaran pada periode Januari–Juni 2025 masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dengan capaian sekitar Rp. 582.044.938.993,00. Hal ini menunjukkan masih perlunya upaya besar untuk meningkatkan iklim dan promosi investasi di daerah.

Pada periode Januari–Juni 2025, Kabupaten Pangandaran terus mendorong penyerapan tenaga kerja melalui pelatihan, penguatan sektor pariwisata, serta fasilitasi perluasan kesempatan kerja, dengan capaian awal yang menunjukkan perbaikan meskipun data resmi angka penyerapan belum dipublikasikan secara lengkap. Penanganan kemiskinan di Kabupaten Pangandaran pada periode Januari–Juni 2025 difokuskan pada verifikasi data penduduk miskin, penguatan sektor UMKM dan pariwisata, serta program perlindungan sosial, dengan capaian penurunan angka kemiskinan yang diperkirakan berada di kisaran 8,5–8,7 persen dari sebelumnya 8,75 persen pada akhir 2024.

Penguatan dan perbaikan di berbagai aspek diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Pangandaran. Berikut perkiraan kondisi perekonomian nasional, provinsi dan Pangandaran:

Tabel 3. 5 Target Indikator Makro Nasional, Provinsi,
Pangandaran Tahun 2025

No	Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Target I	Pangandaran
		2025	2025	2025	2026
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	4,96-5,37	5,06-5,55	5,62
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5-5,0	6,7-6,8	1,3-1,41	1,47
3.	Indeks Modal Manusia/ Indeks Pembangunan Manusia	0,55-0,56	0,55	71,16	71,77
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0	5,85-6,46	7,43-8,2	7,78
5.	Rasio Gini	0,379-0,382	0,383-0,390	0,316 -0,323	0,285

Sumber: BPS, Target berdasarkan Provinsi Jawa Barat

3.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi

3.1.3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, kebijakan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada transformasi struktural menuju sistem ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Fokus kebijakan ekonomi nasional pada tahun 2025 mencakup lima pilar utama, yaitu:

- 1. Penguatan Ekonomi Syariah
 - Bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional dan memperkokoh posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global.
- 2. Pengembangan Ekonomi Digital Difokuskan pada akselerasi transformasi digital lintas sektor untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing ekonomi di tingkat global, dengan penguatan infrastruktur, talenta digital, serta regulasi yang adaptif.
- 3. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

 Meliputi pengarusutamaan prinsip keberlanjutan dalam
 pembangunan wilayah, perlindungan lingkungan hidup, dan
 pengelolaan sumber daya kelautan, serta penguatan
 konektivitas antarwilayah melalui infrastruktur ramah
 lingkungan dan pembangunan desa berbasis potensi lokal.
- 4. Penguatan Ekosistem Ekonomi Sirkular

 Dilaksanakan melalui strategi efisiensi sumber daya,
 pengurangan timbulan limbah, dan peningkatan nilai tambah
 dari daur ulang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
 rendah karbon.
- 5. Inovasi Tata Kelola dan Stabilitas Sosial-Politik
 Berfokus pada reformasi pelayanan publik, penataan kelembagaan dan kewilayahan, serta penguatan stabilitas politik, hukum, hak asasi manusia, dan keamanan guna menciptakan ekosistem pembangunan yang kondusif.

Implementasi arah kebijakan tersebut diukur melalui pencapaian target-target strategis, antara lain:

1. Ekonomi Syariah

Diukur dari peningkatan posisi Indonesia dalam Global Islamic Economy Indicator.

2. Ekonomi Digital

Ditunjukkan melalui peningkatan skor dan peringkat Indeks Daya Saing Digital di tingkat global.

- 3. Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru, yang dinilai berdasarkan:
 - a. Peningkatan Indonesia Blue Economy Index (IBEI)
 - b. Kenaikan Indeks Ekonomi Hijau
 - c. Persentase timbulan sampah yang terkelola melalui fasilitas pengolahan
 - d. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara kumulatif dan tahunan
 - e. Peningkatan kualitas lingkungan yang tercermin dalam:
 - Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
 - Indeks Kualitas Udara
 - Indeks Kualitas Air
 - Indeks Kualitas Lahan
 - Indeks Kualitas Air Laut

Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional menuju pertumbuhan yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

3.1.3.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Pembangunan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2025 difokuskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengan menekankan pemerataan pendapatan, pengurangan tingkat kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja yang luas. Selain itu, pembangunan ini juga berorientasi pada keberlanjutan dengan memastikan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, diterapkan berbagai strategi dan arah kebijakan yang terarah dan berkelanjutan.

 Peningkatan Produksi dan Diferensiasi Produk di Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

- a. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian serta kelautan dan perikanan.
- b. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta memastikan tersedianya prasarana dan sarana pertanian.
- c. Penerapan sistem pertanian tanaman terpadu dan intensifikasi pertanian.
- d. Peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan petani.
- e. Pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kelautan dan perikanan, peningkatan kualitas mutu produk, serta nilai tambah guna mendorong investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan.
- f. Pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- g. Pengembangan sentra pertanian dan perikanan yang terpadu guna meningkatkan produksi dan produktivitas.
- h. Penerapan prinsip UMKM hijau, terutama yang mengembangkan potensi unggulan daerah.
- i. Peningkatan program perhutanan sosial.
- 2. Pengembangan Ketahanan Pangan Berkelanjutan
 - a. Perbaikan tata kelola pangan dengan memperhatikan akses, ketersediaan, dan pemanfaatan pangan.
 - b. Integrasi budaya dalam peningkatan daya saing pangan lokal.
 - c. Pengembangan *Smart Fishing* dan *Sustainable Aquaculture* sebagai strategi perikanan berkelanjutan.
- 3. Peningkatan Daya Saing Produk Industri dan Perdagangan
 - a. Penerapan link and match antara industri kecil dan industri besar.
 - b. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta industri hijau.
 - c. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur industri serta pengembangan sentra industri terpadu.
 - d. Optimalisasi perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta perdagangan digital.
 - e. Peningkatan diversifikasi produk ekspor dan ekspansi pasar tujuan ekspor.

- f. Penguatan jaringan distribusi serta pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok.
- 4. Peningkatan Inovasi dan Kualitas Penanaman Modal, serta Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja
 - a. Peningkatan kemudahan berusaha dan berinvestasi.
 - b. Promosi dan peningkatan layanan investasi.
 - c. Modernisasi koperasi dan penciptaan UMKM naik kelas.
 - d. Peningkatan daya saing UMKM di pasar domestik dan global.
 - e. Peningkatan keterampilan angkatan kerja.
 - f. Pengembangan pendidikan vokasional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
 - g. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan.
 - h. Pembentukan wirausaha baru.
 - i. Pengembangan serta penjaminan keberlanjutan usaha kecil.
- 5. Peningkatan Daya Saing Pariwisata
 - a. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan berdaya saing.
 - b. Peningkatan serta perluasan promosi dan pemasaran pariwisata berbasis kemitraan strategis.
 - c. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
 - d. Pengembangan budaya lokal yang mendukung pengembangan sektor pariwisata.

6. Daerah Afirmasi Prioritas

- a. Pemberdayaan aktivitas ekonomi berbasis high-value unggulan di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan.
- b. Dukungan promosi dan kemudahan investasi di sektor ekonomi unggulan daerah.

3.1.3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Pangandaran

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan kebijakan ekonomi di tingkat provinsi dan nasional, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pangandaran pada tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut.

- a. Peningkatan kinerja sektor pertanian melalui peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan kelautan berbasis Kawasan, komoditi unggulan dan korporasi;
- b. Perluasan fasilitas inkubasi bagi pelaku ekonomi kreatif;
- c. Peningkatan utilitas aktor ekonomi kreatif melalui kualitas sarana dan prasarana yang bermutu;
- d. Penguatan SDM dan daya saing produk ekonomi kreatif;
- e. Peningkatan kualitas Sumber Daya Potensial di berbagai sektor;
- f. Pengawalan percepatan realisasi proyek strategis yang sudah memiliki perizinan; dan
- g. Pengoptimalan Daerah Afirmasi Prioritas dalam Mendukung Perekonomian Daerah.



Gambar 3. 3 Arah Kebijakan Ekonomi 2025 Pangandaran

Sumber: Diolah Penyusun, 2025

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pangandaran tahun 2025 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas harga, peningkatan daya beli masyarakat, serta pemerataan pembangunan antarwilayah

dan antarkelompok sosial. Kebijakan ini mempertimbangkan perkembangan indikator makro ekonomi terkini.

Pada periode Januari–Juni 2025, tingkat inflasi Kabupaten Pangandaran diperkirakan mengikuti tren Kota Tasikmalaya, yaitu sebesar 1,20 persen, yang mencerminkan stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah tekanan distribusi dan pasokan. Dari sisi ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah terus mendorong perluasan kesempatan kerja melalui pelatihan, pemberdayaan UMKM, dan penguatan sektor pariwisata, meskipun data resmi semester I belum dipublikasikan secara lengkap.

Sementara itu, tingkat kemiskinan menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan estimasi penurunan dari 8,75 persen pada akhir 2024 menjadi sekitar 8,5–8,7 persen pada pertengahan 2025, sebagai hasil dari intervensi sosial dan peningkatan pendapatan masyarakat. Adapun Indeks Gini yang mencerminkan tingkat ketimpangan pengeluaran masih menjadi perhatian dan diharapkan dapat terus ditekan melalui kebijakan yang mendorong pemerataan ekonomi, perlindungan sosial, dan peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar.

Dengan demikian, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pangandaran tidak hanya difokuskan pada peningkatan pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat merata, berkeadilan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan pedoman dalam pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selama satu tahun ke depan. Dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, kebijakan ini menjadi acuan dalam menentukan langkah strategis pemerintah daerah. Optimalisasi penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah bergantung pada kecukupan sumber penerimaan yang diberikan kepada daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan keuangan Kabupaten Pangandaran tahun 2025 disusun sejalan dengan arah pembangunan yang tertuang dalam

RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, serta mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah sebagai faktor krusial dalam pelaksanaan pembangunan. Kinerja keuangan daerah tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, di antaranya: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; serta (4) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diukur dalam bentuk uang, termasuk aset yang menjadi milik daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari sistem keuangan negara dan menjadi elemen utama dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang Tahun 2022 membawa perubahan Nomor 1 dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam aspek desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan daerah, meningkatkan kemandirian fiskal. Agar pendanaan pemerintahan berjalan efisien dan efektif serta menghindari ketimpangan alokasi anggaran, maka sistem pengelolaan keuangan daerah diatur dengan jelas dalam regulasi yang berlaku.

Kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan ini memiliki tiga fungsi utama, yaitu: alokasi, untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan optimalisasi mekanisme pasar; distribusi, guna memastikan pemerataan dan keadilan dalam pembangunan baik antar kelompok pendapatan maupun antar wilayah; serta stabilisasi, sebagai alat untuk meredam dampak guncangan ekonomi, khususnya dari faktor eksternal, agar tidak terlalu memengaruhi perekonomian domestik dan kesejahteraan masyarakat miskin maupun rentan.

Strategi kebijakan fiskal diterapkan melalui dua pendekatan

utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka menengah-panjang pendek. Strategi jangka berfokus transformasi ekonomi dan sosial melalui penguatan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, ekonomi hijau, peningkatan nilai tambah, penguatan inklusivitas, serta penyederhanaan regulasi. Sementara itu, strategi jangka pendek diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat konvergensi pembangunan antarwilayah. Implementasi strategi ini dilakukan melalui optimalisasi kapasitas fiskal dengan kebijakan transfer ke daerah secara asimetris, peningkatan PAD (collecting more), inovasi pembiayaan (innovative financing), serta perbaikan kualitas belanja daerah (spending better), baik dari segi efektivitas maupun efisiensi, guna memperkuat investasi dan meningkatkan kualitas layanan publik di daerah.

Kondisi keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal yang diperoleh. Keterbatasan sumber pendapatan daerah menjadikan pengelolaan aset secara profesional sebagai faktor potensial dalam mendukung penerimaan daerah. Selain pendanaan yang bersumber dari APBD, terdapat berbagai alternatif sumber pembiayaan lain yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan daerah, seperti pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/Public Private Partnership (PPP), kontribusi swadaya masyarakat, serta peran dunia usaha melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

3.2.1 Kondisi, Proyeksi Keuangan Daerah, dan Kerangka Pendanaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berperan lebih aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam aspek keuangan daerah. Oleh karena itu, kemandirian keuangan daerah menjadi faktor krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Daerah dengan kapasitas fiskal yang baik akan memiliki kemampuan lebih besar dalam merancang dan

melaksanakan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pelayanan publik serta menjamin keberlanjutan pembangunan. Kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat diukur melalui tingkat pendapatan daerah yang diperoleh.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencakup tiga aspek utama, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta sumber pendapatan sah lainnya. Belanja daerah mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Sementara itu, pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan kajian defisit per 16 Januari 2025 yang telah dilakukan. kondisi keuangan daerah menunjukkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja. Defisit yang terjadi disebabkan oleh pelaksanaan belanja yang tetap berjalan meskipun target pendapatan mengalami koreksi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi target RPJMD serta janji politik yang telah ditetapkan. Beberapa belanja yang menjadi prioritas meliputi belanja mandatory dan mendesak, seperti penanganan dampak COVID-19, bantuan sosial, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pendidikan, serta kebutuhan operasional instansi seperti BPBD dan Dinas Kesehatan. Selain itu, penyelenggaraan Pilkada serentak turut berkontribusi terhadap defisit, ditambah dengan pembatasan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengharuskan pemenuhan batas minimal belanja infrastruktur dan sektor tertentu.

Tidak tercapainya target pendapatan daerah semakin memperparah kondisi defisit. Beberapa penyebab utama ketidaktercapaian pendapatan ini antara lain refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan prioritas anggaran, dampak pembatasan pengalokasian sosial yang menghambat aktivitas ekonomi dan menurunkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penargetan pendapatan yang kurang realistis dan tidak sesuai dengan potensi riil yang dapat dicapai. Berdasarkan

data realisasi dari BKAD, indikator pencapaian keuangan daerah mengalami hambatan signifikan yang berdampak pada efektivitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Selain faktor-faktor tersebut, defisit semakin bertambah akibat beberapa kondisi lain, seperti pelaksanaan program prioritas RPJMD 2021-2026 yang mengharuskan daerah untuk terus membiayai proyek-proyek strategis, inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran yang menyebabkan perbedaan signifikan dalam kebutuhan anggaran dan realisasinya, serta ketidakmampuan merealisasikan rencana pembiayaan baik dari sumber pendanaan eksternal maupun internal. Pemindahan sumber pendanaan pembangunan dari bantuan keuangan provinsi ke APBD akibat kesalahan teknis dalam pelaksanaan juga turut berkontribusi terhadap peningkatan defisit. Di samping itu, terbatasnya ruang fiskal dalam APBD membuat rasionalisasi belanja hanya dapat dilakukan secara bertahap, dengan prioritas utama pada pembayaran belanja pegawai dibandingkan operasional dan pelayanan publik lainnya.

Dampak dari defisit ini bersifat ganda, baik positif maupun negatif. Dari sisi positif, defisit mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, meningkatkan pertumbuhan ekonomi memperbaiki kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah. Namun, di sisi lain, beban utang daerah semakin tinggi, risiko krisis keuangan meningkat, dan ketergantungan terhadap pendanaan eksternal semakin besar. Akibat defisit ini, pemerintah daerah harus mempercepat pencapaian target pembangunan yang semula direncanakan selesai pada tahun 2026 menjadi tahun 2024. Evaluasi menunjukkan bahwa 61% indikator kinerja utama pembangunan daerah telah mencapai target lebih awal, mencerminkan dampak nyata dari strategi pengelolaan keuangan yang telah diterapkan.

Untuk mengatasi defisit yang terjadi, pemerintah daerah menerapkan beberapa strategi utama, antara lain melalui pinjaman daerah yang dilakukan secara terstruktur guna membiayai proyek prioritas tanpa menambah beban fiskal secara signifikan. Efisiensi anggaran juga dilakukan dengan membandingkan penganggaran terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) guna memastikan alokasi

yang lebih efektif. Selain itu, pemerintah daerah juga mengupayakan pendanaan inovatif dengan mengeksplorasi sumber-sumber alternatif seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menjadi langkah strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta diiringi dengan penyusunan regulasi guna mengurangi ketergantungan pada utang belanja dan memastikan keberlanjutan fiskal daerah. Dengan strategi-strategi ini, diharapkan kondisi keuangan daerah dapat dikelola secara lebih efektif, sehingga dampak negatif dari defisit dapat diminimalkan dan pembangunan daerah tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3.2.1.1 Kondisi Fiskal Kabupaten Pangandaran

Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi fiskal Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengalami tekanan yang cukup signifikan, ditandai dengan meningkatnya defisit anggaran dan terbatasnya ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan daerah. Tantangan utama yang dihadapi meliputi:

- Defisit Anggaran, akibat menurunnya pendapatan daerah yang tidak sebanding dengan meningkatnya kebutuhan belanja, khususnya untuk belanja wajib dan mendesak.
- 2. Tekanan Belanja, yang tinggi disebabkan oleh kewajiban pembiayaan terhadap prioritas daerah, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan aparatur serta operasional layanan publik.
- 3. Utang Daerah, yang menjadi beban fiskal seiring dengan jatuh temponya kewajiban pembayaran utang pada Tahun Anggaran 2025.
- 4. Terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah, yang tercermin dari belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga mempersempit ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan kondisi tersebut langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pangandaran diantaranya:

1. Pembentukan Tim Ad Hoc Penyehatan Fiskal yang bertugas mengkaji dan mengarahkan kebijakan rasionalisasi fiskal daerah.

- 2. Melaksanakan efisiensi dan rasionalisasi belanja daerah secara signifikan, terutama pada belanja yang tidak langsung mendukung prioritas pembangunan dan pelayanan dasar.
- 3. Penyusunan Roadmap Penyehatan Fiskal Kabupaten Pangandaran sebagai panduan kebijakan dan operasional dalam jangka pendek dan menengah.

Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan strategi penyehatan fiskal ini adalah:

- 1. Memberikan arahan dan pedoman teknis kepada seluruh Perangkat Daerah dalam melaksanakan efisiensi dan rasionalisasi belanja Tahun Anggaran 2025.
- 2. Mewujudkan penghematan anggaran belanja daerah yang diarahkan untuk menutup potensi defisit kas serta membiayai kewajiban prioritas daerah dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
- 3. Meningkatkan disiplin anggaran, serta memastikan penggunaan anggaran daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

3.2.1.2 Strategi Penyehatan Fiskal Kabupaten Pangandaran

Dalam rangka menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menetapkan tiga strategi utama dalam penyehatan fiskal daerah, yaitu:

- 1. Efisiensi dan Rasionalisasi Belanja Daerah Dilaksanakan melalui penerbitan Surat Edaran mengenai langkah-langkah efisiensi dan rasionalisasi belanja, yang mengatur prioritisasi program dan kegiatan, serta pengendalian belanja yang tidak langsung mendukung pelayanan dasar dan prioritas pembangunan. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi tekanan belanja dan memperbaiki struktur anggaran daerah Tahun Anggaran 2025.
- 2. Penjadwalan Ulang Pembayaran Utang Kegiatan
 Strategi ini mencakup negosiasi dan penjadwalan ulang
 (rescheduling) pembayaran kewajiban utang kepada pihak ketiga
 maupun kepada Bank BJB. Selain itu, dilakukan restrukturisasi

pinjaman jangka menengah melalui skema *Cash Flow Financing* selama 5 tahun, disertai upaya penurunan suku bunga pinjaman guna meringankan beban fiskal daerah secara bertahap.

3. Optimalisasi Pendapatan Daerah

Upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, serta digitalisasi pengelolaan pendapatan untuk memperbaiki akurasi, transparansi, dan efektivitas pemungutan.
- b. Penyelarasan kebijakan alokasi DAU dan Dana Insentif Fiskal, terutama dalam mendukung penyelesaian kewajiban utang daerah dan memperkuat posisi fiskal.
- c. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, khususnya dalam optimalisasi penerimaan melalui Bantuan Keuangan Umum, Bantuan Keuangan Khusus, dan pinjaman antar pemerintah daerah.

Sebagai bagian integral dari strategi penyehatan fiskal, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menerapkan kebijakan efisiensi dan rasionalisasi belanja daerah secara sistematis dan terukur. Oleh karena itu, telah diterbitkan Surat Edaran Bupati Nomor 900/631/BKAD.2/2025 tentang Langkah-langkah Efisiensi dan Rasionalisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai pedoman teknis bagi seluruh SKPD.

Surat Edaran ini menjadi landasan pelaksanaan efisiensi belanja daerah secara terukur dan akuntabel dengan sasaran penghematan pada berbagai jenis belanja, antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, honorarium, kegiatan bimtek, serta belanja modal. Beberapa langkah strategis yang diambil mencakup pembatasan dan pengurangan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga 30%, penghematan belanja bahan habis pakai dan perjalanan dinas minimal 50%, penundaan pelaksanaan belanja modal yang tidak mendesak, serta penghentian kegiatan belanja hibah dan bantuan sosial yang tidak prioritas.

Langkah umum pengendalian belanja daerah yang diterapkan mencakup:

1. Penajaman prioritas program/kegiatan dan anggaran di setiap

SKPD.

- 2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 3. Penghentian pengusulan program/kegiatan baru yang tidak bersifat mendesak pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, kecuali untuk mendukung efisiensi fiskal, optimalisasi PAD, dan penanganan kewajiban utang.

Penghematan ini bertujuan untuk menutupi potensi defisit kas dan membiayai kewajiban prioritas daerah seperti pembayaran gaji ASN, operasional pelayanan publik, dan pembayaran utang daerah yang jatuh tempo. Selain itu, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin penggunaan anggaran, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Pangandaran.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan efisiensi belanja ini akan dilakukan secara ketat oleh Inspektorat Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dengan pelaporan berkala oleh setiap Kepala SKPD sebagai bagian dari tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pangandaran sangat penting untuk mewujudkan penyehatan fiskal daerah yang berkelanjutan.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah mencerminkan seluruh hak daerah yang diakui sebagai peningkatan kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Pendapatan ini mencakup seluruh penerimaan kas melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dikembalikan serta penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara umum, Pendapatan Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah. Analisis terhadap realisasi pendapatan daerah menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan Kabupaten Pangandaran, pendapatan terutama dalam mengoptimalkan potensi PAD guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pendapatan daerah merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan dan operasional pemerintah daerah. Di Kabupaten

Pangandaran, pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total pendapatan daerah. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp.1.433.017.885.265,47 atau 99,52% dari target yang ditetapkan. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 98.803.598.493,28. Hal ini menunjukkan bahwa sumbersumber pendapatan yang ada masih perlu dioptimalkan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

Untuk tahun 2025, pendapatan daerah ditargetkan mengalami penurunan dengan proyeksi sebesar Rp.1.396.706.910.668,00. Target tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp.281.034.088.397,00 dan pendapatan transfer sebesar Rp. 1.115.672.822.271,00. Meskipun pendapatan transfer masih menjadi komponen utama, upaya peningkatan PAD tetap menjadi prioritas guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Selain itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah juga menjadi salah satu sumber penerimaan yang perlu terus dikembangkan. Peningkatan pendapatan daerah sangat bergantung pada efektivitas sistem pemungutan pajak, retribusi, serta optimalisasi aset daerah.

Tabel 3. 6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Pangandaran

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Proyeksi/Target Tahun 2025	Proyeksi/Target Tahun 2026	Proyeksi/Target Tahun 2027
1	2	3	4	5	6	7
	PENDAPATAN					
4.1	Pendapatan Asli Daerah	242.766.077.875,19	240.125.736.186,47	281.034.088.397,00	300.266.604.834,00	438.968.430.000,00
4.1.1	Pajak Daerah	76.347.564.838,00	83.495.705.322,00	111.700.712.865,00	121.566.034.202,00	129.882.748.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	37.950.037.757,00	34.721.606.693,0	166.393.724.710,00	175.029.020.632,00	185.554.567.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan	602.205.428,00	525.178.733,00	820.000.000,00	828.200.000,00	830.528.000,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	127.866.269.852,19	121.383.245.438,47	2.119.650.822,00	2.843.350.000,00	122.700.587.000,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.091.448.208.897,00	983.208.106.906,00	1.115.672.822.271,00	2.027.899.682.890,00	1.168.115.476.000,00
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	897.499.391.699,00	922.264.407.000,00	922.264.407.000,00	1.022.295.006.044,00	988.599.600.000,00
4.2.2	Transfer antar – daerah	193.948.817.198,00	234.642.261.776,00	193.408.415.271,00	1.005.604.676.846,00	179.515.876.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.334.214.286.772,19	1.433.017.885.265,47	1.396.706.910.668,00	2.328.166.287.724,00	1.607.083.906.000,00

Sumber: BKAD Kabupaten Pangandaran, 2025

3) Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (audited BPK)

4) Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (non-audited BPK)

5) Perubahan RKPD Tahun 2025

6) Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029

7) Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029

Tabel 3. 7 Perbandingan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

No.	Uraian	RKPD Tahun 2025	RKPD Perubahan Tahun 2025	Selisih
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	297.037.515.631,00	281.034.088.397,00	16.003.427.234,00
4.1.1	Pajak Daerah	108.575.287.603,00	111.700.712.865,00	-3.125.425.262,00
4.1.2	Retribusi Daerah	36.645.022.600,00	166.393.724.710,00	-129.748.702.110,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan	782.205.428,00	820.000.000,00	-37.794.572,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	151.035.000.000,00	2.119.650.822,00	148.915.349.178,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.480.644.537.270,00	1.115.672.822.271,00	364.971.714.999,00
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.101.802.335.063,80	922.264.407.000,00	179.537.928.063,80
4.2.2	Transfer antar – daerah	378.842.202.206,20	193.408.415.271,00	185.433.786.935,20
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.777.682.052.901,00	1.396.706.910.668,00	380.975.142.233,00

Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah, kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi berbagai sumber penerimaan daerah, salah satu strategi utama adalah meningkatkan kontribusi PAD melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan sistem administrasi perpajakan, peningkatan layanan kepada wajib pajak, serta penguatan regulasi guna mencegah kebocoran penerimaan. Selain pemanfaatan aset daerah secara lebih produktif juga menjadi fokus utama guna meningkatkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan transfer juga diupayakan untuk terus meningkat melalui optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kemudian, implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan bisa memperkuat sistem perpajakan dan retribusi daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki kapasitas yang lebih besar dalam mengelola pendapatan. Peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi juga akan didukung dengan inovasi digitalisasi layanan pajak daerah guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran menetapkan arah kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- 1) Penguatan kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah, melalui optimalisasi peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta unit pengelola pendapatan di perangkat daerah penghasil;
- Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD, dengan mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang berbasis potensi riil dan pemutakhiran basis data objek serta subjek pajak;
- 3) Penyempurnaan regulasi tarif pajak dan retribusi daerah, dengan mempertimbangkan asas keadilan, kemampuan masyarakat, dan efektivitas pelayanan publik;
- 4) Peningkatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan kecamatan dan desa, dalam rangka penggalian potensi pendapatan di wilayah serta peningkatan kepatuhan pajak masyarakat;

- 5) Peningkatan pelayanan pajak berbasis digital, melalui pemanfaatan sistem informasi daerah untuk pembayaran pajak/retribusi secara daring, penyediaan layanan mandiri, dan perluasan kanal pembayaran;
- 6) Penguatan peran BUMD dalam menghasilkan pendapatan daerah, melalui revitalisasi model bisnis, peningkatan efisiensi operasional, dan perluasan layanan usaha;
- 7) Peningkatan kepatuhan dan partisipasi masyarakat, melalui edukasi dan sosialisasi perpajakan secara masif menggunakan berbagai media dan pendekatan komunitas;
- 8) Penguatan sistem pelaporan dan pengawasan pendapatan, guna menjamin akuntabilitas, transparansi, dan pencegahan kebocoran penerimaan daerah;
- 9) Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengelola pendapatan, melalui pelatihan teknis, penguatan integritas, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas;
- 10) Pemanfaatan aset daerah secara produktif, melalui pendataan, legalisasi, dan pengembangan kerja sama pemanfaatan aset yang potensial menghasilkan pendapatan;
- 11) Eksplorasi sumber PAD baru, seperti pemanfaatan layanan publik berbasis potensi lokal, kerja sama pemanfaatan ruang publik, atau retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- 12) Optimalisasi peran unit layanan pajak daerah, seperti unit Samsat, Tax Center, dan pelayanan keliling, guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan efektivitas penagihan.

Dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan daerah dari bagi hasil pajak provinsi, khususnya opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pemerintah Kabupaten Pangandaran menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

 Meningkatkan kerja sama dan fasilitasi penyediaan layanan Samsat digital, melalui dukungan penyediaan lokasi strategis dan infrastruktur pendukung bagi pengembangan layanan Samsat Digital Mandiri di wilayah kabupaten, guna meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan;

- 2) Mendukung diseminasi informasi pajak kendaraan kepada wajib pajak di daerah, dengan memanfaatkan saluran komunikasi resmi pemerintah daerah (media sosial, website, radio lokal, dan media cetak), serta membantu penyampaian informasi melalui pesan singkat, grup desa/kelurahan, dan lembaga kemasyarakatan;
- 3) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi perpajakan secara langsung kepada masyarakat, melalui penyuluhan, kegiatan mobil keliling, forum warga, dan partisipasi dalam kegiatan desa/kelurahan, sebagai upaya membangun kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor;
- 4) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendataan dan pemutakhiran data kendaraan bermotor, termasuk mendukung pelaksanaan sensus kendaraan, survei lapangan, serta operasi gabungan dengan pihak Samsat dan kepolisian, untuk memastikan validitas data dan menjaring potensi pajak yang belum tergali;
- 5) Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama pajak kendaraan, dengan melakukan pelaporan berkala atas kegiatan dukungan kabupaten terhadap peningkatan opsen PKB dan BBNKB, serta mengusulkan perbaikan kebijakan berbasis evaluasi capaian penerimaan.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan komponen utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik. Komposisi belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Pada tahun 2024, belanja daerah Kabupaten Pangandaran terealisasi sebesar Rp.1.478.829.463.096,00 atau 81,98% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.803.925.407.250,00. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2023 yang mencapai Rp1.343.490.829.836,00.

Berdasarkan hasil analisis perkiraan sumber-sumber pendapatan dan realisasi pendapatan Kabupaten Pangandaran dalam dua tahun terakhir, maka pada tahun 2025 Belanja Kabupaten Pangandaran diproyeksikan mengalami kenaikan. Belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasional, terutama untuk pegawai dan jasa, sementara belanja modal perlu ditingkatkan guna mempercepat pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, kebijakan belanja diarahkan pada efisiensi dan efektivitas anggaran, dengan fokus pada peningkatan proporsi belanja modal dan penguatan belanja berbasis kinerja. Pengawasan anggaran juga diperketat melalui digitalisasi sistem pengelolaan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah pusat diperkuat agar kebijakan belanja daerah sejalan dengan program nasional dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Secara rinci proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 8 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Pangandaran

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi/Target Tahun 2025	Proyeksi/Target Tahun 2026	Proyeksi/Target Tahun 2027		
1	2	3	4	5	6	7		
	BELANJA							
2.1	Belanja Operasi	918.086.702.127,00	994.530.727.427,00	1.158.370.430.231,58	1.563.219.741.426,85	1.203.580.443.000,00		
2.1.1	Belanja Pegawai	428.078.544.757,00	491.964.608.785,00	582.649.356.737,80	561.952.683.140,85	596.476.242.000,00		
2.1.2	Belanja barang dan jasa	456.135.369.459,00	443.165.843.753,00	538.905.666.693,78	984.852.151.486,00	556.796.770.000,00		
2.1.3	Belanja bunga	12.138.715.286,00	12.681.597.221,00	12.250.000.000,00	0,00	28.000.028.000,00		
2.1.4	Belanja subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.5	Belanja Hibah	18.677.822.625,00	43.449.125.668,00	22.214.656.800,00	16.405.906.800,00	20.242.789.000,00		
2.1.6	Belanja bantuan sosial	3.056.250.000,00	3.269.552.000,00	2.350.750.000,00	9.000.000,00	2.064.614.000,00		
2.2	Belanja Modal	263.582.863.366,00	304.982.767.222,00	297.713.749.652,00	526.479.210.489,00	242.899.356.000,00		
2.2.1	Belanja Tanah	383.749.500,00	0,00	1.271.296.169,00	0,00	968.558.000,00		
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	61.492.156.687,00	108.827.498.051,00	117.809.021.342,00	86.809.201.659,00	149.394.568.000,00		
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	38.543.753.609,00	92.813.878.413,00	108.727.785.687,00	78.285.767.630,00	46.190.034.000,00		
2.2.4	Belanja Jalan, irigasi dan jembatan	162.266.209.570,00	101.020.283.051,00	66.709.417.654,00	361.135.859.000,00	40.741.960.000,00		
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	851.474.000,00	2.286.727.707,00	196.228.800,00	248.382.200,00	171.361.000,00		
2.2.6	Belanja aset lainnya	45.520.000,00	34.380.000,00	3.000.000.000,00	0,00	5.432.875.000,00		
2.3	Belanja Tidak Terduga	2.587.406.924,00	4.334.157.345,00	7.359.950.721,63	10.000.000.000,00	10.674.375.000,00		
2.4	Belanja transfer	159.233.857.419,00	174.981.811.102,00	195.194.022.732,00	204.599.530.657,00	84.969.719.000,00		
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.494.292.217,00	5.729.021.396,00	15.298.580.727,00	16.579.520.900,00	13.946.818.000,00		
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	157.739.565.202,00	169.252.789.706,00	179.895.442.005,00	188.020.009.757,00	71.022.901.000,00		
	Total Belanja	1.343.490.829.836,00	1.478.829.463.096,00	1.658.638.153.337,21	2.304.298.482.572,85	1.542.123.893.000,00		
Sumber: BKAD Kabupaten Pangandaran, 2025 3) Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (audited BPK) 4) Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (non-audited BPK) 5) Perubahan RKPD Tahun 2025 6) Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 7) Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029								

Tabel 3. 9 Perbandingan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

No.	Uraian	RKPD Tahun 2025	RKPD Perubahan Tahun 2025	Selisih
1	2	3	4	5
	BELANJA			
2.1	Belanja Operasi	1.329.977.992.522,00	1.158.370.430.231,58	171.607.562.290,42
2.1.1	Belanja Pegawai	552.966.092.953,00	582.649.356.737,80	-29.683.263.784,80
2.1.2	Belanja barang dan jasa	665.374.742.769,00	538.905.666.693,78	126.469.076.075,22
2.1.3	Belanja bunga	37.000.000.000,00	12.250.000.000,00	24.750.000.000,00
2.1.4	Belanja subsidi	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	73.437.156.800,00	22.214.656.800,00	51.222.500.000,00
2.1.6	Belanja bantuan sosial	1.200.000.000,00	2.350.750.000,00	-1.150.750.000,00
2.2	Belanja Modal	705.148.832.379,00	297.713.749.652,00	407.435.082.727,00
2.2.1	Belanja Tanah	0,00	1.271.296.169,00	-1.271.296.169,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	290.643.352.758	117.809.021.342,00	172.834.331.416,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	193.154.155.648,00	108.727.785.687,00	84.426.369.961,00
2.2.4	Belanja Jalan, irigasi dan jembatan	221.351.323.973,00	66.709.417.654,00	154.641.906.319,00
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	0,00	196.228.800,00	-196.228.800,00
2.2.6	Belanja aset lainnya	0,00	3.000.000.000,00	-3.000.000.000,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	7.359.950.721,63	-2.359.950.721,63
2.4	Belanja transfer	86.338.828.000,00	195.194.022.732,00	-108.855.194.732,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	29.303.164.500,00	15.298.580.727,00	14.004.583.773,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	57.035.663.500,00	179.895.442.005,00	-122.859.778.505,00
	Total Belanja	2.126.465.652.901,00	1.658.638.153.337,21	467.827.499.563,79

Sebagian besar belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi, terutama untuk belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja sosial. Sementara itu, belanja modal masih memerlukan peningkatan guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Efisiensi dalam belanja daerah perlu terus ditingkatkan agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara optimal sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, serta selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi. Pengelolaan belanja dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, dengan mempertimbangkan skala prioritas, kemampuan fiskal daerah, dan prinsip *value for money*. Secara umum, arah kebijakan belanja daerah meliputi:

- 1) Pemenuhan belanja wajib dan mengikat, seperti belanja pegawai, pembayaran Listrik, air dan layanan kantor;
- 2) Peningkatan proporsi belanja publik, khususnya belanja yang mendukung layanan dasar dan pembangunan infrastruktur yang mendukung produktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah;
- 3) Pengutamaan belanja untuk pencapaian prioritas pembangunan daerah, termasuk program unggulan kepala daerah, target kinerja RPJMD, serta prioritas nasional dan provinsi;
- 4) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan sosial;
- 5) Penguatan integrasi belanja untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan agenda lintas sektor lainnya seperti penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, dan pengurangan ketimpangan antarwilayah;
- 6) Alokasi belanja fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah, serta belanja fungsi kesehatan secara proporsional sesuai kebutuhan pelayanan dasar dan kemampuan keuangan daerah.

- 7) Pengalokasian belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total APBD, termasuk infrastruktur dasar di wilayah perdesaan yang menjadi pengungkit kesejahteraan masyarakat.
- 8) Peningkatan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, melalui pengembangan sistem penganggaran berbasis kinerja, penguatan pengawasan internal, dan digitalisasi proses perencanaan dan penganggaran.
- 9) Optimalisasi pemanfaatan dan revitalisasi aset milik daerah, termasuk pemeliharaan kantor dinas, fasilitas layanan masyarakat, serta kerja sama pemanfaatan aset strategis untuk menambah nilai ekonomi dan sosial.
- 10) Penguatan peran belanja daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan ekonomi lokal, melalui dukungan terhadap UMKM, produk dalam negeri, inovasi daerah, dan kemitraan desa-kota.
- 11) Pengembangan sumber daya aparatur daerah, melalui pelatihan, peningkatan kompetensi, serta penguatan sistem kerja berbasis kinerja dan pelayanan publik yang prima.
- 12) Alokasi pendanaan untuk hibah dan bantuan keuangan, dilakukan secara selektif, transparan, dan berbasis kinerja, serta diarahkan untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Selain efisiensi belanja, pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga harus diperketat guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan anggaran berbasis digital perlu terus dikembangkan guna meningkatkan efisiensi administrasi serta meminimalisir potensi penyimpangan. Dengan teknologi yang baik, lebih mudah untuk mengetahui ketidakwajaran yang ada. Pencapain dari tahun sebelumnya serta target di masa yang akan datang tersusun dengan baik, sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan. Pemerintah daerah juga akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan bahwa alokasi anggaran dengan kebijakan nasional, daerah selaras sehingga memaksimalkan manfaat dari berbagai program pembangunan yang bersinergi antara pusat dan daerah.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan salah satu instrumen keuangan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran serta mendukung berbagai program pembangunan yang membutuhkan tambahan sumber pendanaan. Pada tahun 2025, pembiayaan daerah Kabupaten Pangandaran terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp.457.931.242.669,21 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.196.000.000.000,00.

Penerimaan pembiayaan diperoleh dari Silpa tahun sebelumnya, pinjaman daerah penerimaan janga pendek sebesar Rp.140.000.000.000,00 dan pinjaman daerah jangka panjang sebesar Rp.276.000.000.000,00 serta penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Untuk penyelesaian utang dilakukan melalui roadmap penyehatan fiskal sebagaimana fokus pembangunan lima tahun kedepan.

Tabel 3. 10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Pangandaran

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi/Target Tahun 2025	Proyeksi/Target Tahun 2026	Proyeksi/Target Tahun 2027
1	2	3	4	5	6	7
	PEMBIAYAAN					
6.1	Penerimaan Pembiayaan					
6.1.1	SiLPA Tahun Sebelumnya	41.019.363.535,55	219.242.820.470,74	6.931.242.669,21	12.364.194.848,85	0,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	416.000.000.000,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	35.000.000.000,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	9.000.000.000,00	37.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	200.019.363.535,55	219.242.820.470,74	457.931.242.669,21	12.364.194.848,85	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan					
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan modal daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	161.000.000.000,00	36.232.000.000,00	64.960.013.000
6.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.5	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	9.000.000.000,00	16.500.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	159.000.000.000,00	166.500.000.000,00	196.000.000.000,00	36.232.000.000,00	•
	Pembiayaan Netto	41.019.363.535,55	52.742.820.470,74	261.931.242.669,21	-23.867.805.151,15	-64.960.013.000,00

Sumber: BKAD Kabupaten Pangandaran, 2025

3) Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (audited BPK)

4) Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (non-audited BPK)

5) Perubahan RKPD Tahun 2025

⁶⁾ Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 7) Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029

Tabel 3. 11 Perbandingan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

No.	Uraian	RKPD Tahun 2025	RKPD Perubahan Tahun 2025	Selisih
1	2	3	4	5
	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1	SiLPA Tahun Sebelumnya	14.783.600.000,00	6.931.242.669,21	7.852.357.330,79
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	350.000.000.000,00	416.000.000.000,00	-66.000.000.000,00
6.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0,00	35.000.000.000,00	-35.000.000.000,00
6.1.6	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	364.783.600.000,00	457.931.242.669,21	-93.147.642.669,21
				0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			0,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan modal daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	16.000.000.000,00	161.000.000.000,00	-145.000.000.000,00
6.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.5	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	0,00	35.000.000.000,00	-35.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	16.000.000.000,00	196.000.000.000,00	-180.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	348.783.600.000	261.931.242.669,21	86.852.357.330,79

Sumber utama pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah, serta penerimaan pembiayaan lainnya yang sah. Pengelolaan pembiayaan daerah harus dilakukan secara hati-hati agar tidak membebani keuangan daerah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, strategi pengelolaan pembiayaan difokuskan pada peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber pembiayaan serta pemanfaatan dana yang tersedia secara optimal, penggunaan dana dari pinjaman daerah juga perlu diarahkan pada sektor-sektor yang dapat memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan.

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada pemanfaatan pembiayaan secara efektif dan efisien guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah harus meningkatkan perencanaan dan pengelolaan pembiayaan dengan memastikan bahwa setiap penggunaan dana sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Lalu, pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) guna mendukung program pembangunan yang belum terlaksana, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran. Dalam upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah, strategi inovatif dalam pembiayaan akan terus dikembangkan, termasuk melakukan kerja sama dengan pihak swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP), hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap pinjaman langsung serta meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat serta lembaga keuangan juga perlu diupayakan dalam rangka memperoleh akses terhadap sumber pembiayaan yang lebih fleksibel dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Kabupaten Pangandaran dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun Pangandaran. Hal ini sejalan dengan kebijakan desentralisasi fiscal sejak diterapkannya otonomi daerah, dimana pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan mengembangkan wilayah otonominya sesuai dengan potensi serta sumber daya yang dimiliki. Kebijakan desentralisasi fiskal memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. Sumber-sumber pendanaan pembangunan yang dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan antara lain APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan Pinjaman Daerah. Adapun penjelasan alternatif pembiayaan pembangunan adalah sebagai berikut:

3.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi kunci dalam menghadapi keterbatasan fiskal dalam APBD. APBN sebagai suatu rencana keuangan, mengandung arti bahwa pemerintah mempunyai perencanaan terhadap pengeluaran dan penerimaan untuk untuk membiayai kepentingan negara atau pengelolaan pemerintahan. APBN digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, prioritas provinsi maupun prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 4 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
- 2) Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 4) Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
- 5) Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- 6) Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Tabel 3. 12 Alokasi APBN untuk Kabupaten Pangandaran Tahun 2023-2025

NO	Jenis APBN	2023	2024	2025
Dan	a Transfer			
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	61.127.785.502	71.433.031.000	60.937.516.000
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	527.477.779.980	536.179.445.752	563.811.307.000
3	Dana Alokasi Khusu (DAK) Fisik	33.845.756.074	64.756.443.000	33.407.985.000
4	Dana Alokasi Khusu (DAK) Non Fisik	142.930.040.493	146.789.452.595	165.276.723.000
5	Dana Insentif Daerah (DID)	34.866.264.000	-	-
6	Hibah ke Daerah	-	-	-
7	Insentif Fiskal	-	-	-

Sumber: BKAD Kabupaten Pangandaran, 2025

3.3.2 APBD Provinsi Jawa Barat

Alternatif pembiayaan yang bersumber dari APBD Provinsi diantaranya adalah bantuan keuangan. Bantuan keuangan provinsi merupakan bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemerintah kabupaten Pangandaran memiliki alternatif pendanaan Pembangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3. 13 Alokasi APBD Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Pangandaran Tahun 2023-2025

NO	Jenis APBD Provinsi	2023	2024	2025
1	Bankeu Provinsi	137.013.167.122	181.986.267.305	17.364.679.696

Sumber: BKAD Kabupaten Pangandaran, 2025

3.3.3 Alternatif Pembiayaan Lainnya

1. Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu sumber pendanaan Pemerintah oleh perusahaan atau pihak swasta sebagai upaya memberikan kontribusi dalam meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu pendanaan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang bersumber dari CSR Lembaga Keuangan adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Peningkatan kinerja program CSR dalam pembangunan Kabupaten Pangandaran ditempuh melalui perluasan keikutsertaan perusahaan dalam agenda program pembangunan Kabupaten Pangandaran serta penyelarasan program-program CSR perusahaan dengan agenda program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Pangandaran.

2. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerjasama, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. Kabupaten Pangandaran sedang berupaya menerapkan kolaborasi pendanaan penyediaan infrastruktur penyediaan air minum (PDAM) dan alat penerangan jalan (APBJ) melalui skema KPBU.

3. Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah merupakan alternatif instrumen pendanaan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan dan menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan arus kas dalam rangka belanja modal daerah serta untuk percepatan pencapaian target program pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten Pangandaran melakukan Pinjaman Daerah bertujuan untuk stabilitas fiskal daerah. Salah satu upaya yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk memperoleh pinjaman daerah adalah melalui Lembaga Keuangan atau Bank.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV

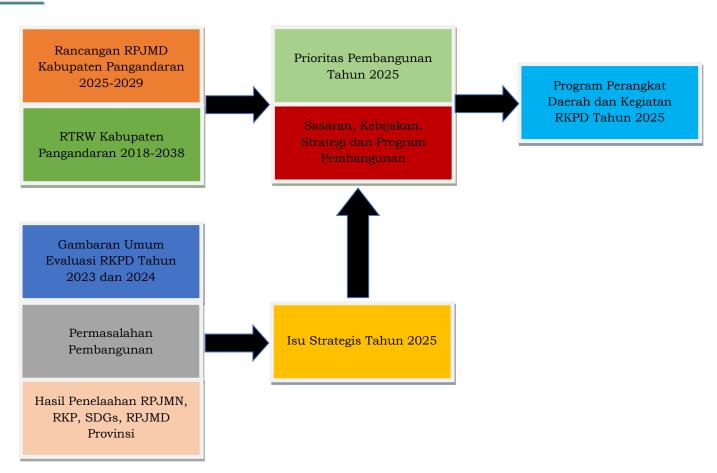
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan penyusunan prioritas pembangunan lebih diarahkan untuk mengetahui permasalahan pembangunan yang memiliki pengaruh lebih terhadap proses pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat berfungsi untuk dapat mengoptimalkan pendanaan yang bersifat terbatas agar tepat sasaran. Dalam menentukan prioritas pembangunan terlebih dahulu harus dilakukan identifikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah. Kemudian, akan diketahui semua faktor penyebab permasalahan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah itu, dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta dengan program prioritas.

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 mengacu dan memperhatikan:

- 1. Arah kebijakan dan Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2025;
- 2. Prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
- 3. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan pada Rancangan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029;
- 4. RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038;
- 5. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten;
- 6. Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024 dan 2025 Triwulan I;
- 7. Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen tahun 2025;
- 8. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/
 Sustainable Development Goals (SDGs).

Prioritas pembangunan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2025 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama Rancangan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Kerangka pikir perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.1 Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Sumber: Hasil Analisa Bappeda Kabupaten Pangandaran, diolah 2025

Pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya penerapan arah kebijakan dilakukan melalui program dan kegiatan perangkat daerah, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam rangka mewujudkan keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pangandaran turut memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025, maupun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat

Tahun 2025, serta mengacu tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2025 pada Rancangan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029.

4.1.1 Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

RKP 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025-2029, dan merupakan tahap pertama pembangunan dari pelaksanaan RPJPN 2025-2045. RKP 2025 dan RPJMN 2025-2029 ini menjadi fondasi penting dalam mencapai sasaran dan target RPJPN 2025-2045, menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya.

Berdasarkan dari visi diatas, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang terdiri atas transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola yang ditopang oleh 2 (dua) agenda landasan transformasi, yaitu supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia; dan ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda kerangka implementasi transformasi, yaitu pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta kesinambungan pembangunan.

Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing;
- 2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;

- 3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif;
- 4. Memantapkan supermasi hokum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan;
- 5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam;
- 6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tatakelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta ketahan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;
- 7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi; dan
- 8. Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

4.1.2 Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mewujudkan Visi RPJPD 2005-2025, yaitu "Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia". Adapun tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, yang sekaligus menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan sasaran:

- 1. Meningkatnya akses pendidikan masyarakat;
- 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- 3. Meningkatnya taraf hidup masyarakat;
- 4. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda;
- 5. Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk.

Tujuan 2

- 1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran:
- 2. Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan;
- 3. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan;
- 4. Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum;
- 5. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja.

Tujuan 3

Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan, dengan sasaran:

- 1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur;
- 2. Meningkatnya kualitas infrastruktur;
- 3. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman;
- 4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- 5. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana;
- 6. Meningkatnya pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan.

Tujuan 4

Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah, dengan sasaran:

- 1. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi;
- 2. Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah;

3. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

Penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 disertai dengan target indikator sebagai tolak ukur dari keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Penjabaran tujuan dan saaran pembangunan daerah Provinsi sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

NO	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			KET
				2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,74	74,14	74,39	74,71	
1.1	Meningkatnya akses	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,83	9,03	9,16	9,29	
1.1	pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,68	12,75	12,82	12,88	
1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,80	73,90	74,10	74,29	
1.2		Prevalensi Stunting	Persen	21,7	15,52	12,93	10,34	
1.3	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11.695	11.504	11.619	11.735	
1.0		Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,62	7,34	7,13	7,00	
		Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	71,74	71,37	71,75	72,13	
1.4	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,482	'	0,46	0,44	Menggantikan IDG
1.1	anak, serta pembangunan pemuda	Indeks Perlindungan Anak	Angka	65,74*	64,50	65,50	66,50	
		Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	49,67*	49,26	49,90	50,14	
1.5	Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,12	1,42	1,42	1,42	
2		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,00	5,67	5,81	5,97	

NO	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET		KET
				2023	2024	2025	2026	
	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Gini Ratio (poin)	Poin	0,425	0,394	0,383	0,370	
2.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	4,74	5,76	5,84	5,93	
	perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	4,36	4,53	4,85	5,23	
2.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	0,11	4,5	4,54	4,59	
		Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	107,45	101,67	102,64	103,61	
		Skor Pola Pangan Harapan	Poin	93,80	93,30	93,80	94,30	
2.3	Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	8,72	12,30	12,85	13,43	
2.4	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Triliun Rupiah	644,38	532,22	542,86	553,72	
		Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Persen	28,84	23,34	23,92	24,52	

NO	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			KET
		SHOME		2023	2024	2025	2026	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,44	8,01	7,88	7,76	
3	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	Indeks Williamson	Poin	0,696	0,667	0,666	0,664	
3.1	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur	Tingkat Konektivitas	Persen	59,62	57,00	60,00	63,00	
3.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen	N/A	75,91	76,57	77,28	
3.3	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Persen	54,17	54,47	55,24	55,91	
3.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	64,77	66,13	67,00	67,78	
2.5	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (poin)	Persen	5,49	7,11	7,72	7,98	
3.5		Indeks Risiko Bencana	Poin	123,16	129,00	128,00	127,00	

NO	TUJUAN & SASARAN	& SASARAN INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		KONDISI TARGET			KET	
				2023	2024	2025	2026	
3.6	Meningkatnya pemerataan pembangunan di wilayah Pedesaan	Indeks Desa Membangun	Poin	0,77	0,77	0,78	0,79	
	Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang didukung oleh	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	Poin	83,34*	82,14	82,96	83,79	
4	inovasi daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	A (93,08)	A *	A	A	
4.1	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas Lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	Poin	83,34*	82,14	82,96	83,79	
4.2	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A (93,08)	A	A	A	
4.3	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	Poin	74,77 (Sangat Inovatif)	69,65 (Sangat Inovatif)	70,15 (Sangat Inovatif)	70,65 (Sangat Inovatif)	

Sumber: RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026



^{*)} menggunakan data capaian tahun 2022

^{**)} menggunakan data capaian triwulan III 2023/Maret 2023

^{***)} menggunakan data Desember 2023 (data tahunan belum ada)

^{****)} mulai tahun 2023 menggunakan data yang bersumber dari OJK

Seluruh sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 sesuai tabel di atas dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun selama periode RPD Provinsi Jawa Barat.

4.1.3 Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Seperti yang tercantum didalam Rancangan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 dijelaskan secara terperinci dalam tabel mengenai visi dan misi Kabupaten Pangandaran dibawah ini.

Tabel 4.2 Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029

Visi	Misi
Pembangunan Yang Berkelanjutan	Misi 1: Mempermudah Akses dan
Untuk Mewujudkan Wisata	Meningkatkan Kualitas Layanan
Pangandaran Mendunia dengan	Kesehatan
Menitikberatkan pada Pendidikan	Misi 2: Meningkatkan Mutu dan
Agama dan Karakter	Kualitas Pendidikan
	Misi 3 : Meningkatkan Aksesibilitas
	dan Kualitas Infrastruktur yang
	Berkelanjutan
	Misi 4: Mewujudkan Penataan
	Pariwisata Yang Aman, Nyaman,
	dan Berkesinambungan
	Misi 5 : Meningkatkan Kualitas
	Keimanan, Ketaqwaan, Dan
	Nasionalisme Melalui Penguatan
	Pendidikan Agama Dan Wawasan
	Kebangsaan
	Misi 6: Mewujudkan Kemandirian
	Ketahanan Pangan
	Misi 7: Meningkatkan Birokrasi
	Yang Bersih Dan Melayani
	Misi 8: Meningkatkan
	Kesejahteraan Sosial dan
	Perekonomian, serta Penguatan dan
	Pemberdayaan Desa

Sumber: Rancangan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029

Keselarasan antara misi, strategi, dan arah kebijakan pembangunan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan memiliki arah yang jelas dan terintegrasi. Misi pembangunan mencerminkan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai, sementara strategi menjadi langkahlangkah utama yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Arah kebijakan kemudian berperan sebagai panduan operasional yang lebih spesifik dalam implementasi setiap strategi.

Tabel 4.3 Keselarasan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan
berkualitas dan	anak usia	mampu yang	- Penguatan
berdaya saing	sekolah	berprestasi	pendidikan non
		- Mendorong	formal
		pelaksanaan	- Pemerataan dan
		pendidikan non	peningkatan kualitas
		formal yang lebih	tenaga pendidik
		baik	
		26.1.1.1	- Penguatan mutu dan
		- Melakukan	daya saing
		pemetaan kebutuhan	pendidikan
		pendidik dan	- Penerapan
		tenaga	pendidikan karakter
		kependidikan	
		secara cermat	
		3.5 1 11	
		- Meningkatkan	
		kualitas pendidikan	
		dalam daerah	
		serta	
		meningkatkan	
		promosi satuan	
		pendidikan dan	
		mewujudkan	
		satuan	
		pendidikan	
		unggulan	
		- Menerapkan	
		pendidikan	
		karakter untuk	
		memperkuat	
		kualitas	
		pendidikan	
Misi 3: Meningkatk	an Aksesibilitas	dan Kualitas Infrastruk	tur yang Berkelanjutan
Meningkatkan	meningkatnya	- Melakukan	- Mendorong
akses masyarakat	cakupan	Pembangunan	pembangunan
terhadap	layanan	Infrastruktur	infrastruktur melalui
infrastruktur	infrastruktur	melalui skema	skema pembiayaan
berkualitas dan		pembiayaan	inovatif
berkelanjutan		alternatif	- Pengelolaan sampah
		- Membangun dan	yang efektif dan
		meningkatkan	berkelanjutan
		Tempat	Č
		Pengolahan	- Peningkatan sistem
		Sampah Terpadu	pengelolaan air limbah dan kualitas
		(TPST) dan	air
		TPS3R	an
		- Membangun dan	- Optimalisasi
		meningkatkan	pengelolaan air
		Instalasi	minum dan regulasi
		Pengolahan Air	air tanah
		Limbah (IPAL)	- Optimalisasi
		kawasan	kelembagaan terkait
		- Melakukan	perumahan dan
		Optimalisasi	permukiman
		•	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan
TUJUAN	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	pengelolaan air minum, penyusunan perda air tanah, dan peningkatan kesadaran penggunaan air minum aman perpipaan kepada masyarakat - Melakukan Optimalisasi kelembagaan terkait perumahan dan permukiman untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman - Menyediakan layanan transportasi antar destinasi wisata - Mendorong peningkatan aksesibilitas menuju dan dari pangandaran - meningkatkan akses antar	- Penyediaan layanan transportasi yang efisien, - peningkatan infrastruktur transportasi - manajemen lalu lintas pada pusat-pusat kegiatan
	moningly three	pusat kegiatan - Melakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi pada wilayah perkotaan dan pariwisata serta optimalisasi retribusi parkir	Dambandanaan
	meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Memfasilitasi dan mendukung Bank Sampah untuk bekerjasama dengan stakeholder guna mengolah sampah organik	 Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan Penguatan regulasi persampahan optimalisasi konservasi wilayah untuk mendukung ekosistem yang lebih

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan				
TUJUAN	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	- Melakukan Upaya pengurangan dan penanganan sampah dari sumbernya melalui peningkatan kesadaran masyarakat - Meningkatkan kualitas dan Penegakkan hukum lingkungan hidup serta optimalisasi pengaturan konservasi wilayah - Melakukan optimalisasi sistem peringatan dini bencana (early warning system) - Meningkatkan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi dan peringatan dini terpadu berbasis masyarakat - Menyelaraskan penataan ruang dan pengembangan informasi geospasial berbasis risiko bencana untuk pembangunan	sehat dan berkelanjutan optimalisasi infrastruktur persampahan				
Misi 4: Mewujudka	 n Penataan Pariw	wilayah visata yang Aman, Nyan	nan, dan				
Berkesinambungan							
Mewujudkan daya saing pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya manfaat pariwisata terhadap perekonomian daerah	- Meningkatkan pengelolaan destinasi wisata berbasis ekowisata untuk mengurangi degradasi lingkungan dan adaptasi	- Pengelolaan destinasi wisata berbasis ekowisata dan pengurangan risiko bencana				

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan					
		terhadap perubahan iklim - Meningkatkan	 Peningkatan promosi digital dan branding wisata 					
		promosi digital dan branding melalui event dan kolaborasi dengan platform teknologi untuk menarik lebih banyak wisatawan	 Pengembangan ekonomi kreatif sebagai daya tarik wisata Penguatan SDM Kepariwisataan dan Infrastruktur Ramah Lingkungan 					
		- Mengembangkan ekonomi kreatif sebagai daya tarik wisata	- Pelestarian budaya lokal sebagai identitas wisata					
	Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan	- Meningkatkan pemanfaatan potensi daya tarik wisata untuk mengimplementa sikan sistem mitigasi bencana yang terintegrasi dengan pengelolaan destinasi ramah lingkungan - Mengembangkan kompetensi SDM kepariwisataan dan eco-friendly infrastructure yang aksesibel - Menerapkan teknologi inovasi dalam layanan dan fasilitas pariwisata - Mengembangkan atraksi wisata yang unik dan autentik berbasis potensi daya tarik dan karakteristik wilayah						
	Meningkatnya penguatan identitas budaya dan warisan daerah	- Memanfaatkan komunitas seni untuk memperkenalkan budaya lokal ke kancah internasional						

THILLIAN	SASADAN	STRATECI	Arch Kobiiokon
TUJUAN	SASARAN	- Mengintegrasika n tradisi lokal dalam produk wisata untuk melawan pergeseran budaya - Mengadakan festival budaya secara rutin yang melibatkan masyarakat lokal dan wisatawan - Menginisiasi kerja sama dengan berbagai stakeholder untuk pembangunan dan revitalisasi infrastruktur seni dan budaya - Mengembangkan sistem pendokumentasi an budaya lokal yang berkelanjutan dan berbasis teknologi digital untuk memperkuat identitas daerah	Arah Kebijakan
_		- Memberdayakan masyarakat untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat - Mengorganisir kegiatan sosial lintas agama, seperti bakti sosial, gotongroyong, dan acara budaya bersama yang dapat mempererat hubungan antar umat beragama	- Pemberdayaan, masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban - Penguatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama - Penguatan peran lembaga keagamaan dalam masyarakat - Memperkuat penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan
		- Menguatkan peran lembaga keagamaan (tempat peribadatan) terdekat dengan masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan	- Meningkatkan peran organisasi masyarakat dalam pembangunan
	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	 Memperkuat penerapan nilai- nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat Meningkatkan peran organisasi masyarakat dalam pembangunan 	
Misi 6: Mewujudka	n Kemandirian K	etahanan Pangan	
Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan stabilitas pangan secara merata serta berkelanjutan	Meningkatnya tingkat Ketahanan Pangan Daerah	 Menerapkan sistem pertanian presisi untuk pertanian berkelanjutan Peningkatan diversifikasi pangan dan inovasi teknologi pasca panen untuk meningkatkan nilai tukar petani dan nelayan Membangun dan merevitalisasi sarana dan prasarana pertanian, serta memperpendek rantai distribusi Meningkatkan Penguatan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam pengembangan sektor pertanian, perikanan, peternakan dan kelautan untuk mendukung 	 Penerapan teknologi pertanian modern Diversifikasi pangan Perbaikan infrastruktur Penguatan kolaborasi antar stakeholder

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan				
		ketahanan					
		pangan daerah					
		- Menyediakan					
		pupuk yang lebih					
		stabil dan					
		mendorong					
		penggunaan pupuk organik					
		pupuk organik					
		- Mendorong					
		regenerasi petani dan nelayan					
		melalui edukasi					
		dan insentif					
Misi 7: Maningkatk	an Rirobrasi Var	 ng Bersih dan Melayani					
misi 7. meningkatk	an Diiokiasi Tai	ig Dersin dan Melayani					
Mewujudkan tata	Meningkatnya	- Meningkatkan	- Penguatan sistem				
kelola	Akuntabilitas	kompetensi dan	merit				
pemerintahan yang	Kinerja	kinerja ASN melalui sistem	- Penguatan				
baik, responsif, bersih dan inovatif	Instansi	meritokrasi	pengawasan dan				
bersin dan inovatii	Pemerintah Daerah		akuntabilitas dalam				
	meningkatkan	- Meningkatkan	penyelenggaraan				
	pelayanan	kolaborasi dan sinergi dengan	pelayanan publik				
	publik yang	berbagai	- Optimalisasi				
	baik dan	stakeholder	Reformasi Birokrasi				
	profesional	dalam	dan Transformasi				
		melakukan	Digital (SPBE & Pusat Data)				
		pengawasan	,				
		penyelenggaraan pelayanan publik	- Penguatan Integritas				
			dan Transparansi ASN dalam				
		- Mengoptimalisasi	Pelayanan Publik				
		penerapan Reformasi	· ·				
		Birokrasi	- Meningkatkan				
			Kemandirian Fiskal dan Optimalisasi				
		- Mengoptimalisasi	PAD				
		penerapan SPBE dan					
		pembangunan	- Inovasi dalam Pengelolaan				
		pusat data	Keuangan dan				
		- Mengoptimalisasi	Pembangunan				
		kolaborasi	Daerah				
		pentahelix	- Penerapan Inovasi				
	meningkatnya	- Meningkatkan	dan Hasil Penelitian				
	tata kelola	sistem	dalam Pembangunan				
	pemerintahan	pengawasan	Daerah				
	yang bersih	internal	- Optimalisasi				
	dan	pemerintah	Kolaborasi				
	berintegritas	daerah	Pentahelix untuk				
		- Meningkatkan	Inovasi				
		Kesadaran dan	Pembangunan Daerah				
		pemahaman ASN	Dacian				
		tentang nilai- nilai integritas					
		mai megnas					

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan
		dalam pelayanan publik	
		- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan informasi secara terbuka melalui website atau aplikasi	
	meningkatnya kinerja tata kelola keuangan daerah	- Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal	
		- Meningkatkan pembiayaan inovatif dan kolaboratif untuk pemerataan infrastruktur daerah	
		- Meningkatkan digitalisasi tata kelola keuangan daerah	
		- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	
		- Mengoptimalisasi peran BUMD dalam pembangunan	
	meningkatnya sistem inovasi daerah dan kolaborasi lintas sektor	- Meningkatkan akurasi data untuk pembangunan presisi melalui pemanfaatan forum satu data	
		- Meningkatkan Berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan solusi inovatif - Menerapkan	
		inovasi dan hasil	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan
		kelitbangan dalam pembangunan daerah	
Misi 8: Meningkatk Dan Pemberdayaan	_	n Sosial dan Perekonon	nian, Serta Penguatan
Meningkatkan perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan kemandirian desa	Meningkatnya perekonomian wilayah Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	- Meningkatkan kuantitas dan kualitas wirausaha baru - Meningkatkan Literasi Digital dan Kapasitas SDM Pelaku UMKM - Menerapkan digitalisasi Produk dan Layanan UMKM - Menarik investor melalui promosi dan mempermudah prosedur investasi - Mendorong peningkatan produksi sektor unggulan dan peningkatan nilai tambah produk - Merevitalisasi sarana dan prasarana distribusi perdagangan - Mengentaskan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan terintegrasi serta akurasi data antar stakeholder pengampu	- Pengentasan kemiskinan - Pemberdayaan perempuan - Peningkatan keterampilan kerja - Pengutan keluarga - Optimalisasi ekonomi berbasis desa melalui inovasi digital serta tata kelola yang baik
		- Meningkatkan Pelibatan dan pemberdayaan perempuan pada sektor-sektor perekonomian	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan
		- Memberikan pelatihan keterampilan vokasi dan keahlian kerja yang relevan dengan kebutuhan industri dan lapangan pekerjaan	
		- Meningkatkan Pemberdayaan dan peningkatan peran keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera	
		- Meningkatkan SPM Sosial serta kualitas dan kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	
	Masyarakat Desa yang berdaya saing	- Mendorong program Satu Desa Satu Produk	
		- Mendorong pengembangan potensi ekonomi desa melalui pemanfaatan akses teknologi digital dan peningkatan kapasitas BUMDES	
		- Meningkatkan kualitas kinerja dan tata kelola pemerintah desa	

Sumber: Rancangan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029

Dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD maka dibutuhkan konsistensi dari penjabaran visi dan misi ke dalam tujuan dan sasaran sebagai tolak ukur yang menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam visi dan misi kepala daerah. Di bawah ini dijabarkan konsistensi penurunan visi dan misi ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan berserta capaian target.

Tabel 4.4 Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029

Misi	No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target						
MISI	NO	rujuan/Sasaran		Sacuali	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 1: Mempermudah Akses dan Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan	1	Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata	Indeks Kesehatan	Angka	84.78	85.14	85.49	85.85	86.20	86.55	86.91	
	1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75.11	75.34	75.57	75.80	76.03	76.26	76.49	
Misi 2: Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan	2	Mewujudkan SDM Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pendidikan	Angka	61.19	61.62	62.06	62.5	62.94	63.39	63.84	
	2.1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Capaian SPM pendidikan	Nilai	80	82	84	86	88	90	92	

Misi	No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Target							
11202		rujuur, susurur		Dutuuii	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 3: Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur yang Berkelanjutan	3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	85.70	85.88	85.96	86.04	86.12	86.20	86.28	
	3.1	meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	persentase cakupan layanan infrastruktur	Persen	NA	38.10	40.47	42.80	47.64	49.98	52.14	
	3.2	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Indeks Konektivitas Wilayah	Angka	1.73	1.75	1.77	1.79	1.81	1.83	1.85	
	3.3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	58.99	66.01	66.26	66.51	67.77	67.02	67.27	
	3.4	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	Indeks resiko bencana	Angka	133.13	131.13	129.13	127.13	125.13	123.13	121.13	
Misi 4: Mewujudkan Penataan Pariwisata Yang Aman, Nyaman, dan Berkesinambungan	4	Mewujudkan daya saing pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Pariwisata	Angka	N/A	0.2	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	

Misi	No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal			Tar	get		
172101	1.0	r aj aurr, Suburur		Dutuuii	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	4.1	Meningkatnya Kualitas Destinasi Pariwisata melalui Tata Kelola yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Wisatawan (IKW)	Angka	N/A	70	72	74	77	80	82
	4.2	Meningkatnya manfaat pariwisata terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	10.13	10.36	10.43	10.69	11.34	11.40	11.47
	4.3	Meningkatnya penguatan identitas budaya dan warisan daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	N/A	52	53	55	57	59	61
Misi 5: Meningkatkan Kualitas Keimanan, Ketaqwaan, Dan Nasionalisme Melalui Penguatan Pendidikan Agama Dan Wawasan Kebangsaan	5	Mewujudkan ketertiban dan ketentraman sosial dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama serta kehidupan berkebangsaan yang partisipatif	Indeks Kesalehan Sosial	Angka	81.94 (2023)	82.14	82.34	82.54	82.74	82.94	83
	5.1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan kebangsaan dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	NA	73.09	73.78	74.47	75.16	75.85	76

Misi	No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal			Tar	get		
112102	110			Dutuuii	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	5.2	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	Angka	NA	63.7	67.7	71.7	75.7	79.7	83.7
Misi 6: Mewujudkan Kemandirian Ketahanan Pangan	6	Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan stabilitas pangan secara merata serta berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	83.86	83.96	84.06	84.16	84.26	84.36	84.46
	6.1	Meningkatnya tingkat Ketahanan Pangan Daerah	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	52.22	5.12	5.02	4.92	4.82	4.72	4.62
Misi 7: Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani	7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, bersih dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	73.72	74.08	74.26	74.44	74.62	74.79	74.97
	7.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	LHE AKIP Pemda	Angka	67.98	67.99	72.39	76.79	81.20	85.60	89.99

Misi	No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal			Tar	get		
112.52	1.0	rajaan/Sasaran	manacor innerja	Sacaan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	7.2	meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas	Indeks Integritas Nasional	Angka	65.66	71.85	72.37	72.90	73.42	73.94	74.46
	7.3	meningkatnya kinerja tata kelola keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	57.6 (2023)	58.8	59.69	60.51	61.34	62.16	62.98
	7.4	meningkatnya sistem inovasi daerah dan kolaborasi lintas sektor	Indeks daya saing daerah	Angka	3.65	3.87	3.90	3.93	3.95	3.98	4.01
Misi 8: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian, serta Penguatan dan Pemberdayaan Desa	8	Meningkatkan perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan kemandirian desa	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.12	6.00	6.03	6.07	6.11	6.15	6.18
	8.1	Meningkatnya perekonomian wilayah	Kontribusi Sektor Unggulan Terhadap PDRB	persen	NA	35.51	35.55	35.65	35.83	35.88	35.98
	8.2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8.75	8.20	7.80	7.39	6.99	6.58	6.18
	8.3	Masyarakat Desa yang berdaya saing	Indeks Desa Membangun / Indeks Desa	angka	0,8413 (2023)	0.8613	0.8713	0.8813	0.8913	0.9013	1.00

Sumber: Rancangan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029

Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2025 tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai penjabaran Rancangan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029. Dalam pelaksanaannya, sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional tahun 2025 dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun dari dukungan pemerintah kabupaten, serta dengan mendorong partisipasi dari masyarakat, dunia usaha, media dan akademisi.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Sebagai sebuah daerah yang otonom, Kabupaten Pangandaran diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang telah disepakati bersama antara pemerintah Kabupaten dengan para pemangku di Kabupaten Pangandaran. Kinerja penyelenggaraan kepentingan pemerintah daerah mencakup seluruh perangkat daerah yang melaksanakan tugasnya dengan melihat pencapaian keberhasilan melalui indikator indikator yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh perangkat daerah terkait. Untuk melihat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah sesuai dengan aspek pembangunan Kabupaten Pangandaran maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran

			BASELINE			TARGE1	TAHUN			
NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	КЕТ.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ASPE	K GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Ketahanan Pangan		N/A	83.96	84.06	84.16	84.26	84.36	84.46	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	N/A	5.12	5.02	4.92	4.82	4.72	4.62	
3	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	27.47	31.10	34.72	38.35	41.98	45.60	49.23	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH	58.99	60,49	61,99	63,49	64,99	66,49	67,99	
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT	6.54	10.12	13.69	17.27	20.84	24.42	27.99	
6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Liter/Kg	27.62	31.24	34.86	38.48	42.1	45.72	49.33	
7	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	100	100	100	100	100	100	100	
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	ton	253223.76	300563.35	347902.93	395242.52	442582.10	489921.69	537261.27	
9	Indeks Risiko Bencana	poin	135.00	133.25	131.50	129.75	128.00	126.25	124.50	
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0.61	0.60	0.59	0.58	0.57	0.56	0.55	
11	Indeks Kapasitas Daerah	indeks	0.7	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	
ASPE	K KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	N/A	3	6,00	6,03	6,07	6,11	6,15	
2	Tingkat Kemiskinan	%	7.43-8.2	7.06-7.83	6.70-7.46	6.33-7.08	5.97-6.71	5.60-6.34	5.23-5.97	
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	35.65	38.07	40.54	43.01	45.48	47.95	50.41	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka		1.58	1.41	1.40	1.39	1.38	1.37	1.36	
5	Indeks Gini	angka	N/A	3.37	3.35	3.33	3.31	3.29	3.27	
6	Indeks Pembangunan Manusia	angka	71.03	71.53	72.03	72.53	73.03	73.53	74.03	
7	Usia Harapan Hidup	tahun	75.28	754,885	75,697	759,055	76,114	763,225	76,531	
9	Prevalensi Stunting	%	2.23	2.13	2.03	1.93	1.83	1.73	1.63	
10	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	tahun	8.24	8.34	8.45	8.55	8.65	8.76	8.86	
11	Harapan Lama Sekolah	tahun	12.36	12.43	12.49	12.56	12.62	12.69	12.75	
2	Indeks Numerasi	indeks	N/A	49	49,55	50,1	50,65	51,2	51,75	

			BASELINE			TARGE1	TAHUN			
NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	кет.
3	Indeks Literasi	indeks	N/A	62	62,4	62,8	63,2	63,6	64	
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	98.46	98.54	98.61	98.69	98.77	98.85	98.92	
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	skor	N/A	73,09	73,78	74,47	75,16	75,85	76	
20	Indeks Ketimpangan Gender	poin	0,4	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34	
ASPE	K DAYA SAING DAERAH									
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	5.13	5.22	5.32	5.41	5.5	5.6	5.69	
2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	10.36	10.43	10.49	10.56	10.62	10.69	10.75	ŀ
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	25	26	27	28	29	30	31	
4	Indeks Inovasi Daerah	skor	43.03	43.88	44.73	45.58	46.42	47.27	48.12	
5	Indeks Ekonomi Hijau	Rupiah/ Jiwa	46.27	47.36	48.45	49.53	50.62	51.71	52.80	
7	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	22.09	22	22	22	22	22	22	
8	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	1	2	3	4	5	6	7	
9	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur		85.8	85.88	85.96	86.04	86.12	86.2	86.28	
10	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	58.09	60.19	62.28	64.38	66.47	68.57	70.66	
11	Persentase Desa Mandiri	%	N/A	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	100	
12	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0.7	0.74	0.78	0.82	0.86	0.9	0.94	
13	Tingkat Inflasi	%	6.15	5.95	5.75	5.55	5.35	5.15	4.95	
ASPE	K PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Hukum	poin	58	59	60	61	62	63	64	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	angka	3,52	3.53	3.58	3.63	3.68	3.73	3.78	
3	Indeks Pelayanan Publik	angka	4,5	4,525	4,55	4,575	4,6	4,625	4,65	
4	Indeks Integritas Nasional	%	N/A	71,85	72,37	72,90	73,42	73,94	74,46	
5	Persentase Penegakan Perda	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
6	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	angka	N/A	63,7	67,7	71,7	75,7	79,7	83,7	
7	Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	angka	0,28	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,39	
8	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3.65	3,87	3,90	3,93	3,95	3,98	4,01	
INDI	KATOR KINERJA KUNCI	•			•	•	•	•	•	•
Urus	an Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelay	anan Dasar								
Pend	idikan									



			BASELINE			TARGET	TAHUN			
NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	КЕТ.
1	Harapan Lama Sekolah	Angka	12,06	12,31	12,41	12,51	12,61	12,71	12,81	
2	Persentase kelulusan siswa	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Rasio jumlah guru dengan jumlah siswa pada tingkat Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio	N/A	1:12	1:11	1:11	1:11	1:10	1:10	
4	Persentase Siswa yang menggunakan bahasa ibu dengan benar	%	N/A	95%	95,20%	95,40%	95,60%	95,80%	96,00%	
Kese	hatan									
1	Persentase cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	99,7	99,78	99,86	99,89	99,92	99,95	99,98	
2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	2,23	2,13	2,03	1,93	1,83	1,73	1,63	
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	96,86	91,86	86,86	81,86	76,86	71,86	66,86	
4	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	6,2	6	5,8	5,6	5,4	5,2	5	
5	Cakupan Pelayanan Kesehatan Esensial	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Terakreditasi Paripurna	%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	%	90	91	92	93	94	95	96	
8	Persentase Izin Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang tertangani	%	N/A	90	91	92	93	94	95	
9	Persentase penerapan PHBS	%	84,67	84,7	84,75	84,8	84,85	84,9	85	
10	Persentase Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		80%	80%	84%	88%	92%	96%	100%	
Peke	rjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	N/A	81.44%	83.04%	84.64%	86.24%	87.84%	90.00%	
2	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	60	63	66	69	72	75	78	
3	Rumah tangga dengan akses air minum aman	%	60%	65	66,3	67,63	68,98	70,36	71,77	
4	Persentase terbangunnya sarana persampahan	%	N/A	8%	10%	11%	13%	44%	46%	
5	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	N/A	6,54	10,3	14,07	17,83	21,59	25,36	
6	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	N/A	10%	10,5%	11,0%	13,0%	15,0%	17,0%	
7	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Regulasi	%	N/A	50	51	52,02	53,06	54,12	55,2	
8	Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	N/A	75	76,5	78,03	79,59	81,18	82,81	



			BASELINE			TARGET	TAHUN			
NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	кет.
9	Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	%	38,04	43,04	48,04	53,04	58,04	63,04	68,04	
Sosia	1									
1	Persentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	
2	Persentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	%	N/A	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
3	Persentase Keluarga Miskin yang Meningkat Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
4	Persentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di Kelola	%	100	100	100	100	100	100	100	
Kete	nteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan l	Masyarakat								
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	%	NA	16	20	22	24	28	32	
3	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	NA	80	90	95	100	100	100	
4	Persentase penanganan pasca bencana	%	NA	100	100	100	100	100	100	
5	Response time	Menit	N/A	25	22	19	16	13	10	
Perur	nahan dan Kawasan Permukiman									
1	Persentase Luasan Kawasan Permukiman yang ditangani	%	N/A	41,91	44,12	46,32	48,53	50,73	52,94	
2	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	N/A	56,95%	56,98%	57,03%	57,08%	57,18%	61,18%	
3	Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Satuan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	N/A	50	52,5	55,13	57,88	60,78	63,81	
Urusa	n Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan	Pelayanan l	Dasar							
Tena	ga Kerja									
1	Persentase Dokumen RTK yang Diselesaikan	%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

			BASELINE			TARGET	TAHUN			
NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	КЕТ.
2	Persentase peserta pelatihan yang kompeten	%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Tenaga Kerja yang diserap	%	70%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
4	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang ditangani	%	90%	100%	100	100	100	100	100	
Trans	smigrasi									
1	Persentase Masyarakat yang Memahami Program Transmigrasi	%	0%	0	80%	0%	80%	0	80%	
Pemb	erdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
2	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	963	968	973	978	983	988	993	
3	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,04	90,94	91,85	92,77	93,7	94,63	95,58	
5	Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang terkelola dan valid	%	80	81,6	83,23	84,9	86,59	88,33	90,09	
6	Persentase PEKKA yang mendapatkan pendampingan	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
Pang	an									
1	Jumlah desa yang memiliki cadangan pangan pemerintah desa	Jumlah	N/A	2 Desa	4 Desa	6 Desa	8 Desa	10 Desa	12 Desa	
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	94,93	94,96	95	95,1	95,2	95,3	95,4	
3	Persentase desa rentan rawan pangan	%		5%	4%	3%	2%	1%	1%	
4	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	%	89,55%	80%	83%	86%	89%	92%	95%	
Perta	nahan									
1	Persentase sengketa tanah yang terselesaikan	%	N/A	10	20	30	40	50	60	
2	Cakupan Penggunaan Tanah Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan pelaksanaan redistribusi tanah	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase tata kelola administrasi pertanahan	%	N/A	5	25	50	75	100	100	
Lingl	rungan Hidup									
1	Persentase kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	%	N/A	30,50%	31,50%	32,50%	33,50%	34,50%	35,50%	



			BASELINE			TARGE1	TAHUN			
NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
2	Ketaatan Terhadap Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	20%	21,43%	35,71%	50,00%	64,28%	78,57%	100%	
3	Persentase Jumlah kegiatan dan/atau usaha dilakukan pengawasan yang memiliki izin lingkungan PPLH PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda	%	72,00%	80%	85%	87,50%	88,90%	90%	90,90%	
4	Persentase Limbah B3 yang dikelola	%	N/A	5	10	15	20	25	30	
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	26,0%	27,6%	30,0%	40,0%	50,0%	60,0%	70,0%	
6	Persentase Kasus Yang Ditangani Pemda	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
7	Persentase Program Penghargaan yang di ikuti	%	N/A	25	50	75	100	100	100	
8	Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	%	N/A	2,87%	6,12%	9,37%	12,62%	15,87%	19,12%	
Adm	nistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sma	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Data Kependudukan yang dikelola secara Elektronik	%	N/A	75	100	100	100	100	100	
Pemi	perdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Persentase penataan desa	%	N/A	65%	66%	67%	68%	69%	70%	
2	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	%	N/A	16%	16,20%	16,40%	16,60%	17,10%	17,60%	
3	Persentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	%	65%	65%	65,50%	66,00%	66,50%	67,00%	67,50%	
4	Persentase Lembaga Kemasyarakat Desa yang aktif	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
Peng	endalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Persentase Penyediaan Data Keluarga dan Data Program Bangga Kencana	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase peserta KB aktif	%	N/A	80	82	84	86	88	90	
3	Persentase Peningkatan Partisipasi Keluarga dalam Poktan	%	N/A	50	55	60,5	66,55	73,21	80,53	
Perh	ubungan									



			BASELINE			TARGET	TAHUN			
NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	кет.
1	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten	%	N/A	25	30	36	43,2	51,84	62,21	
Kom	unikasi dan Informatika	•			•					
1	Indeks SPBE	Indeks	3,52	3.53	3.58	3.63	3.68	3.73	3.78	
2	Persentase tata kelola layanan informasi publik	%	60,00%	60,00%	61%	62,00%	63%	64%	65%	
3	Persentase tata kelola komunikasi publik	%	60%	60%	62%	63%	64%	65%	66%	
Kope	rasi, Usaha Kecil, dan Menengah				•					
1	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	24,25%	0	25%	26%	27%	28%	30%	
2	Persentase usaha mikro yang naik kelas	%	0,01%	0,01%	0,02%	0,03%	0,04%	0,05%	0,10%	
3	Persentase SDM pengelola koperasi yang bersertifikat	%	6,50%	0	7,60%	8,70%	9,70%	10,80%	11,90%	
4	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	50,60%	51,00%	52,00%	53,00%	54,00%	55,00%	56,00%	
Pena	naman Modal									
1	Persentase Peningkatan Pengemban gan Iklim Penanaman Modal	%	N/A	1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	
2	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal	%	10%	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	
3	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	%	10	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	
4	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	%	100	25	25	25	25	25	25	
5	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	
Kepe	mudaan dan Olah Raga									
1	Persentase pemuda yang aktif berorganisasi	%	N/A	10%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	
2	Jumlah atlet olahraga	Orang	N/A	50	60	70	80	90	100	
3	Persentase pemuda yang aktif dalam kepramukaan	%	N/A	10	12	14	16	18	20	
Persa	ndian									
1	Persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman	%	35	35%	40%	45%	50%	55%	60%	
Stati	stik									
1	Persentase publikasi data statistik sektoral	%	40	40%	45%	50%	55%	60%	65%	

		G 1 m 1 1 1 1	BASELINE			TARGET	TAHUN			
NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	кет.
Kebu	dayaan									
1	Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	%	100	100	100	100	100	100	100	
Perpu	ustakaan		1							
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	19	19	19,95	20,24	20,53	20,82	21,11	
2	Persentase Peningkatan Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang dilestarikan	%	10	10	11	12	13	14	15	
Kears	sipan									
1	Persentase arsip yang dikelola	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Nilai LAKE Kabupaten/Kota	Nilai	89,29	89,29	100	100	100	100	100	
Urusa	an Pemerintahan Pilihan									
Kelaı	ıtan dan Perikanan									
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1900 Ton	1900 Ton	1905 Ton	1910 Ton	1915 Ton	1920 Ton	1925 Ton	
2	Persentase Penanganan Laporan Tindak Pelanggaran di Sektor Perikanan	%	N/A	0	50%	60%	70%	80%	90%	
3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	312 Ton	320 Ton	328 Ton	336 Ton	344 Ton	352 Ton	360 Ton	
4	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	900 Ton	920 Ton	940 Ton	960 Ton	980 Ton	1000 Ton	1020 Ton	
Pariw	risata									
1	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	-15,72%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	
2	Lama kunjungan wisatawan	Hari	1,84	1,85	1,95	2,05	2,15	2,25	2,35	
3	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dan dilindungi	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
Perta	nian									
1	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	215564,17 Ton	218797,63 Ton	222079,59 Ton	225410,79 Ton	228791,95 Ton	232223,83 Ton	235707,18 Ton	
2	Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	%	80	1	1	1	1	1	1	
3	Jumlah Produksi Daging	Ton	4595,78 Ton	5.285,94	5.312,35	5.338,90	5.365,57	5.392,38	5.419,33	
4	Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	На	486	1.675,00	1.805,00	1.910,00	2.240,00	2.345,00	2.550,00	
5	Persentase Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan	%	N/A	30	30	35	35	40	40	



			BASELINE			TARGET	TAHUN			
NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	кет.
6	Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani	%	9,94	10	10	10	10	10	10	
Perda	agangan									
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	19,23%	-	-	19%	19%	19%	19%	
ფ	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	78%	81%	86%	90%	90%	90%	100%	
4	Ekspor barang dan jasa (%PDRB)	% PDRB	N/A	-	-	3	4	5	6	
5	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	23,39	35%	40%	45%	50%	55%	100%	
6	Persentase penggunaan produk lokal oleh pemerintah daerah	%	77	100	100	100	100	100	100	
Perin	dustrian									
1	Persentase pertumbuhan jumlah pelaku industri di dalam sentra	%	0	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
2	Persentase industri kecil dan menengah yang berizin	%	100	100	100	100	100	100	100	
ფ	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Unsu	r Penunjang Urusan Pemerintahan									
Pere	ncanaan									
1	Capaian Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	%	N/A	80	85	90	95	98	100	
2	Persentase perangkat daerah yang memiliki keselarasan program RPJMD dan RKPD	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase perangkat daerah yang memiliki konsistensi perencanaan dan penganggaran	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Keua	ngan									
1	Indeks kapasitas fiskal daerah	Indeks	Rendah (0,94)	Rendah (1)	Rendah (1,05)	Sedang (1,141)	Sedang (1,2)	Sedang (1,3)	Tinggi (1,378)	
2	Persentase Capaian kualitas pengelolaan kas daerah	%	N/A	25	30	35	40	45	50	
3	Cakupan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai SAPausahaan Keuangan Daerah	%	90%	90	95	100	100	100	100	

			BASELINE			TARGE1	TAHUN			
NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	кет.
4	Persentase pengelolaan BMD yang tertib dan akuntabel oleh Perangkat Daerah	%	N/A	50	60	70	80	90	100	
5	Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor PBB-P2 dan BPHTB	%	N/A	76	76,15	76,25	76,35	76,45	76,5	
6	Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainya	%	N/A	87	87,15	87,25	87,35	87,45	87,5	
7	Persentase Penerapan Sistem Informasi Pendapatan Berbasis Digital	%	N/A	83	83,15	83,25	83,35	83,45	83,5	
Kepe	gawaian									
1	Persentase formasi sesuai dengan perencanaan kebutuhan ASN	%	N/A	40	42	44	46	48	50	
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan	%	N/A	0,81%	0,82%	0,83%	0,84%	0,85%	0,86%	
3	Persentase layanan pengembangan karir ASN	%	NA	75%	78	80	82	84	86	
4	Nilai LHE AKIP Unsur Pengukuran	Nilai	19.81	20.51	21,21	21,91	22,61	23,32	23,32	
Pene	litian dan Pengembangan									•
1	Persentase Peningkatan Kajian Inovasi Pelayanan Publik	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase rekomendasi kebijakan berbasis hasil kelitbangan	%	N/A	15%	20%	22%	23%	24%	25%	
Pend	idikan dan Pelatihan									•
1	Persentase ASN yang Mendapatkan Sertifikat dalam Pengembangan Kompetensi	%	0	1%	2%	3%	4%	5%	6%	
Unsu	r Pengawasan Urusan Pemerintahan							•		
Inspe	ektorat Daerah									
1	Persentase Hasil Pengawasan	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
2	Nilai LHE AKIP Komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Nilai	17.36	17,97	18,59	19,2	19,82	20,43	20,43	
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP	%	84,94	85,44	85,94	86,44	86,94	87,44	87,94	
4	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	3,09	3.17	3.25	3.33	3.41	45.780,00	45.780,00	
Unsu	r Pendukung Urusan Pemerintahan									
Sekr	etariat DPRD									
1	Persentase pencapaian prolegda yang terfasilitasi	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
2	Persentase Pelaksanaan fungsi penggangaran dan pengawasan	%	60,00%	70,00%	73,00%	76,00%	80,00%	85,00%	88,00%	

			BASELINE		TARGET TAHUN					
NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	кет.
Sekr	etariat Daerah					•		•		
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Nilai	3,45	3,5	3,55	3,6	3,65	3,7	3,75	
2	Nilai LHE AKIP Pemerintah Daerah unsur pelaporan	Nilai	10,59	11	11,5	12	12,5	13	13,5	
3	Nilai LHE AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	70,75	70,8	70,9	71	71,5	72	75	
4	Tingkat Pelayanan keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	persentase pelaksanaan pengendalian kebijakan pembangunan daerah	%	90	90	90	90	90	90	90	
6	Indeks Tata kelola Pengadaan (ITKP)	Indeks	84,83	84,85	85,9	86,95	88	89,05	90,1	
7	persentase pelaksanaan pengendalian kebijakan perekonomian daerah	%	80	85	90	95	100	100	100	
Unsu	r Kewilayahan									
Keca	matan									
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	
Unsu	Unsur Pemerintahan Umum									
Kesatuan Bangsa dan Politik										
1	Persentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan	%	73%	0,75	0,77	0,79	0,81	0,83	0,85	
2	Persentase Masyarakat yang Memahami tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	81	81,5	82	82,5	83	83,5	84	
3	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kewaspadaan Daerah	%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	
4	Persentase Masyarakat yang memahami Politik Dalam Negeri	%	60%	68	70	72	74	76	78	
5	Persentase Masyarakat yang memahami tentang pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	%	60%	68	70	72	74	76	78	

Sumber: Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, 2025



4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Pelaksanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan Kabupaten Pangandaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional, sehingga perumusan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 maupun RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

4.2.1 Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengusung tema pembangunan "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan RPJMN Tahun 2025-2029, arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2023, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, ditetapkan 3 (tiga) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sebagai berikut:

- 1. SDM Berdaya Saing dan Produktif, dilaksanakan melalui strategi:
 - a) Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun;
 - b) Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan;
 - c) Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting;
 - d) Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif;
 - e) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas;
 - f) Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dualsystem;
 - g) Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa.
- 2. Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas, dilaksanakan melalui strategi:
 - a) Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
 - b) Penguatan infrastruktur digital;
 - c) Pengembangan infrastruktur transisi energi;

- d) Percepatan infrastruktur IKN;
- e) Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
- 3. Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan, dilaksanakan melalui strategi:
 - a) Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
 - b) Pengembangan skema graduasi bansos;
 - c) Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya;
 - d) Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat;
 - e) Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja;
 - f) Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan;
 - g) Peningkatan produksi industri pengolahan;
 - h) Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif;
 - i) Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi.

Prioritas Pembangunan Nasional (PN) merupakan Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan ditetapkan dipertahankan pada RKP Tahun 2025 sebagai pelaksanaan kerangka tema dan arah kebijakan pembangunan. Prioritas pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 meliputi:

- 1. Prioritas Nasional/PN 1, yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, dengan Sasaran PN 1 sebagai berikut:
 - a. Indeks Demokrasi Indonesia
- 2. Prioritas Nasional/PN 2, yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, dengan Sasaran PN 2 sebagai berikut:
 - a. Asia Power Index (Military Capability);
 - b. Asia Power Index (Diplomatic Influence);
 - c. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya;
 - d. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU);
 - e. Indeks Ketahanan Energi;
 - f. Kapasitas tampungan air (m3/kapita);
 - g. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%);

- h. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%);
- i. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global;
- j. Indeks Ekonomi Hijau;
- k. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer;
- 1. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%);
- m.Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
- n. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- o. Persentase Penurunan Emisi GRK.
 - Tahunan (%)
 - Kumulatif (%)
- 3. Prioritas Nasional/PN 3, yaitu Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, dengan Sasaran PN 3 sebagai berikut:
 - a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%);
 - b. Rasio Kewirausahaan (%);
 - c. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%);
 - d. Rasio PDB Pariwisata (%);
 - e. Devisa Pariwisata (miliar USD);
 - f. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%);
 - g. Aset Perbankan/PDB (%);
 - h. Aset Dana Pensiun/PDB (%);
 - i. Aset Asuransi/PDB (%);
 - j. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%);
 - k. Total Kredit/PDB (%);
 - 1. Inklusi Keuangan (%).
- 4. Prioritas Nasional/PN 4, yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, dengan Sasaran PN 4 sebagai berikut:
 - a. Hasil Pembelajaran
 - 1. Rata-rata nilai PISA
 - i. Membaca
 - ii. Matematika
 - iii. Sains

- 2. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)
- 3. Harapan lama sekolah (tahun)
- b. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%);
- c. Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%);
- d. Tingkat Penguasaan Iptek
 - 1. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)
 - 2. Peringkat Indeks Inovasi Global
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (%);
- f. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%);
- g. Usia Harapan Hidup (tahun);
- h. Kesehatan Ibu dan Anak;
 - 1. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
 - 2. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
- i. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk);
- j. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)
- k. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK);
- 1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG).
- 5. Prioritas Nasional/PN 5, yaitu Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, dengan Sasaran PN 5 sebagai berikut:
 - a. Rasio PDB Industri Pengolahan (%);
 - b. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB);
 - c. Ekspor Barang dan Jasa (% PDB);
 - d. Biaya Logistik (% PDB).
- 6. Prioritas Nasional/PN 6, yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, dengan Sasaran PN 6 sebagai berikut:
 - a. Terbangunnya sistem perlindungan social yang adaptif bagi seluruh penduduk (%);
 - b. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%);
 - c. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%);
 - d. Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%);
 - e. Persentase desa mandiri (%);
 - f. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%).

- 7. Prioritas Nasional/PN 7, yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, dengan Sasaran PN 7 sebagai berikut:
 - a. Return on Asset (ROA) BUMN (%);
 - b. Indeks Integritas Nasional;
 - c. Indeks Materi Hukum;
 - d. Indeks Pelayanan Publik;
 - e. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - f. Indeks Persepsi Korupsi;
 - g. Indeks Pembangunan Hukum;
 - h. Rasio Perpajakan terhadap PDB (%);
 - i. Tingkat Inflasi (%).
- 8. Prioritas Nasional/PN 8, yaitu Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, dengan Sasaran PN 8 sebagai berikut:
 - a. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK);
 - b. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB);
 - c. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%).

4.2.2 Telaah Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 disusun untuk mendukung prioritas dan sasaran pembangunan nasional, isu strategis daerah, prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, serta pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2025.

Dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan, serta merujuk pada Tema RPJPD I (2025-2029), yaitu Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola serta Tema RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, yaitu "Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat", maka Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah:

"PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENDUKUNG AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT JAWA BARAT"

Tema tersebut memiliki makna bahwa pemerataan pembangunan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Barat diarahkan pada keberlanjutan fokus pembangunan pada tahun sebelumnya dengan lebih meningkatkan intensitas dan memperluas cakupan khususnya pada daerah-daerah yang belum optimal dalam mendapatkan pelayanan namun memiliki nilai strategis yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan ekonomi dan peningkatan keunggulan serta kemandirian masyarakat Jawa Barat.

Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 meliputi:

- 1. **Prioritas 1**, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya;
- 2. **Prioritas 2**, yaitu Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama;
- 3. Prioritas 3, yaitu Penguatan Sistem Kesehatan Daerah;
- 4. **Prioritas 4**, yaitu Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanganan Risiko Bencana;
- 5. **Prioritas 5**, yaitu Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Gerakan Membangun Desa;
- 6. **Prioritas 6**, yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum dikelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang pengaruhnya signifikan bagi daerah sehingga harus mendapatkan prioritas perhatian dalam perencanaan program dan kegiatan. Jika isu tersebut berupa kelemahan/ancaman harus diantisipasi, dan jika isu tersebut berupa peluang/kekuatan dapat dimanfaatkan karena isu tersebut dapat meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam menentukan isu strategis, harus disesuaikan dengan jenis dokumen yang akan disusun, apakah itu jangka panjang (20 tahun) jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Jika suatu isu

strategis berpotensi muncul dalam kurun waktu sesuai masing-masing jenis dokumen, maka isu strategis itu dapat dimasukkan. Namun jika suatu isu strategis berpotensi muncul dalam (lebih dari) kurun waktu sesuai masing-masing jenis dokumen, maka sebaiknya tidak usah dimasukkan ke dalam dokumen.

Kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Berikut adalah identifikasi isu strategis yang ada di Kabupaten Pangandaran:

- Antisipasi bergejolaknya kondusifitas daerah dan politik pasca Pemilu Serentak 2024;
- 2. Sektor unggulan belum memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah;
- 3. Belum optimalnya promosi dan iklim investasi serta pelaksanaan penanaman modal inklusif menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan;
- 4. Masih tingginya angka kemiskinan dan belum optimalnya pencegahan serta penanganan stunting;
- 5. Masih adanya kesenjangan cakupan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah;
- 6. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi belum menyeluruh;
- 7. Belum optimalnya kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan kesetaraan, informal, dan inklusi;
- 8. Belum meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan fasilitas kesehatan;
- 9. Masih adanya ketidaksesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang wilayah;
- Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi, dan adaptasi bencana serta upaya penanggulangan perubahan iklim;
- 11. Masih rendahnya cakupan area penanganan sampah;
- 12. Belum optimalnya pengelolaan sampah melalui 3R;

- 13. Ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja;
- 14. Keterbatasan lembaga pengembangan kompetensi;
- 15. Reformasi birokrasi belum sepenuhnya diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada publik;
- 16. Rendahnya implementasi kelitbangan, inovasi daerah, dan pengembangan teknologi terapan;
- 17. Belum optimalnya penerapan sistem merit dalam manajemen kinerja ASN.

Tabel 4.6 Arah Kebijakan RKP 2025, Isu Strategis RPJMD, Permasalahan Pembangunan, Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029, dan Isu Strategis RKPD 2025

Arah Kebijakan RKP 2025	Isu Strategis RPJMD 2025-2029	Permasalahan Pembangunan RKPD 2025 berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2025 Triwulan I	Arah Kebijakan Rancangan RPJMD 2025- 2029	Isu Strategis RKPD 2025
1	2	3	4	5
SDM Berdaya Saing dan Produktif	Rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan (NTP 2022 103,84)	1. Belum optimalnya PDRB pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan 2. Sulitnya sektor pertanian akses kredit ke perbankan, juga akses ke pasar, dan beberapa masalah internal di sektor pertanian itu sendiri seperti rendahnya kualitas SDM dan teknologi	1. Penerapan teknologi pertanian modern 2. Perbaikan infrastruktur 3. Penguatan kolaborasi antar stakeholder	Masih adanya kesenjangan cakupan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah
	Belum optimalnya daya saing produk, kelembagaan, dan pemberdayaan UMKM	1. Masih rendahnya produktivitas pendapatan masyarakat 2. Rendahnya Pendapatan masyarakat, menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, sehingga keinginan untuk melakukan konsumsi menurun 3. UMKM masih memiliki permasalahan pada permodalan dan pemasaran 4. Kabupaten pangandaran belum memiliki rumah kemasan (sentra UMKM)	1. Pengentasan kemiskinan 2. Peningkatan keterampilan kerja	Belum optimalnya promosi dan iklim investasi serta pelaksanaan penanaman modal inklusif menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
	Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja	Masih minimnya ketersediaan lapangan kerja Rendahnya kompetensi tenaga kerja	Peningkatan keterampilan kerja	1. Ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja

Arah Kebijakan RKP 2025	Isu Strategis RPJMD 2025-2029	Permasalahan Pembangunan RKPD 2025 berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2025 Triwulan I	Arah Kebijakan Rancangan RPJMD 2025- 2029	Isu Strategis RKPD 2025
1	2	3	4	5
		3. Belum tersedianya data ketenagakerjaan yang valid		2. Keterbatasan lembaga pengembangan kompetensi
Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan	Masih tingginya angka kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 8,89 persen	Belum optimalnya infrastruktur pelayanan dasar Belum meratanya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Belum optimalnya aktivitas perekonomian masyarakat	1. Pengentasan Kemiskinan 2. Pemberdayaan Perempuan 3. Peningkatan keterampilan kerja 4. Pengutan keluarga 5. Optimalisasi ekonomi berbasis desa melalui inovasi digital serta tata kelola yang baik	Sektor unggulan belum memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah
	Belum optimalnya perlindungan sosial, akurasi bantuan sosial, jaminan sosial, serta pemberdayaan masyarakat	Data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang ada di luar panti belum terdata secara maksimal, sehingga penentuan target capaian kurang akurat	Pengentasan Kemiskinan	Masih adanya kesenjangan cakupan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah
	belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah (anggaran dan utang daerah)	Terdapat hutang daerah Pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal	Meningkatkan Kemandirian Fiskal dan Optimalisasi	Belum optimalnya promosi dan iklim investasi serta pelaksanaan penanaman modal inklusif menuju

Arah Kebijakan RKP 2025	Isu Strategis RPJMD 2025 2025-2029 RKPD 2025 Triwulan I		Arah Kebijakan Rancangan RPJMD 2025- 2029	Isu Strategis RKPD 2025
1	2	3	4	5
	2. belum optimalnya pengelolaan dan peningkatan pendapatan asli daerah 3. belum optimalnya pemanfaatan alternatif pembiayaan pembangunan daerah selain APBD	3. Belum optimalnya pengelolaan potensi PAD	PAD 2. Inovasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Daerah	pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
	Belum optimalnya daya saing produk, kelembagaan, dan pemberdayaan UMKM	1. Belum optimalnya daya saing produk, kelembagaan, dan pemberdayaan UMKM 2. UMKM masih memiliki permasalahan pada permodalan dan pemasaran 3. Kabupaten pangandaran belum memiliki rumah kemasan (sentra UMKM) 4. Belum optimalnya peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dan implementasi TKDN dalam pembangunan daerah	1. Pengentasan kemiskinan 2. Peningkatan keterampilan kerja	Belum optimalnya promosi dan iklim investasi serta pelaksanaan penanaman modal inklusif menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

Arah Kebijakan RKP 2025	Isu Strategis RPJMD 2025-2029	Permasalahan Pembangunan RKPD 2025 berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2025 Triwulan I	Arah Kebijakan Rancangan RPJMD 2025- 2029	Isu Strategis RKPD 2025
1	2	3	4	5
Infrastruktur untuk	1. Terdapat pusat	1. Terdapat pusat kegiatan yang belum	1. Mendorong	Masih adanya kesenjangan
peningkatan produktivitas	kegiatan yang belum	terhubung dengan pusat kegiatan	pembangunan	cakupan layanan infrastruktur
	terhubung dengan pusat	lainnya	infrastruktur	dasar dan konektivitas wilayah
	kegiatan lainnya	2. Belum optimalnya sarana prasarana	melalui skema	
	2. Belum optimalnya	transportasi	pembiayaan	
	sarana prasarana	3. Belum adanya integrasi antar moda	inovatif	
	transportasi	(Terminal, Bandara, Pelabuhan, Kereta	2. Penyediaan	
	3. Rendahnya cakupan	Api)	layanan	
	layanan transportasi		transportasi yang	
	publik		efisien	
	4. Jalur alternatif dari dan		3. peningkatan	
	menuju Pangandaran		infrastruktur	
	belum memadai		transportasi	
	5. Belum adanya integrasi		4. manajemen lalu	
	antar moda (Terminal,		lintas pada pusat-	
	Bandara, Pelabuhan,		pusat kegiatan	
	Kereta Api)		_	

Sumber:

^{*)} Rancangan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029

^{**)} RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2025 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Maka tema pembangunan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2025 adalah:

"Peningkatan Daya Saing Daerah"

Berdasarkan tema tersebut maka dapat dikelompokkan menjadi prioritas pembangunan yaitu:

- Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya;
- 2. Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya;
- 3. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan;
- 4. Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana;
- 5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis;
- 6. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik.

Keterkaitan isu strategis dengan rumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.7 Prioritas Pembangunan 2025 dan Isu Strategis

No.	Prioritas Pembangunan 2025		Isu Strategis
1	2		3
1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	a b	Sektor unggulan belum memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah Belum optimalnya promosi dan iklim investasi serta pelaksanaan penanaman modal inklusif menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

No.	Prioritas Pembangunan 2025	Isu Strategis	
1	2	С	3 Ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja
2	Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	а	Belum optimalnya kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan kesetaraan, informal, dan inklusi
		Ъ	Keterbatasan lembaga pengembangan kompetensi
3	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	а	Belum meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan fasilitas kesehatan
		Ъ	Masih tingginya angka kemiskinan dan belum optimalnya pencegahan serta penanganan stunting
4	Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	а	Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi, dan adaptasi bencana serta upaya penanggulangan perubahan iklim
5	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan	а	Masih adanya kesenjangan cakupan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah
	Strategis	Ъ	Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi, dan adaptasi bencana serta upaya penanggulangan perubahan iklim
		С	Masih adanya ketidaksesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang wilayah
6	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	а	Reformasi birokrasi belum sepenuhnya diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada publik
		b	Belum optimalnya penerapan sistem merit dalam manajemen kinerja ASN
		С	Rendahnya implementasi kelitbangan, inovasi daerah, dan pengembangan teknologi terapan

	No.	Prioritas Pembangunan 2025		Isu Strategis
ı	1	2		3
			d	Antisipasi bergejolaknya kondusifitas daerah dan politik pasca Pemilu Serentak 2024

Sumber: RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 diimplementasikan melalui sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan. Strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan pada RKP Tahun 2025 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

4.2.3.1 Dukungan Program Pembangunan Daerah Tahun 2025 terhadap Pelaksanaan Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), Kemiskinan Ekstrem, dan Stunting.

Dukungan program pembangunan daerah RKPD Tahun 2025 terhadap arah kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Keterkaitan Program Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025 dengan Arah Kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's)

Target	Program Pembangunan
	Daerah Tahun 2025
 Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi. Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan social yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan 	 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program Pemberdayaan Sosial Program Pemberdayaan Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Pengembangan UMKM Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga

kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. 111.Program Pemenuhan F. (PHA) 12.Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ket Umum 14.Program Penanggulang Bencana 16.Program Penanggulangan, Penanggulangan Masyarakat 2 Program Penanggulangan Penangan Masyarakat 2 Program Penanganan Sarana Pengembangan Sarana Pengembangan Sarana Pengembangan Penanggulangan Pe		Program Pembangunan
terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. (PHA) 12. Program Perlindungan Anak 13. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Kel Umum 14. Program Penanggulang Bencana 16. Program Penanggulang Bencana 18. Program Penanggulang Bencana 19. Program Penanggulang Bencana 10. Program Penanggulang Bencana 10. Program Penanggulang Bencana 11. Program Penanggulang Bencana 12. Program Penanggulang Bencana 13. Program Penanggulang Bencana 14. Program Penanggulang Bencana 15. Program Penangganang Diversifikasi Dan Keta 18. Program Penangganang Merawanan Pangan 18. Program Pengamasang Kerawanan Pangan 18. Program Pengamasanang Program Pengamanang Program Pengam	Target	Daerah Tahun 2025
 Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian. Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin system produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang me-ningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah 	terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan	12.Program Perlindungan Khusus Anak 13.Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 14.Program Penanganan Bencana 15.Program Penanggulangan Bencana 16.Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian. Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin system produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang me-ningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah 	Goal 2 Tanpa Kelaparan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan
Target 2.5 Pada tahun 2021, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata,	dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. • Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. • Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian. • Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin system produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang me-ningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan. • Target 2.5 Pada tahun 2021, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses	Pangan Masyarakat 2. Program Penanganan Kerawanan Pangan 3. Program Pengawasan Keamanan Pangan 4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertania 5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 7. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 8. Program Penyuluhan Pertanian 9. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 10. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 11. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 12. Program Pengolahan dan Pemasaran

Toward	Program Pembangunan
Target	Daerah Tahun 2025
 Goal 3 Kehidupan Sehat & Sejahtera Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh Negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. Target 3.8 Pada tahun 2030, Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obatobatan dan vaksin dasar yang baik, dan akses terhadap obatobatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang mengaskan hak Negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untu	 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program Rehabilitasi Sosial Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
	1

Target	Program Pembangunan
Target	Daerah Tahun 2025
 Goal 4 Pendidikan Berkualitas Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan lakilaki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan lakilaki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anakanak dalam kondisi rentan. Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik lakilaki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. 	 Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 Goal 5 Kesetaraan Gender Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. 	 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

	Program Pembangunan
Target	Daerah Tahun 2025
 Goal 6 Air Bersih & Sanitasi Layak Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita 	 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Perekonomian dan Pembangunan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 Goal 7 Energi Bersih & Terjangkau Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern. Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energy terbarukan dalam bauran energi global. Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat. 	 Program Perekonomian dan Pembangunan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 Goal 8 Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan Target 8.6 Pada tahun 2021, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan. Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses 	 Program Pengembangan UMKM Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Penempatan Tenaga Kerja Program Pengembangan Kebudayaan Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Target	Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua Goal 9 Industri, Inovasi & Infrastruktur	Program Perekonomian dan Pembangunan 1. Program Penyelenggaraan Jalan
 Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing. Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2021. 	 Program Penyelenggaraan Jalah Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Pengendalian Izin Usaha Industri Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 Goal 10 Berkurangnya Kesenjangan Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. 	 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Hubungan Industrial Program Penanganan Bencana Program Pengembangan UMKM

Target	Program Pembangunan
Taiget	Daerah Tahun 2025
 Goal 11 Kota & Permukiman yang Berkelanjutan Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan focus melindungi orang miskin dan orangorang dalam situasi rentan. Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. 	 Program Kawasan Permukiman Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Program Pengembangan Perumahan Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Penanggulangan Bencana Program Pencegahan, Penganggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Penanganan Bencana Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 Goal 12 Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab Target 12.4 Pada tahun 2021 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam. 	 Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengendalian Bahan berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 Goal 13 Penanganan Perubahan Iklim Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional. 	 Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Penanganan Bencana

	Target		Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
	Cool 14 Physiotem Leuten	1	
•	Goal 14 Ekosistem Lautan Target 14.2 Pada tahun 2021, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif. Target 14.5 Pada tahun 2021, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar	1. 2. 3. 4.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program Perencanaan Lingkungan hidup
	Goal 15 Ekosistem Daratan	1.	Program Pengelolaan Sumber
•	Target 15.1 Pada tahun 2021, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. Target 15.3 Pada tahun 2021, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi. Target 15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi	2.	Daya Air (SDA) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
	pembangunan berkelanjutan.		
•	Target 15.9 Pada tahun 2021, mengitegrasikan nilai- nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.		
•	Target 15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.		
	Goal 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang	1.	Program Pemerintahan Dan
•	Tangguh Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. Target 16.3 Menggalakkan Negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif,	2.	Kesejahteraan Rakyat Program Perlindungan Khusus Anak Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
	akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.		

Target	Program Pembangunan Daerah Tahun 2025	
Goal 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	Program Pengelolaan Keuanga Daerah	ın
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 	

Tercatat oleh BPS Provinsi Jawa Barat tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 mencapai 1,37%. Sedangkan angka kemiskinan hasil pendataan BNBA tahun 2023 mencapai 4.007 jiwa. Seiring dengan hal tersebut upaya Kabupaten Pangandaran dalam percepatan penurunan kemiskinan ekstrem diantaranya telah dibuat beberapa regulasi terkait percepatan penurunan kemiskinan ekstrem sebagai berikut:

- 1. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- 2. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor SS.03/Kpts.145-Huk/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- 3. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor SS.03/Kpts.266-Huk/2023 tentang Penetapan Data Fakir Miskin Ekstrem Tahun 2023-2024.

Selain itu Kabupaten Pangandaran juga telah melakukan intervensi dengan pelaksanaan program kegiatan di Perangkat Daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

Dukungan program pembangunan daerah RKPD Tahun 2025 terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9 Program Pendukung Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Perangkat Daerah Penanggungjawab

Strategi	Strategi Program Sub Kegiatan		Perangkat Daerah Penganggungjawab
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Mengurangi Beban	Program Perlindungan Dan Jaminan	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah	Dinas Sosial, Pemberdayaan
Pengeluaran	Sosial	Kabupaten/Kota	Masyarakat Dan Desa
Mengurangi Beban	Program Perlindungan Dan Jaminan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Dinas Sosial, Pemberdayaan
Pengeluaran	Sosial	Kabupaten/Kota	Masyarakat Dan Desa
Mengurangi Beban	Program Perlindungan Dan Jaminan	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial, Pemberdayaan
Pengeluaran	Sosial		Masyarakat Dan Desa
Meningkatkan Pendapatan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meminimalkan Wilayah	Program Administrasi Pemerintahan	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan
Kantong Kemiskinan	Desa		Masyarakat Dan Desa
Meminimalkan Wilayah	Program Administrasi Pemerintahan	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan
Kantong Kemiskinan	Desa		Masyarakat Dan Desa
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Strategi	Program	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penganggungjawab
		Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pengelolaan Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (Sekolah Dasar)	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (Sekolah Menengah Pertama)	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Program Pengelolaan Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Strategi	Program	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penganggungjawab
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan

Strategi	Program	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penganggungjawab
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Pendapatan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dinas Pertanian
Meningkatkan Pendapatan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan
Meningkatkan Pendapatan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan
Meningkatkan Pendapatan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan
Meningkatkan Pendapatan	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Hubungan Industrial	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dinas Ketenagakerjaan

Strategi	Program	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penganggungjawab
Meningkatkan Pendapatan	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Ketenagakerjaan
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Program Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Percepatan penurunan stunting menjadi salah satu program prioritas nasional mulai dari tingkat pusat hingga desa atau kelurahan. Pemerintah Kabupaten Pangandaran melakukan berbagai akselerasi pembangunan dalam upaya menyelesaikan persoalan kesehatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya yaitu permasalahan stunting. Seiring dengan hal tersebut upaya Kabupaten Pangandaran dalam menurunkan angka prevalensi stunting diantaranya telah dibuat beberapa regulasi terkait percepatan penurunan stunting sebagai berikut:

- SE Bupati Pangandaran Nomor 067/2898-Org/2020 tentang Replikasi Inovasi MENYETING GIGI EMAS (Mencegah Stunting dengan Gerakan Makan Telur, Instruktur Asi Eksklusif, Lumbung Gizi Desa, Kelompok Masyarakat Peduli Jamban dan Alarm Kelahiran) Masyarakat Peduli Jamban dan Alarm Kelahiran);
- 2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif;
- 3. SE Bupati Pangandaran Nomor 800/1967/Dinkes/2021 tentang Dukungan Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada Remaja Putri di Sekolah;
- 4. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Selain itu Kabupaten Pangandaran juga telah membentuk tim percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Kemudian melaksanakan intervensi spesifik dan sensitif bersama dengan SKPD terkait. Spesifik misalnya pemberian makanan tambahan pada balita stunting, dan untuk sensitifnya terkait sanitasi dan air bersih. Dengan berbagai upaya diatas diharapkan dapat menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Pangandaran.

Dukungan program pembangunan daerah RKPD Tahun 2025 terhadap percepatan penurunan stunting dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10 Program Pendukung Percepatan Penurunan Stunting dan Perangkat Daerah Penanggungjawab

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penganggungjawab
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Gebyar Remaja Patuh Minum Fe dan bazar	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pemeriksaan skrining anemia pada seluruh remaja putri	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal Ibu Hamil KEK	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita Kurang Gizi	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita Kurang Gizi.	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kesehatan Reproduksi Catin dan KB bagi LP/LS, Organisasi Profesi dan LSM	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan Triple E untuk Ibu Hamil dan Calon Pengantin dan Sosialisasi Ekohort Kespro dan Catin	Dinas Kesehatan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penganggungjawab
Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	OJT MTBS dan Tatalaksana Gizi Buruk di Puskesmas	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orientasi Pertumbuhan dan Perkembangan	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pemicuan Pilar Kesatu Sanitasi Total Berbasis Masyarakat lalu lalu pembongkaran helikopter di atas balong, kolam dan sungai, kemudian monitoring tindak lanjut kepada masyarakat yang menjadi temuan BABS	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan petugas Promkes Puskesmas	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUSIbu Hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penganggungjawab
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pelayanan MKJP	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pelayanan MKJP	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya	Pelaksanaan Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan dan Minilokarya Tingkat Kecamatan	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK	Penyelenggaraan Audit Kasus Stunting Catin, Bumil, Bufas, Baduta2	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Pertemuan Kelompok Kegiatan PIKR dan BKR	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penganggungjawab
	Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Pertemuan Kelompok Kegiatan BKB	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Menyalurkan bantuan sosial PKH berupa uang tunai setiap tahapnya yang harus digunakan untuk kebutuhan anak usia dini/ anak sekolah/ ibu hamil/ lansia/ disabilitas dan melakukan pertamuan peningkatan kemampuan keluarga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga membahas modul kesehatan dan gizi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Pembinaan dan Pendampingan teknis pelaksanaan imunisasi dalam rangka pelaksanaan imunisasi posyandu (sweeping) dan sosialisasi introduksi vaksin baru	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	menyalurkan program sembako berupa bantuan tunai setiap bulannya yang harus dibelanjakan ke bahan-bahan pokok sesuai ketentuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penganggungjawab
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Pembinaan kader pembangunan manusia	Terlaksananya Pembinaan Kader Pembangunan Manusia
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Sosialisasi dan promosi gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) kepada masyarakat dengan risiko stunting di Desa lokus	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Sosialisasi Pola Konsumsi Pangan B2SA dan Pemberian Paket Makanan Menu B2SA	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Sosialisasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan kepada Pelaku Usaha PSAT di Kabupaten Pangandaran	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Pemberian Paket Sembako dalam rangka Intervensi Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan (PDRP)	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Dinas Pertanian

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penganggungjawab
Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan perpipaan	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah KK yang mendapat bantuan Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan standar	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

4.2.3.2 Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi komitmen bersama baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah untuk menahan laju pemanasan global. Dalam upaya mencapai target penurunan emisi, Indonesia telah menetapkan komitmen melalui Nationally Determined Contribution (NDC), dengan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41% bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada tahun 2030. Target penurunan emisi gas target rumah kaca merupakan imperatif diturunkan yang ke Kabupaten/Kota. Target untuk Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11 Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten
Pangandaran

Indikator	Satuan	Target
Penurunan emisi gas rumah kaca kumulatif	Ton CO2eq	253.223,76
Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca tahunan	Ton CO2eq/Milyar Rupiah	2,31

Sumber: RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

Penurunan Wilayah 1 Kabupaten Pangandaran secara total sebesar 429.421,87 Ton CO2eq, terdiri dari Kabupaten sebesar 253.223,76 Ton CO2eq dan penambahan Pusat dan Provinsi sebesar 176.198,12 Ton CO2eq. Untuk target Kabupaten Pangandaran diperoleh dari beberapa unsur seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12 Unsur Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten
Pangandaran

Unsur	Satuan	Target
Penggunahan Lahan	Ton CO2eq	257,52
Peternakan	Ton CO2eq	236.867,90
Pertanian	Ton CO2eq	10.614,47
Transportasi	Ton CO2eq	597,90
Persampahan	Ton CO2eq	4.694,38
Limbah Domestik	Ton CO2eq	191,59

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

Dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan bebera kegiatan seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.13 Dukungan Kegiatan dalam Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Pangandaran

Jenis Kegiatan	Kategori	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Pengelolaan Sarana dan Pra Sarana Keanekaragaman Hayati	Peningkatan Cadangan Karbon	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Operasional TPS3R	Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu TPST / TPS3R	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Project of Action Restoration of Mangrove Forest	Penanaman Mangrove	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penanaman Hutan Mangrove	Penanaman Mangrove	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Sosialisasi Sampah Rumah Tangga	Pendukung	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Bantuan UPPO	Pendukung	Dinas Pertanian

Sumber: RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

4.2.4 Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2025

Keterkaitan Prioritas pembangunan Kabupaten Pangandaran, dengan Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2025 disandingkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.14 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional-Provinsi Jawa

Barat dan Kabupaten Pangandaran

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran
PN 1, Memperkokoh Ideologi	PP6, Inovasi Pelayanan	PD6, Reformasi Birokrasi dan
Pancasila, Demokrasi, dan Hak	Publik, Penataan	Inovasi dalam Tata Kelola
Asasi Manusia	Daerah dan Stabilitasi	Pemerintah dan Pelayanan
	Politik, Hukum, Hak	Publik Berbasis Digital serta
	Asasi Manusia dan	Penguatan Kondusifitas
	Keamanan	Daerah dan Stabilitas Politik
PN 2, Memantapkan Sistem	PP1, Pertumbuhan	PD1, Peningkatan
Pertahanan Keamanan Negara	Ekonomi Berbasis	Pertumbuhan Ekonomi
dan Mendorong Kemandirian	Peningkatan Kapasitas	untuk Mendongkrak
Bangsa melalui Swasembada	UMKM, Petani, Nelayan	Perekonomian Masyarakat
Pangan, Energi, Air, Ekonomi	dan Budidaya untuk	melalui Penguatan Industri
Syariah, Ekonomi Digital,	Membuka Lapangan	Pariwisata sebagai lokomotif
	Kerja Seluas-luasnya	Pengembangan UMKM,
		Peningkatan Iklim Investasi,

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya
	PP5, Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	PD5, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis
	PP6, Inovasi Pelayanan Publik, Penataan Daerah dan Stabilitasi Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan	PD6, Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik
PN 3, Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PP1, Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	PD1, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya
PN 4, Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta	PP2, Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	PD2, Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya
Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PP3 Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	PD3 Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan
	PP4 Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	PD4 Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana
PN 5, Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PP1, Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	PD1, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani,

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran
		Nelayan, serta Pembudidaya
PN 6, Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PP5, Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	PD5, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis
PN 7, Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PP6, Inovasi Pelayanan Publik, Penataan Daerah dan Stabilitasi Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan	PD6, Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik
PN 8, Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk	PP2, Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	PD2, Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya
Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PP4 Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	PD4 Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana

Keterkaitan sasaran pembangunan Kabupaten Pangandaran tahun 2025 dengan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 dan sasaran pembangunan nasional tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.15 Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 dengan Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dan Indikator Sasaran Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
PN1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia		PP6: Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah		PPD6: Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	
S1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1. Indeks Demokrasi Indonesia	S17. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	S12. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP
PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru.		PP1: Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya		PPD1: Peningkatan Pertumbuhan Mendongkrak Perekonomia Penguatan Industri Pariwis Pengembangan UMKM, Pen Investasi, dan Pemberdayaa serta Pembudidaya	n Masyarakat melalui ata sebagai lokomotif ingkatan Iklim
		PP5: Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa		PPD5: Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	
		PP6: Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah		PPD6: Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
				serta Penguatan Kondusifita Stabilitas Politik	as Daerah dan
S2. Pemantapan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru.	Asia Power Index (Military Capability)	S17. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	S12. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP
	2. Asia Power Index (Diplomatic Influence)	S17. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	S12. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP
	3. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	S17. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	S12. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP
	4. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	S2. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (Poin)	S8. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)
	5. Indeks Ketahanan Energi	S11. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	S16. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	6. Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	S11. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	S16. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	7. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	S14. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (%)	S14. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	Persentase cakupan layanan infrastruktur
	8. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	S14. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (%)	S14. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	Persentase cakupan layanan infrastruktur
	9. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	S4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	S3. Peningkatan Akses Dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-rata Pengeluaran Wisatawan
	10. Indeks Ekonomi Hijau	S2. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	S8. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)
			Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)	S8. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	11. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	S11. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	S16. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	12. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	S15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	S16. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	13. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	S15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	S16. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	14. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	S15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	S16. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	15. Persentase Penurunan Emisi GRK - Tahunan (%) - Kumulatif (%)	S11. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	S16. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruk Lapangan Kerja yang Berkualitas, Men Mengembangkan Industri Kreatif serta Agromaritim Industri di Sentra Produk Koperasi	dorong Kewirausahaan, Mengembangkan	PP1: Pertumbuhan Ekonomi Berba Kapasitas UMKM, Petani, Nel untuk Membuka Lapangan K	ayan dan Budidaya	PPD1: Peningkatan Pertumbuhan Mendongkrak Perekonomia: Penguatan Industri Pariwisa Pengembangan UMKM, Pen Investasi, dan Pemberdayaa serta Pembudidaya	n Masyarakat melalui ata sebagai lokomotif ingkatan Iklim

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
S3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	S4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit (%)	S3. Peningkatan Akses Dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-rata Pengeluaran Wisatawan
Total Tala Roperadi	2. Rasio Kewirausahaan (%)	S10. Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (Rp 000)	S3. Peningkatan Akses Dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-rata Pengeluaran Wisatawan
	3. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	S4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit (%)	S3. Peningkatan Akses Dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-rata Pengeluaran Wisatawan
	4. Rasio PDB Pariwisata (%)	S3. Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	S8. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)
	5. Devisa Pariwisata (miliar USD)	S3. Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	S8. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	6. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	S3. Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	S8. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)
	7. Aset Perbankan/PDB (%)				
	8. Aset Dana Pensiun/PDB (%)				
	9. Aset Asuransi/PDB (%)				
	10. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)				
	11. Total Kredit/PDB (%)				
	12. Inklusi Keuangan (%)				
PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas		PP2: Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama		PPD2: Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	
		PP3: Penguatan Sistem Kesehatan	Daerah	PPD3: Peningkatan Kualitas dan A Kesehatan	aksesibilitas Layanan

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
		PP4: Penguatan Sistem Perlindung Kesiapsiagaan Penanggulang		PPD4: Pembangunan Sosial Buday Tanggap terhadap Bencana	
S4. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Hasil Pembelajaran: A. Rata-rata nilai PISA Membaca ii. Matematika iii. Sains	S5. Meningkatnya akses pendidikan masyarakat		S4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	
	b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	S5. Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	S4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Pendidikan
	c. Harapan lama sekolah (tahun)	S5. Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	S4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Pendidikan
	2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	S5. Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	S4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Pendidikan

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	3. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	S4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	S5. Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi di tingkat nasional dan internasional	Jumlah Pemuda Berprestasi yang Mendapat Penghargaan
	4. Tingkat Penguasaan Iptek: a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) b. Peringkat Indeks Inovasi Global	S18. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	S15. Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	Indeks Risiko Bencana
	5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	S4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	S5. Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi di tingkat nasional dan internasional	Jumlah Pemuda Berprestasi yang Mendapat Penghargaan
	6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	S6. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	S5. Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi di tingkat nasional dan internasional	Jumlah Pemuda Berprestasi yang Mendapat Penghargaan

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	7. Usia Harapan Hidup (tahun)	S8. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	S4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Kesehatan
	8. Kesehatan Ibu dan Anak: a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	S9. Meningkatnya upaya percepatan penurunan stunting	Prevalensi Stunting (%)	S4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Kesehatan
	9. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	S8. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	S4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Kesehatan
	10. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	S8. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	S4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Kesehatan
	11. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	S6. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	S5. Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi di tingkat nasional dan internasional	Jumlah Pemuda Berprestasi yang Mendapat Penghargaan

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	12. Indeks Ketimpangan Gender (IKG	S6. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda	Indeks Ketimpangan Gender (Poin)	S5. Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi di tingkat nasional dan internasional	Jumlah Pemuda Berprestasi yang Mendapat Penghargaan
PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya		PPD1: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	
S5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	S1. Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Industri (%)	S8. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)
			Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	S8. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)
	2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	S4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (Triliun Rupiah)	S3. Peningkatan Akses Dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-rata Pengeluaran Wisatawan

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	3. Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	S12. Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur	Tingkat Konektivitas (%)	S8. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)
	4. Biaya Logistik (% PDB)	S12. Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur	Tingkat Konektivitas (%)	S8. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)
PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pe		Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa		PPD5: Pengelolaan Lingkungan Hi Wilayah melalui Penataan I Aksesibilitas serta Konektiv Kegiatan Strategis	nfrastruktur Dasar,
S6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	S7. Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)		
	2. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	S7. Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)		
	3. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	S4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
		dan penempatan tenaga kerja			
	4. Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	S13.Meningkatnya kualitas infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur (Poin)	S14. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	Persentase cakupan layanan infrastruktur
	5. Persentase desa mandiri (%)	S16. Meningkatnya pemerataan pembangunan di wilayah Pedesaan	Indeks Desa Membangun (Poin)	S14. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	Persentase cakupan layanan infrastruktur
	6. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	S14. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (%)	S14. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	Persentase cakupan layanan infrastruktur
PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		PP6: Inovasi Pelayanan Publik dan	Penataan Daerah	PPD6: Reformasi Birokrasi dan Ind Pemerintah dan Pelayanan serta Penguatan Kondusifit Stabilitas Politik	Publik Berbasis Digital
S7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	1. Return on Asset (ROA) BUMN (%)	Tidak relevan dengan Provinsi Jawa Barat	Tidak relevan dengan Provinsi Jawa Barat	Tidak relevan dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak relevan dengan Kabupaten Pangandaran

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	2. Indeks Integritas Nasional	S17. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	S12. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP
	3. Indeks Materi Hukum	S17. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	S12. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP
	4. Indeks Pelayanan Publik	S18. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	S12. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Indeks SPBE
	5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	S18. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	S12. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Indeks SPBE
	6. Indeks Persepsi Korupsi	S17. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	S12. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	7. Indeks Pembangunan Hukum	S17. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	S12. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP
	8. Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)				
	9. Tingkat Inflasi (%)				
PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan g Lingkungan, Alam dan Budaya, serta P Antarumat Beragama untuk Mencapai Makmur	eningkatan Toleransi	PP2: Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama		PPD2: Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklus: Berkarakter, dan Berbudaya	
		PP4: Penguatan Sistem Perlindung Kesiapsiagaan Penanggulanga		PPD4: Pembangunan Sosial Buday Tanggap terhadap Bencana	
S8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	S5. Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	S4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Pendidikan
	2. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)				

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	3. Proporsi Kerugian	S11. Meningkatnya	Indeks Risiko	S15. Meningkatkan	Indeks Risiko
	Ekonomi Langsung	pembangunan rendah	Bencana (Poin)	kemampuan mitigasi	Bencana
	Akibat Bencana Relatif	Karbon dan menurunnya		bencana daerah	
	terhadap PDB (%)	risiko bencana			

Dukungan Program Prioritas Daerah Kabupaten Pangandaran terhadap dukungan pada Program Prioritas Nasional dalam dokumen RKP 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.16 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2025 terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan . Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target Perubahan RKPD 2025	Perangkat Daerah Penganggung Jawab
1	PN.01 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	P6 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	PPD6. Reformasi Birokrasi Dan Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintah Dan Pelayanan Publik Berbasis Digital Serta Penguatan Kondusifitas Daerah Dan Stabilitas Politik	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Masyarakat Yang Memahami Tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	84%	Bakesbangpol

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target Perubahan RKPD 2025	Perangkat Daerah Penganggung Jawab
				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat Yang Memahami Wawasan Kebangsaan	75%	Bakesbangpol
2	PN.02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	P1 Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	PPD1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat Melalui Penguatan Industri Pariwisata Sebagai Lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, Dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Serta Pembudidaya	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkat Omsetnya	2,50%	DISKOPDAGIN
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Tingkat Pertumbuhan Jumlah Investor	221 Investor	DPMPTSP
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	81%	Distan
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,30%	DKPKP

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target Perubahan RKPD 2025	Perangkat Daerah Penganggung Jawab
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	0,20%	DKPKP
		P5 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	PPD5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan layanan persampahan	29,50%	DLHK
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	72,57%	DPUTRPRKP
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan Layanan Teknis Air Minum Dan Air Bersih	75%	DPUTRPRKP
				Program Penyelenggaraan Jalan	- Persentase Jalan Baru Yang Terbangun - Presentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	- 91,58% - 89,50 %	DPUTRPRKP

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target Perubahan RKPD 2025	Perangkat Daerah Penganggung Jawab
		P6 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	PPD6. Reformasi Birokrasi Dan Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintah Dan Pelayanan Publik Berbasis Digital Serta Penguatan Kondusifitas Daerah Dan Stabilitas Politik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Sistem Informasi Dan Data Elektronik Yang Aman	35%	DISKOMINFO
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE	3,4 Indeks	DISKOMINFO
3	PN. 03 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	P1 Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	PPD1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Lokal Yang Meningkat Omsetnya	2,50%	DISKOPDAGIN

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target Perubahan RKPD 2025	Perangkat Daerah Penganggung Jawab
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12,87%	DISPARBUD
4	PN 04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	P2 Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	PPD2. Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Program Pengendalian Penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	69,40%	DKBP3A
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	87,20%	DKBP3A
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	62,70%	DKBP3A

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target Perubahan RKPD 2025	Perangkat Daerah Penganggung Jawab
				Program Pengelolaan Pendidikan Program Pendidik	- Persentase Tingkat Budi Pekerti Peserta Didik - Persentase Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Pada Masa Dan Pasca Pandemi - Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan - Persentase Layanan Pendidikan Non Formal Dan Informal Persentase Capaian	- 93% - 86% - 100% - 96%	DISDIKPORA
				Dan Tenaga Kependidikan	Standar Nasional Pendidikan Untuk Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	3070	DISDIKI OKA
		P3 Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	PPD3. Peningkatan Kualitas Dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan masyarakat yang terpenuhi	90%	DINKES
		P4 Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	PPD4. Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	100%	BPBD

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target Perubahan RKPD 2025	Perangkat Daerah Penganggung Jawab
5	PN 05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai	P1 Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan	PPD1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pengembangan Industri yang Ditangani	85%	DISKOPDAGIN
	Tambah di Dalam Negeri dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk lokal yang meningkat omsetnya	2,50%	DISKOPDAGIN		
6	PN 06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan	P5 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan	PPD5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Rumah Korban Bencana yang ditangani	50 Rumah	DPUTRPRKP
	Pemberantasan Kemiskinan	Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	25,64%	DPUTRPRKP
7	PN 07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	P6 Inovasi Pelayanan Publik, Penataan Daerah dan Stabilitasi Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan	PPD6. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE	3,4 Indeks	DISKOMINFO

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target Perubahan RKPD 2025	Perangkat Daerah Penganggung Jawab
8	PN 08. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	P2 Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	PPD2. Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Program Pengelolaan Pendidikan	- Persentase Tingkat Budi Pekerti Peserta Didik - Persentase Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Pada Masa Dan Pasca Pandemi - Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan - Persentase Layanan Pendidikan Non Formal dan Informal	- 93% - 86% - 100% - 96%	DISDIKPORA
		P4 Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	PPD4. Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	100%	BPBD

Sumber: Diolah Penyusun, 2025

4.3 Inovasi Daerah

Inovasi Daerah merupakan sarana bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih produktif, inovatif, efisien dan efektif sehingga mempercepat kemajuan, kemandirian, kesejahteraan dan daya saing daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi dalam kesatuan sistem inovasi daerah.

Tabel 4.17 Rekapitulasi Inovasi Perangkat Daerah

No	Judul Inovasi	Perangkat Daerah	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah	Tahapan Inovasi
1	e-Monela (Elektronik monitoring pengendalian evaluasi dan pelaporan)	BADAN PERANCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	Perencanaan	Penerapan
2	SISTEM PENGARSIPAN DIGITAL (SIPENDIG)	KECAMATAN PARIGI	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Teknologi	Perpustakaan, Kearsipan, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian	Penerapan
3	CAT SIPEDE (Computer Assited Test Sistem Penjaringan Perangkat Desa)	KECAMATAN PARIGI	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Teknologi	Tenaga Kerja, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kepegawaian	Penerapan
4	LAUK TERI (Layanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Inovasi pelayanan publik	Teknologi	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Penerapan
5	PELAYANAN KONSULTANSI SECARA DIGITAL DI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN	INSPEKTORAT	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Teknologi	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Penerapan

No	Judul Inovasi	Perangkat Daerah	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah	Tahapan Inovasi
6	SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)	INSPEKTORAT	Inovasi pelayanan publik	Teknologi	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Penerapan
7	Inovasi Pelayanan Peppeling (Pendampingan Pelayanan Perizinan Keliling)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Penanaman modal	Penerapan
8	PABERCASTEL (Pariwisata Berbasis Chat Bot Elektronik)	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Inovasi pelayanan publik	Digital	pariwisata	Penerapan
9	INOVASI KOMUNITAS KASWARI (KESEHATAN JIWA MANDIRI PRODUKTIF)	DINAS KESEHATAN	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Kesehatan, Sosial	Penerapan
10	"PETASAN" (PENJARINGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DI PANGAOSAN)	DINAS KESEHATAN	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Penerapan
11	DIKUPAS (Digital kader untuk pangandaran sehat)	DINAS KESEHATAN	Inovasi pelayanan publik	Teknologi	kesehatan	Penerapan
12	PENGEMBANGAN APLIKASI API VIRTUAL ACCOUNT	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Inovasi pelayanan publik	Teknologi	Keuangan	Penerapan
13	Si Marlin Jawara TB (Sistem Informasi Terintegrasi Eliminasi Tuberculosis Jaga Warga Pangandaran dari Tuberculosis)	DINAS KESEHATAN	Inovasi pelayanan publik	Teknologi	Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penerapan

No	Judul Inovasi	Perangkat Daerah	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah	Tahapan Inovasi
14	SITAKAR (Sistem Informasi Tata Kelola Tera)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Inovasi pelayanan publik	Teknologi	perdagangan	Inisiatif
15	SIPUSPA (SISTEM INFORMASI INTEGRASI PERPUSTAKAAN PANGANDARAN)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Teknologi	Komunikasi dan Informatika, Perpustakaan	Penerapan
16	ASISTENSI SYSTEM	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Teknologi	Keuangan	Penerapan
17	TRAYEK TERINTEGRASI ANTAR MODA BERBASIS PARIWISATA LALU LINTAS (TRAMPOLIN)	DINAS PERHUBUNGAN	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Sosial, Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata	Uji Coba

Sumber: Inovative Government Award (IGA), 2025

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang dituangkan dalam tabel rekapitulasi perubahan rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2025, yang berisi nama program, kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, satuan, pagu indikatif, Realisasi Triwulan 1 Tahun 2025, dan perangkat daerah penanggungjawab yang dituangkan dalam matrik daftar usulan perubahan rencana program dan kegiatan daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2025.

Status kegiatan RKPD ini pada masih bersifat sementara/tentative dan dapat mengalami perbaikan sejalan dengan perkembangan proses perencanaan, kondisi pembangunan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Pangandaran yang begitu kompleks tentunya tidak mungkin dapat diakomodir dengan hanya mengandalkan sumber pendanaan APBD Kabupaten Pangandaran yang sangat terbatas tetapi juga diarahkan melalui APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, pihak swasta maupun swadaya masyarakat.

Dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 setiap Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran melakukan penyesuaian anggaran baik efesiensi maupun penambahan. Perangkat Daerah yang mengalami efesiensi anggaran diantaranya pada: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja honorarium; belanja kegiatan bimtek, sosialisasi pelatihan, diklat dan seremonial lainnya; belanja modal; belanja hibah, bantuan soisal, bantuan keuangan dan belanja barang untuk diserahkan sesuai dengan Surat Edaran Bupati Pangandaran Nomor: 900/631/BKAD.2/2025 Tentang Langkah-Langkah Efesiensi dan Rasionalisasi Belanja Daerah Dalam Rangka Penyehatan Fiskal Kabupaten Pangandaran TA 2025 dan Keputusan bupati pangandaran nomor: 900.1/Kpts.154-Huk/2025 tentang Rencana Aksi Road Map Penyehatan Fiskal Kabupaten Pangandaran. Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan wajib dan mandatori pada tahun 2025 maka penyesuaian anggaran akan dilakukan penambahan.

Berikut rincian Perangkat Daerah yang melakukan penyesuaian anggaran pada Perubahan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025:

Tabel 5.1. Rincian Perubahan Anggaran Tahun 2025 Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	682,504,920,920.00	502,064,268,192.00	(180,440,652,728.00)
2	Dinas Kesehatan	201,897,764,000.00	236,017,188,284.00	34,119,424,284.00
3	Puskesmas Padaherang	5,000,000,000.00	5,787,403,430.00	787,403,430.00
4	Puskesmas Sindangwangi	2,200,000,000.00	2,786,438,817.00	586,438,817.00
5	Puskesmas Mangunjaya	3,750,000,000.00	4,734,840,280.00	984,840,280.00
6	Puskesmas Kalipucang	4,500,000,000.00	5,158,773,562.00	658,773,562.00
7	Puskesmas Pangandaran	7,400,000,000.00	8,814,151,448.00	1,414,151,448.00
8	Puskesmas Sidamulih	1,233,600,000.00	1,977,849,730.00	744,249,730.00
9	Puskesmas Cikembulan	2,721,800,000.00	2,910,190,985.00	188,390,985.00
10	Puskesmas Parigi	4,800,000,000.00	5,321,876,512.00	521,876,512.00
11	Puskesmas Selasari	1,165,200,000.00	1,577,843,779.00	412,643,779.00
12	Puskesmas Cijulang	4,500,000,000.00	4,265,063,000.00	(234,937,000.00)
13	Puskesmas Cimerak	2,448,000,000.00	3,133,160,369.00	685,160,369.00
14	Puskesmas Legokjawa	2,400,000,000.00	2,891,611,260.00	491,611,260.00
15	Puskesmas Cigugur	2,650,000,000.00	3,012,957,587.00	362,957,587.00
16	Puskesmas Langkaplancar	3,250,000,000.00	4,068,754,636.00	818,754,636.00
17	Puskesmas Jadikarya	2,150,000,000.00	3,143,845,861.00	993,845,861.00
18	Rsud Pandega	120,000,000,000.00	132,815,857,054.21	12,815,857,054.21
19	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	384,825,291,973.00	79,367,411,441.51	(305,457,880,531.49)
20	Satuan Polisi Pamong Praja	17,997,907,300.00	17,043,835,037.00	(954,072,263.00)
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,263,525,000.00	3,685,646,633.00	(1,577,878,367.00)
22	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13,073,462,085.00	7,837,121,508.00	(5,236,340,577.00)
23	Dinas Ketenagakerjaan	3,094,640,500.00	2,942,160,038.00	(152,480,462.00)
24	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9,934,147,000.00	9,141,781,121.00	(792,365,879.00)
25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	51,109,083,000.00	23,388,711,429.00	(27,720,371,571.00)
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,814,392,632.00	4,557,450,601.00	(256,942,031.00)
27	Dinas Perhubungan	135,472,877,490.00	95,327,160,942.50	(40,145,716,547.50)
28	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4,266,685,000.00	4,958,124,289.08	691,439,289.08
29	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan, dan Perindustrian	6,125,493,000.00	6,910,305,351.50	784,812,351.50
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15,546,600,000.00	2,946,918,108.39	(12,599,681,891.61)
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14,396,053,967.00	3,423,059,159.69	(10,972,994,807.31)
32	Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	17,383,364,183.00	11,791,191,626.60	(5,592,172,556.40)
33	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	71,184,431,000.00	36,524,511,713.00	(34,659,919,287.00)
34	Dinas Pertanian	10,651,589,400.00	14,047,639,874.00	3,396,050,474.00

No.	Perangkat Daerah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
35	Sekretariat Daerah	46,135,422,000.00	53,843,333,991.00	7,707,911,991.00
36	Sekretariat DPRD	44,175,681,000.00	38,211,521,308.00	(5,964,159,692.00)
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14,570,690,452.00	8,949,633,398.00	(5,621,057,054.00)
38	Badan Keuangan dan Aset Daerah	150,220,133,376.00	250,787,997,660.78	100,567,864,284.78
39	Badan Pendapatan Daerah	13,974,163,000.00	14,510,050,749.00	535,887,749.00
40	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7,015,662,000.00	6,729,219,753.70	(286,442,246.30)
41	Inspektorat	9,640,000,000.00	11,130,080,049.85	1,490,080,049.85
42	Kecamatan Parigi	1,416,004,000.00	1,173,433,615.00	(242,570,385.00)
43	Kecamatan Cijulang	1,453,853,000.00	1,527,775,404.40	73,922,404.40
44	Kecamatan Pangandaran	1,260,121,000.00	1,341,079,434.00	80,958,434.00
45	Kecamatan Mangunjaya	1,536,448,000.00	1,330,086,361.00	(206,361,639.00)
46	Kecamatan Padaherang	1,636,920,000.00	1,589,462,091.00	(47,457,909.00)
47	Kecamatan Cigugur	1,427,582,000.00	1,333,991,138.00	(93,590,862.00)
48	Kecamatan Sidamulih	1,204,960,000.00	1,375,848,232.00	170,888,232.00
49	Kecamatan Langkaplancar	1,918,380,623.00	1,308,682,947.00	(609,697,676.00)
50	Kecamatan Kalipucang	1,660,042,000.00	1,532,497,658.00	(127,544,342.00)
51	Kecamatan Cimerak	1,018,281,000.00	1,303,400,379.00	285,119,379.00
52	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6,490,481,000.00	6,284,955,508.00	(205,525,492.00)
TOTA	AL	2,126,465,652,901.00	1,658,638,153,337.21	(467,827,499,563.79)

Sumber: SIPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025, data diolah.

Program prioritas yang rencananya akan dibiayai pada tahun 2025 disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten Pangandaran 2025-2029 dan memperhatikan kondisi fiskal keuangan daerah serta hasil evaluasi pembangunan daerah sampai dengan triwulan 1 tahun 2025. Jumlah alokasi anggaran untuk usulan program dan kegiatan prioritas, baik yang diusulkan untuk didanai dari sumber APBD Kabupaten Pangandaran, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN serta sumber dana lainnya yang sah, tertuang pada rekapitulasi rencana program dan kegiatan pada perubahan RKPD tahun 2025 berdasarkan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang pemerintahan sebagaimana Tabel 5.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan pada Perubahan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 berikut ini. (terlampir).

Demi Selarasnya Perencanaan Pembangunan Daerah dengan provinsi terdapat Beberapa Program Pembangungan Kabupaten Pangandaran yang mendukung terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2025, diantaranya :

Tabel 5.3 Sinkronisasi Program Pembangunan Kabupaten Pangandaran Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran	Program Kabupaten Pangandaran	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah		
PP1, Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka	PD1, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	463,905,000.00	DINSOS PMD		
Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya		Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM,	Program Administrasi Pemerintahan Desa	108,921,230.00	DINSOS PMD
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	105,933,300.00	DISNAKER		
		Program Penempatan Tenaga Kerja	62,628,200.00	DISNAKER		
		Program Hubungan Industrial	321,510,850.00	DISNAKER		
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	155,611,800.00	DKBP3A		
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2,348,790,000.00	DKBP3A		
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	38,737,600.00	DISKOPDAGIN		
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	41,530,500.00	DISKOPDAGIN		
		Program Pengembangan Umkm	18,196,800.00	DISKOPDAGIN		
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	25,684,400.00	DISKOPDAGIN		
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	43,542,450.00	DISKOPDAGIN		
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	9,436,688.00	DISKOPDAGIN		
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	15,730,500.00	DISKOPDAGIN		

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran	Program Kabupaten Pangandaran	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2,998,281,400.00	DISKOPDAGIN
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	2,980,000.00	DISKOPDAGIN
		Program Pelayanan Penanaman Modal	268,140,300.00	DPMPTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	96,800,000.00	DPMPTSP
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1,258,430,839.00	DKPKP
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	5,210,751,513.00	DKPKP
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	25,367,952,248.00	DISPARBUD
		Program Pemasaran Pariwisata	138,128,504.00	DISPARBUD
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	10,580,000.00	DISPARBUD
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	55,198,065.00	DISPARBUD
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1,444,286,340.00	DISTAN
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4,172,919,364.00	DISTAN
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	26,926,600.00	DISTAN
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3,474,000.00	DISTAN
		Program Penyuluhan Pertanian	431,772,500.00	DISTAN

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran	Program Kabupaten Pangandaran	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah									
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	463,905,000.00	SETDA									
PP2, Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	PD2, Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Program Pengelolaan Pendidikan	1,734,587,007,255.00	DISDIKPORA									
Agama dan Kemdupan Beragama	berbudaya	Program Pengembangan Kurikulum	119,194,000.00	DISDIKPORA									
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	558,000,000.00	DISDIKPORA									
		Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	100,000,000.00	DISDIKPORA									
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	620,000,000.00	DISDIKPORA									
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1,963,069,250.00	DISDIKPORA									
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	26,670,000.00	DINKES							
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	135,000,000.00	DKBP3A									
		Program Perlindungan Khusus Anak	29,285,944.00	DKBP3A									
		Program Pengendalian Penduduk	237,658,136.00	DKBP3A									
		Program Pembinaan Perpustakaan	41,067,728,324.00	DISPUSIP									
											Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	8,466,000.00	DISPUSIP
		Program Pengembangan Kebudayaan	486,715,000.00	DISPARBUD									
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	45,030,000.00	DISPARBUD									
PP3 Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	PD3 Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	133,532,526,149.00	DINKES									

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran	Program Kabupaten Pangandaran	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	438,621,788.00	DINKES
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	250,967,000.00	DINKES
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	82,765,000.00	DINKES
PP4 Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	PD4 Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	5,403,763,500.00	SATPOL PP
		Program Penanggulangan Bencana	623,610,201.00	BPBD
		Program Pemberdayaan Sosial	86,000,000.00	DINSOS PMD
		Program Rehabilitasi Sosial	1,104,920,500.00	DINSOS PMD
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1,943,425,000.00	DINSOS PMD
		Program Penanganan Bencana	528,790,000.00	DINSOS PMD
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	30,918,880.00	DINSOS PMD
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	155,611,800.00	DKBP3A
		Program Perlindungan Perempuan	9,713,547.00	DKBP3A
PP5, Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan	PD5, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	8,336,191,580.00	DPUTRPRKP
Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9,111,645,450.00	DPUTRPRKP
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	1,000,000,000.00	DPUTRPRKP

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran	Program Kabupaten Pangandaran	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1,490,723,900.00	DPUTRPRKP
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	24,191,700.00	DPUTRPRKP
		Program Penataan Bangunan Gedung	27,525,097,440.00	DPUTRPRKP
		Program Penyelenggaraan Jalan	1,888,434,737,001.00	DPUTRPRKP
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	282,232,600.00	DPUTRPRKP
		Program Pengembangan Perumahan	3,428,029,190.00	DPUTRPRKP
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	4,285,996,375.00	DPUTRPRKP
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	108,921,230.00	DLHK
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	12,000,000.00	DLHK
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	98,231,227.00	DLHK
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	867,453,475.00	DLHK
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	4,800,000.00	DLHK
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	6,101,250.00	DLHK
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	3,930,150.00	DLHK
		Program Pengelolaan Persampahan	16,725,845,445.00	DLHK

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran	Program Kabupaten Pangandaran	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	82,711,114,250.00	DISHUB
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	873,892,466.00	SETDA
PP6, Inovasi Pelayanan Publik, Penataan Daerah dan Stabilitasi Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan	PD6, Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5.091.004.772,00	
Keamanan	Penguatan Kondusifitas Daerah dan	Program Administrasi Pemerintahan Desa	108.921.230,00	DINSOS PMD
	Stabilitas Politik	Program Pendaftaran Penduduk	105.150.000,00	DISDUKCAPIL
		Program Pencatatan Sipil	75.651.500,00	DISDUKCAPIL
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	56.502.000,00	DISDUKCAPIL
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	272.002.414,00	DKISP
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	822.173.620,08	DKISP
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	16.384.000,00	DKISP
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	19.300.000,00	DKISP
		Program Pengelolaan Arsip	59.995.385,30	DISPUSIP
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	20.254.889,15	DISPUSIP
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	10.000.000,00	SETDA
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	16.056.328.170,00	SETDA
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	873.892.466,00	SETDA
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	6.513.411.250,00	SEKRETARIAT DPRD
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	808.981.700,00	BAPPEDA
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.364.168.220,00	BAPPEDA
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	217.286.875,00	BAPPEDA

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran	Program Kabupaten Pangandaran	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	239.571.294.487,78	BKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.091.879.814,00	BKAD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.793.548.435,00	BAPENDA
		Program Kepegawaian Daerah	1.470.081.600,00	BKPSDM
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	331.705.500,00	BKPSDM
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.707.327.159,00	INSPEKTORAT
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.582.147.000,00	INSPEKTORAT
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.000.000,00	KEC. PARIGI
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.974.800,00	KEC. CIJULANG
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.000.000,00	KEC. PANGANDARAN
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.000.000,00	KEC. MANGUNJAYA
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.000.000,00	KEC. PADAHERANG
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.000.000,00	KEC. CIGUGUR
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.000.000,00	KEC. SIDAMULIH
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.000.000,00	KEC. LANGKAPLANCAR
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.000.000,00	KEC. KALIPUCANG
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.000.000,00	KEC. CIMERAK
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	563.524.120,00	BAKESBANGPOL

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran	Program Kabupaten Pangandaran	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.096.456.800,00	BAKESBANGPOL
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	7.860.000,00	BAKESBANGPOL
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	51.629.250,00	BAKESBANGPOL
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.500.769.000,00	BAKESBANGPOL

Sumber : SIPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 juga memiliki Program dan Kegiatan yang mendukung pada prioritas kegiatan Stunting, Penanganan Kemiskinan, Pengendalian Inflasi, Ketahanan Pangan dan Tingkat Pengangguran Terbuka, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4

Program Dan Kegiatan Prioritas Stunting, Penanganan Kemiskinan, Pengendalian Inflasi, Ketahanan Pangan dan

Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Tahun 2025

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
PRIC	ORITAS STUNTING				
1	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	23,700,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	26,990,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	95,150,000	DINAS KESEHATAN
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	438,881,439	DINAS KESEHATAN

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	792,553,920	DINAS KESEHATAN
6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	161,800,000	DINAS KESEHATAN
7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2,782,451,861	DINAS KESEHATAN
8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	462,911,250	DINAS KESEHATAN
9	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	104,709,504	DINAS KESEHATAN
10	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	181,780,300	DINAS KESEHATAN
11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	101,361,106,471	DINAS KESEHATAN

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
12	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	159,294,500	DINAS KESEHATAN
13	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	89,100,000	DINAS KESEHATAN
14	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	128,222,500	DINAS KESEHATAN
PRIC	PRITAS PENANGANAN KEMISKINAN				
1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1,447,650,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	40,685,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	478,975,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	16,800,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	66,800,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	345,800,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	8,400,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	22,038,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
9	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	226,572,500	DINAS PERTANIAN
10	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3,474,000	DINAS PERTANIAN
11	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	29,870,412,670	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
12	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4,995,600,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
13	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3,048,400,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
14	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	28,417,600,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
15	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15,168,650,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	883,398,900	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
17	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	512,363,425	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
18	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6,698,918,600	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
19	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	316,925,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
20	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	409,176,400	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
21	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	56,725,500	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
22	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
23	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7,752,791,580	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
24	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	18,196,800	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
25	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	280,237,650	DINAS KETENAGAKERJAAN
26	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	224,854,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
27	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	181,780,300	DINAS KESEHATAN
28	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	101,361,106,471	DINAS KESEHATAN
29	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	95,150,000	DINAS KESEHATAN
30	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	128,222,500	DINAS KESEHATAN

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
31	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	178,300,000	DINAS KESEHATAN
32	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	89,100,000	DINAS KESEHATAN
33	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2,782,451,861	DINAS KESEHATAN
34	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	32,880,000	DINAS KESEHATAN
35	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100,000,000	DINAS KESEHATAN
36	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4,960,000	DINAS KESEHATAN
37	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	18,600,000	DINAS KESEHATAN
38	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	63,960,000	DINAS KESEHATAN

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
39	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	792,563,920	DINAS KESEHATAN
40	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	960,268,800	DINAS KESEHATAN
41	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	193,699,965	DINAS KESEHATAN
42	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	8,150,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
43	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	23,400,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
44	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	35,952,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
45	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1,177,200,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
46	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	168,249,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
47	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	16,395,300	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
48	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	393,995,700	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
49	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	50,779,087.50	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
50	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	48,267,560	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
51	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,455,676,463	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
52	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	79,734,375	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
53	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	PRITAS PENGENDALIAN INFLASI PROGRAM PEREKONOMIAN DAN	Deletrom on Vehitelren	Dengandalian dan Diatribusi	20 700 000	SEKRETARIAT DAERAH
1	PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	39,700,000	SEKRETARIAT DAERAH

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	14,979,450	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	28,563,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	24,016,831,50	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
5	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	168,249,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
6	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	86,113,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
7	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6,401,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
8	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2,100,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
9	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	422,900,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
10	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	222,124,994	BADAN PENDAPATAN DAERAH
11	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	75,799,244	BADAN PENDAPATAN DAERAH
12	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	428,066,159	BADAN PENDAPATAN DAERAH
13	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	248,062,900	BADAN PENDAPATAN DAERAH
14	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	175,640,160	BADAN PENDAPATAN DAERAH
15	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	324,473,120	BADAN PENDAPATAN DAERAH
16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	339,925,500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
17	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	22,197,521	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
18	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	87,868,889	BADAN PENDAPATAN DAERAH
19	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penagihan Pajak Daerah	218,549,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
20	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	21,384,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	188,533,868	BADAN PENDAPATAN DAERAH
22	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	18,023,080	BADAN PENDAPATAN DAERAH
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	4.050.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
24	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2,500,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
25	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12,250,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
26	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	179,895,442,005	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
27	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	7,359,950,721,63	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
28	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	15,298,580,727	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
29	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	6,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PRIC	PRITAS KETAHANAN PANGAN				
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	24,016,831,50	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	168,249,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	16,395,300	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	8,015,175	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	9,882,800	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
6	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	14,979,450	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
7	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	28,563,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1,444,286,340	DINAS PERTANIAN
9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2,059,979,600	DINAS PERTANIAN
10	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	26,926,600	DINAS PERTANIAN
11	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	93,360,000	SEKRETARIAT DAERAH
12	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	57,782,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
13	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2,100,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
14	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2,100,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PRIC	ORITAS PENGENDALIAN TINGKAT PEN	GANGGURAN TERBUKA			
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	96,510,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	9,423,300	DINAS KETENAGAKERJAAN
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	224,854,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	10,558,300	DINAS KETENAGAKERJAAN
5	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	5,958,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
6	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	46,111,300	DINAS KETENAGAKERJAAN
7	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	280,237,650	DINAS KETENAGAKERJAAN

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
8	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30,273,200	DINAS KETENAGAKERJAAN
9	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	39,700,000	SEKRETARIAT DAERAH
10	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	18,196,800	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2,995,528,400	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
12	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	2,753,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN

Sumber : SIPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

BAB VI PENUTUP

BAB VI PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pembangunan daerah sampai dengan triwulan kesatu tahun 2025, bahwa terdapat perkembangan situasi yang memerlukan penyesuaian asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah, perubahan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah, serta kondisi lain yang menyebabkan dokumen perencanaan tahunan yang telah disusun harus disesuaikan.

Perubahan RKPD Kabupaten Pangandaran tahun 2025 selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) dan Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Pangandaran tahun 2025. Selain itu juga menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan ke dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- 1. Perubahan RKPD Kabupaten Pangandaran tahun 2025 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 2. Perangkat daerah dan seluruh *stakeholders* pelaksana pembangunan termasuk masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban berperan serta untuk melaksanakan programprogram pada Perubahan RKPD Kabupaten Pangandaran tahun 2025 dengan sebaik-baiknya.
- 3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten

Pangandaran, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN, maka setiap perangkat daerah perlu membuat Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2025. Renja perangkat daerah tersebut disusun dengan prinsip efisien, transparan, akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan.

- 4. Pemangku kepentingan pembangunan baik unsur pemerintah, dunia usaha dan/atau masyarakat menggunakan RKPD ini sebagai wujud partisipasi dalam mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Pangandaran.
- 5. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pendanaan pembangunan yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan pembangunan di Kabupaten Pangandaran.

Demikian Perubahan RKPD Kabupaten Pangandaran tahun 2025 disusun untuk dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah selaku pelaku pembangunan di Kabupaten Pangandaran untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan pembangunan secara sinergis dan terintegrasi.

BUPATI PANGANDARAN

MHJ. OTTRA PITRIYAMI, S.H.



"Peningkatan Daya Saing Daerah"